



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENDEKATAN *SMART POWER* PRESIDEN AMERIKA  
SERIKAT BARACK OBAMA KEPADA INDONESIA  
TERKAIT UPAYA MEMODERASI KESAN HEGEMONI DI  
ASIA PASIFIK**

**TESIS**

**NI MADE KUS PRATIWI LESTARI  
NPM: 0806449121**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN**

**JAKARTA  
DESEMBER 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENDEKATAN *SMART POWER* PRESIDEN AMERIKA  
SERIKAT BARACK OBAMA KEPADA INDONESIA  
TERKAIT UPAYA MEMODERASI KESAN HEGEMONI DI  
ASIA PASIFIK**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains  
pada Program Studi Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik  
Intelijen Pasca Sarjana Universitas Indonesia**

**NI MADE KUS PRATIWI LESTARI  
0806449121**

**FAKULTAS PASCASARJANA  
PROGRAM KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEGIK INTELIJEN**

**JAKARTA  
DESEMBER 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : Ni Made Kus Pratiwi Lestari  
**NPM** : 0806449121  
**Tanda Tangan** :   
**Tanggal** : 14 Desember 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ni Made Kus Pratiwi Lestari  
NPM : 0806449121  
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen  
Judul Tesis : Pendekatan *Smart Power* Presiden Amerika Serikat Barack Obama Kepada Indonesia Terkait Upaya Memoderasi Kesan Hegemoni di Asia Pasifik.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Intelijen pada Program Studi Kajian Stratejik Intelijen Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Fadjar Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si (.....)

Pembimbing : Dra. Suzie S. Sudarman, M.A

Penguji : Broto Wardoyo, M.A.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Desember 2010

## KATA PENGANTAR

Kebersamaan dan persahabatan yang terjalin selama masa kuliah, kadang lebih terasa dan bermakna di kala menghadapi masa sulit seperti pembuatan tesis ini. Hari-hari penuh warna dan kenangan ini tidak akan mudah untuk dilupakan begitu saja. Oleh karena itu, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya masih ada setetes perhatian untuk sebuah “kerja” penuh idealisme.

Penulisan tesis yang berjudul: Pendekatan *Smart Power* Presiden AS Barack Obama Kepada Indonesia Terkait Upaya Memoderasi Kesan Hegemoni di Asia Pasifik, bertujuan sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar magister di Universitas Indonesia, Program Studi Kajian Strategik Intelijen. Oleh karena itu baik format maupun substansinya penulis masukkan unsur-unsur intelijen terutama *forecasting* untuk membantu menganalisa pendekatan *smart power* yang dilakukan Barack Obama, kaitannya dengan pengaruh China di Asia Pasifik, serta dampaknya terhadap Indonesia khususnya, Asia pada umumnya.

Untuk mereka yang rela “diganggu” porsi istirahatnya, tidak ada kata yang pantas diucapkan selain memohon balasan yang lebih baik dari Tuhan atas keridhoannya. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, suami dan keluargaku, kuhaturkan hormat yang setulusnya atas doa-doa yang mereka panjatkan tanpa harap balas.
2. Dra. Suzie S. Sudarman, MA, dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, waktu, bimbingan, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Dra. Fadjar Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si dan Broto Wardoyo, M.A., yang telah berkenan menggelar sidang dan menguji serta meluluskan tesis saya.
4. Kurie Suditomo dan USINDO yang telah memberikan wawasan baru, ide, dan jalan pemikiran kepada penulis dalam proses awal penyusunan tesis ini.
5. Dosen-dosen dan seluruh civitas akademika di Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Intelijen Strategis (terutama Mas Wing dan Pak Faisal)

yang telah memberikan dukungan berupa pelayanan tanpa pamrih, ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang menjadi bekal berharga bagi penulis.

6. Sahabatku Yopie dan rekan-rekan seangkatan, terimakasih atas kebersamaan dan *supportnya*.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Penulis menyadari menulis mengenai Amerika merupakan hal yang baru bagi dirinya, penulis bukan seorang yang ahli mengenai Amerika. Namun demikian, penulis yakin, suatu keahlian berasal dari rasa ingin tahu. Dan berangkat dari tesis inilah, penulis mencoba untuk mempelajari tentang Amerika dan memenuhi rasa ingin tahunya secara bertahap. Dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, tesis ini masih jauh dari sempurna. Kritik maupun saran yang membangun dari semua pihak, akan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan ini di waktu mendatang.

Jakarta, 14 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERESEITUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Made Kus Pratiwi Lestari  
NPM : 0806449121  
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen  
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pendekatan *Smart Power* Presiden Amerika Serikat Barack Obama Terkait Upaya Memoderasi Kesan Hegemoni di Asia Pasifik**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Desember 2010

Yang menyatakan



(Ni Made Kus Pratiwi Lestari)

## ABSTRAK

Nama : Ni Made Kus Pratiwi Lestari  
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen  
Judul : Pendekatan *Smart Power* Presiden Amerika Serikat Barack Obama Kepada Indonesia Terkait Upaya Memoderasi Kesan Hegemoni di Asia Pasifik

Tesis ini membahas tentang pendekatan AS di bawah pemerintahan Barack Obama, dimana AS berupaya memoderasi kesan hegemoninya di Asia Pasifik, melalui Indonesia. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk membeudung pengaruh China yang mulai mendominasi pasar Asia Pasifik. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya AS melalui pendekatan *smart power*-nya untuk mengantisipasi perkembangan dominasi China di Asia Pasifik, dimana China telah membangun kekuatannya untuk mengamankan kepentingannya di Asia Pasifik.

Pada permasalahan ini, saran tindak kepada Pemerintah Indonesia adalah mengambil keuntungan dari pendekatan *smart power* AS dan strategi China guna meraih masa depan yang lebih baik tanpa membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini disusun secara kualitatif dengan desain deskriptif analisis dan intelijen stratejik.

Kata Kunci:  
AS, *Smart Power*, Hegemoni, China, Asia Pasifik



## ABSTRACT

Nama : Ni Made Kus Pratiwi Lestari  
Study Program : Intelligence Strategic Study  
Judul : US President-Barack Obama's Smart Power Approach towards Indonesia in The Effort Moderate The US Hegemony in Asia Pacific

This thesis discusses the US approach during Barack Obama's administration, where US has tried to moderate its hegemony impression in Asia Pacific through Indonesia. The aim of this approach is to block China's domination over Asia Pacific market which apparently has been growing very fast. This research will be focusing on US smart power approach to anticipate China's growing domination in Asia Pacific countries, where China has build the necessary strength to secure its interest in Asia Pacific

In this case the writer suggest Indonesia's government to make the best use of US's smart power approach and China's grand strategy so it can lead Indonesia to better future without endangering Indonesia's national interests. Therefore, this study is a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

Keywords :  
US, Smart Power, Hegemony, China, Asia Pacific

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>1.PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4. KEGUNAAN PENELITIAN.....	6
1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	7
1.6. KAJIAN PUSTAKA.....	7
1.6.1. Konsep Hubungan Internasional.....	7
1.6.2. Konsep <i>power</i> .....	9
1.6.3. Konsep Hegemoni.....	13
1.6.4. Konsep Diplomasi Publik.....	14
1.6.5. Konsep Intelijen Strategis.....	16
1.7. METODE PENELITIAN.....	21
1.7.1. Jenis Penelitian.....	21
1.7.2. Obkek Penelitian.....	21
1.7.3. Metode Pengumpulan Data.....	21
1.7.4. Pendekatan.....	22
1.7.5. Analisis.....	22
1.8. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
<b>2.KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK.....</b>	<b>24</b>
2.1 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT.....	24
2.2 PERUBAHAN PENDEKATAN DIPLOMASI AS, DARI HARD POWER MENJADI SMART POWER.....	31
2.2.1 Kerjasama Perdagangan dan Investasi.....	35
2.2.2 Kerjasama Pendidikan.....	35
2.2.3 Kerjasama Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.....	37
2.2.4 Kerjasama Pertanian (Ketahanan Pangan).....	38
2.2.5 Kerjasama Energi.....	38
2.2.6 Kerjasama Keamanan.....	39
2.3 DINAMIKA HUBUNGAN AS DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA PASIFIK.....	40
2.3.1 Postur Pasukan AS di Asia Pasifik.....	45
<b>3.PERKEMBANGAN CHINA SEBAGAI ANCAMAN HEGEMONI AS DI ASIA PASIFIK.....</b>	<b>53</b>

3.1.	KEKUATAN CHINA .....	53
3.1.1.	Kekuatan Ekonomi China.....	57
3.1.2.	Kekuatan Militer China .....	61
3.2.	TAIWAN SEBAGAI FAKTOR PENTING DALAM HUBUNGAN CHINA AS .....	67
4.	ANALISA.....	77
	RELEVANSI PENDEKATAN <i>SMART POWER</i> AS KEPADA INDONESIA TERHADAP KEPENTINGANNYA DI ASIA PASIFIK .....	77
4.1	DINAMIKA HUBUNGAN AS-CHINA TERKAIT PEREBUTAN PENGARUH DI ASIA PASIFIK.....	77
4.2	PENURUNAN HEGEMONI AS DAN PENGUATAN PENGARUH CHINA DI ASIA PASIFIK.....	81
4.2.1	Peristiwa Tiananmen pada 1989.....	81
4.2.2	Krisis Ekonomi 1997-1998.....	81
4.2.3	<i>ASEAN Plus Three</i> .....	82
4.2.4	<i>ASEAN China Free Trade Area</i> .....	82
4.3	FORECASTING <i>SMART POWER</i> AS KEPADA INDONESIA TERKAIT DENGAN MENGUATNYA PENGARUH CHINA .....	82
4.3.1	Ancaman Smart Power AS.....	82
4.3.2	<i>Assesment</i> : Kemampuan, Kerawanan dan Kemungkinan Cara Bertindak dari AS dan China.....	86
4.4	SARAN TINDAK UNTUK MENGHADAPI <i>SMART POWER</i> AS MAUPUN PENGARUH CHINA DI KAWASAN ASEAN .....	87
4.4.1	Strategi Regional .....	87
4.4.2	Strategi Indonesia .....	90
5.	PENUTUP .....	98
	Lampiran 1. <i>Remarks By The President On a New Beginning</i> .....	101
	Lampiran 2 <i>Remarks by the President at the University of Indonesia in Jakarta, Indonesia</i> .....	112
	Lampiran 3 Pidato Hillary Clinton di Hawaii. ....	120
	Lampiran 4 Fact Sheets: The United States and Indonesia - Building a 21st Century Partnership.....	132
	DAFTAR PUSTAKA.....	136

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alokasi Anggaran AS.....	42
Gambar 3.1	Konsumsi Minyak AS dan China.....	55
Gambar 3.2	GDP China .....	59
Gambar 3.3	Pengeluaran Militer China .....	66
Gambar 3.4	Perdagangan China ASEAN tahun 2008 .....	74



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara adidaya, kebijakan luar negeri yang Amerika Serikat (AS) gulirkan memiliki pengaruh terhadap situasi dunia. Salah satu kebijakan penting yang sangat mempengaruhi stabilitas keamanan internasional adalah komitmen AS untuk memerangi terorisme. Pasca tragedi 11 September 2001, pemerintah AS di bawah George W. Bush menerapkan langkah agresif atau yang dikenal dengan *Pre-emptive Strike* untuk memerangi musuh-musuh AS baik aktor berupa negara maupun bukan negara, terutama para pelaku terorisme.<sup>1</sup> Strategi Bush adalah melakukan ekspansi dan penyerangan pada sejumlah wilayah-wilayah yang dideteksi sebagai persembunyian teroris. Hasilnya, selama pemerintahan Bush, terjadi penyerangan intensif ke wilayah Afghanistan, Lebanon dan wilayah Timur Tengah. Selain itu, hubungan AS dengan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam di Asia mengalami kerenggangan secara psikologis, meski AS selalu mendukung pemberantasan terorisme di negara-negara Asia yang diindikasikan sebagai sarang teroris.

Terpilihnya Barack Hussein Obama sebagai Presiden AS secara gradual mengubah pendekatan-pendekatan AS pada dunia internasional. Karakter Obama yang dicitrakan bersahabat, memiliki kedekatan dengan dunia Islam, serta antiperang menjadikan dirinya lebih diterima di berbagai belahan dunia, dibandingkan dengan pendahulunya. Konsep *smart power* yang Obama kemukakan menarik minat dunia setelah sebelumnya putus asa atas kebijakan AS di bawah pemerintahan Bush. Selain itu, AS kini cenderung

---

<sup>1</sup> Dan Lieberman. "*The Pre-emptive Strike Strategy : How to Lose Friend, then lose all*". Diakses dari [http://www.alternativeinsight.com/Pre-emptive\\_strike.html](http://www.alternativeinsight.com/Pre-emptive_strike.html). pada 11 Desember 2009.

mengedepankan pendekatan multilateralisme sebagai manifestasi *smart power*-nya. Hal ini berarti, sistem internasional yang bersifat unipolar dimanfaatkan oleh Obama untuk merekonstruksi politik luar negeri AS. Dalam pidato yang disampaikan di Universitas Kairo, Obama berusaha mendekatkan AS dengan dunia Islam dengan menawarkan kerjasama untuk mengatasi tujuh masalah krusial yaitu, terorisme, konflik Israel-Palestina, senjata nuklir, demokrasi, kebebasan beragama, hak-hak wanita dan pembangunan ekonomi di negara-negara muslim.<sup>2</sup>

Upaya *rebalancing* juga dilakukan AS di wilayah Asia dengan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sekutu dan membangun kemitraan strategis baru di negara-negara Asia, melalui kerjasama komprehensif. Selain itu, pada situasi krisis ekonomi yang dihadapi saat ini, AS membutuhkan kawasan Asia untuk pemulihan ekonominya. Upaya pendekatan AS ke wilayah Asia Pasifik, terutama *ASEAN* juga didukung oleh senat AS. Dick Lugar, senator dari Partai Republik, yang secara nyata mendorong pemerintahan Obama untuk segera memprakarsai suatu negosiasi dengan mitra-mitra AS di negara-negara anggota *ASEAN*.<sup>3</sup> Selain itu, AS juga mengupayakan realisasi kemitraan dengan negara-negara Trans-Pasifik (*TPP*), yang meliputi Brunei, Chile, Selandia Baru, Singapura, Australia, Peru dan Vietnam.<sup>4</sup> Desakan ini menggambarkan kekuatiran AS akan pengaruh dan kekuatan China di Asia. Di lain pihak, perkembangan China dalam bidang ekonomi maupun militer memberikan efek yang cukup signifikan bagi konstelasi politik dunia. China disebut *power in the accedant* (kekuatan yang sedang muncul), secara ekonomi.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Pidato Presiden AS, Barack Obama, dalam kunjungannya ke Mesir di Universitas Kairo 4 Juni 2009

<sup>3</sup> *Free Trade Agreement ASEAN: Konsesi Obama kepada Cina* diakses dari [http://theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=882&type=3](http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=882&type=3), pada 18 November 2010

<sup>4</sup> Kompas 15 November 2009, diakses dari <http://lipsus.kompas.com/read/2009/11/15/05572285/Pemimpin.Asia.Pasifik.Bertemu.Obama>, pada 17 November 2010.

<sup>5</sup> Charles E. Morrison, *Asia Pacific Security Outlook*, (AN APAP Project 2003) hal 14.

Kekalahan AS dalam perang Vietnam berakibat pada berkurangnya peran AS di kawasan Asia Tenggara dan terus berkembang hingga berakhirnya Era Perang Dingin. Pengaruh AS dalam bidang politik dan keamanan mulai pudar karena negara-negara *ASEAN* sepenuhnya tidak membutuhkan AS dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, walaupun beberapa negara anggota *ASEAN* tetap mengharapkan kehadiran AS sebagai upaya menghadapi kemajuan Cina yang semakin agresif. Setelah invasi AS ke Afghanistan dan Irak, pengaruh militer AS kembali menguat di Asia Pasifik sejalan dengan semangat untuk memerangi terorisme global. Dukungan penuh terhadap perang global melawan teroris menyebabkan AS memberikan bantuan militer yang cukup banyak bagi negara anggota *ASEAN*, terutama Singapura, Philipina dan Thailand.

Dalam pidato pelantikan Barack Obama sebagai Presiden AS, 20 Januari 2009, terlihat adanya keinginan dari AS untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kekeliruan dalam praktek Politik Luar Negeri AS terhadap negara-negara Islam di masa presiden George W. Bush.

Sementara itu, China yang merupakan negara dengan penduduk lebih dari 1 milyar jiwa mengalami perkembangan pesat, yakni memiliki senjata nuklir, serta anggaran militernya yang meningkat di atas 10% setiap tahun dalam 17 tahun terakhir. Pandangan bahwa China merupakan ancaman di kawasan Asia Tenggara (*China Threat Theory*) jelas merupakan fokus AS di kawasan tersebut. Oleh karena itu kebangkitan China sekarang ini tidak hanya digambarkan sebagai sesuatu yang menyenangkan, tetapi sekaligus sebagai sesuatu yang menakutkan bagi AS. Anggaran militer China selama 2 tahun terakhir telah mencapai angka USD 29,9 miliar. Namun, ada asumsi kuat dari AS dan sekutunya yang percaya bahwa anggaran pertahanan tahunan militer China berkisar dari USD 30-70 miliar. Artinya data yang dipublikasikan oleh Cina diperkirakan hanya 1/3 (sepertiga) dari anggaran

yang sesungguhnya. Hal ini telah menempatkan China pada posisi nomor tiga di dunia setelah AS dan Rusia dalam belanja militer.

Selain itu, fakta bahwa Angkatan Bersenjata China merupakan yang terbesar di dunia dengan jumlah 2,5 juta personil, tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu salah satu fokus yang penting kembalinya Asia Pasifik menjadi perhatian AS adalah karena kebangkitan ekonomi China dan perluasan pengaruh China dalam rangka mencari sumber energi di seluruh dunia. Adanya proyek perencanaan pembangunan jaringan pipa untuk saluran gas alam yang akan melintasi negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara sangat penting untuk investasi AS di masa depan. Meskipun *APEC* belum memberikan respon terhadap proposal AS untuk jaringan pipa tersebut, saluran-saluran baru telah direncanakan untuk dibangun di antara negara-negara *ASEAN*. Contohnya adalah pipa saluran air Indonesia dari Pulau Natuna ke Sumatera, pipa saluran Singapura dan Malaysia, dan pipa yang menghubungkan Brunei dan Thailand. Kebutuhan gas yang terus meningkat memberikan kecenderungan perkembangan pipa saluran ini akan terus berkembang di masa yang akan datang, bahkan mungkin sampai ke kawasan Laut Cina Selatan yang didominasi oleh China.

Bagi AS, China yang kuat sangat menakutkan karena merupakan ancaman terhadap semua kepentingan AS di seluruh dunia. Namun kehadiran dan posisi AS yang kuat di belakang kekuatan Jepang selama ini merupakan pemicu bagi China untuk terus meningkatkan kapasitas militer sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonominya. Di masa depan, politik luar negeri AS terhadap China dan di Asia Pasifik masih akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan perdagangan di bandingkan dengan isu nuklir. Meskipun AS masih merupakan pemimpin ekonomi dunia, tetapi negara ini kalah cepat memanfaatkan peluang ekonomi yang ada dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh China, terutama dalam melakukan rekonsiliasi antara kepentingan politik dan ekonominya. Apalagi kondisi itu diperparah dengan adanya krisis ekonomi global yang justru dimulai dari AS pada 2008. Hingga



kini, AS tidak berhasil menahan kekuatan ekonomi Cina, meskipun berulang kali AS melakukan protes karena kemajuan ekonomi China tersebut dianggap AS karena China melakukan praktek perdagangan yang tidak adil. Walaupun begitu, secara khusus beberapa negara-negara Asia Pasifik masih memiliki pandangan bahwa kehadiran AS merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin stabilitas kawasan, terutama untuk mengimbangi peran China yang di nilai semakin agresif.

Warna baru kebijakan luar negeri AS melalui pendekatan *smart power* tentunya memiliki implikasi bagi Indonesia. Kedekatan psikologis antara Indonesia dengan Presiden Barack Obama, karena pernah menghabiskan masa kecilnya di Indonesia, cenderung menimbulkan tumbuhnya simpati pada sosok presiden AS tersebut. Intelijen perlu melihat perkembangan ini sebagai salah satu faktor yang dapat menjadi sinyal dari *grand strategy* AS untuk memoderasi kesan hegemoninya di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, perkembangan kekuatan China, sebagai *rival* AS patut dicermati oleh pengambil keputusan, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, untuk melihat perkembangan konstelasi politik di dunia umumnya, di kawasan Asia Pasifik pada khususnya.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan pada tesis ini adalah pendekatan *smart power* AS, di bawah kepemimpinan Barack Obama, kepada Indonesia serta kaitannya dengan moderasi kesan hegemoni AS di Asia Pasifik. Kemudian dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

- 1.2.1. Bagaimana implementasi dari pendekatan *smart power* Barack Obama kepada Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana kekuatan China serta pengaruhnya di Asia Pasifik sehingga menjadikannya sebagai ancaman bagi hegemoni AS di kawasan tersebut?

- 1.2.3. Bagaimana dampak *smart power* AS bagi Indonesia? Serta adakah relevansinya dengan penguatan *engagement* AS di kawasan Asia Pasifik?

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk:

- 1.3.1. menjelaskan perubahan-perubahan pendekatan diplomasi AS di bawah pemerintahan Barack Obama khususnya kebijakan yang ditujukan kepada Indonesia, yang disebut sebagai negara muslim terbesar di dunia.
- 1.3.2. Selanjutnya, memberikan gambaran tentang kekuatan hegemoni AS di dunia, serta kekuatan China yang menjadi ancaman hegemoni AS tersebut.
- 1.3.3. Melihat gambaran nilai strategis, yakni peluang maupun ancaman dari pendekatan *smart power* bagi Indonesia serta menemukan relevansinya dengan kepentingan hegemoni AS di Asia Pasifik.

### 1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

- 1.4.1. Memberikan manfaat dalam bidang akademis, yaitu sebagai bahan studi dan kajian ilmu Intelijen Strategis, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian intelijen khususnya mengenai diplomasi dan hubungan internasional.
- 1.4.2. Merupakan produk akademik dalam perspektif intelijen yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pengambil keputusan (*decision maker*) mengenai langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan-kebijakan luar negeri AS.

## 1.5. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Hubungan internasional memiliki cakupan dan definisi yang sangat luas. Dalam tesis ini pembahasan akan dibatasi pada kebijakan-kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia, yang tertuang dalam pidato Barack Obama, posisi AS di dunia, kekuatan dan pengaruh China. Ruang lingkup tesis dibatasi pada relevansi antara penerapan *smart power* AS kepada Indonesia dengan kepentingan AS di Asia Pasifik.

Dalam hal ini, intelijen bertanggungjawab dalam suplai informasi terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah di segala bidang, termasuk bidang politik internasional sehingga melalui tesis ini dapat dijelaskan bagaimana nilai strategis dari kebijakan AS kepada Indonesia dan upaya hegemoni AS di Asia Pasifik.

## 1.6. KAJIAN PUSTAKA

### 1.6.1. Konsep Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan hubungan yang terjadi di antara bangsa-bangsa yang berbeda, di mana hubungan tersebut didasarkan oleh beberapa faktor yang menunjang terjadinya proses hubungan antar negara. Sedangkan istilah politik internasional merupakan hubungan antarnegara di mana setiap komponen tersebut memiliki berbagai aspek, seperti: *power*, sumber daya, serta tujuan-tujuan yang diinginkan. Politik internasional dapat dijelaskan sebagai situasi yang berlangsung di mana suatu negara melakukan berbagai tindakan serta aktivitas yang dapat mempengaruhi situasi politik negara lain, atau yang mengakibatkan terjadinya dampak politik. Yang menjadi perhatian utama dalam politik internasional pada dasarnya meliputi pembagian kekuasaan dalam konteks internasional, "*balance of power*," hubungan

antarbangsa yang didasarkan atas ekonomi, perdagangan, interdependensi, pola-pola kerja sama, aliansi, maupun konflik antarnegara, baik yang bersifat bilateral, regional ataupun secara global, dan menyangkut pula kepada lembaga-lembaga yang bersubstansi kerjasama internasional.

Jika interaksi atau hubungan antar negara berkaitan dengan aspek-aspek politik, maka proses interaksi tersebut dikenal sebagai politik internasional. Dengan demikian, istilah hubungan internasional pada dasarnya memiliki makna lebih luas daripada istilah politik internasional. Berkenaan dengan pengertian politik internasional, K.J. Holsti<sup>6</sup> memberi pengertian “Politik internasional mencakup kepentingan (*interest*) dan tindakan (*actions*) beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antarnegara dengan organisasi internasional pada tingkat pemerintah. Sebagai struktur, politik internasional merangkum atau terdiri atas elemen-elemen sistem internasional seperti multipolaritas atau bipolaritas dan organisasi internasional.”

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja<sup>7</sup> mendefinisikan “politik luar negeri merupakan suatu alat untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri merupakan aspek pula dari suatu strategi nasional beserta sasarannya jangka pendek dan panjang.”

Disimpulkan dari pandangan yang berbeda-beda, bahwa karakteristik dari hubungan internasional adalah: (1) kompetisi negara-negara untuk mendapatkan *power* tidak terhindarkan dan hal tersebut membawa pada kondisi *insecurity*, (2) pencarian

---

<sup>6</sup> K.J. Holsti, *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analitis*, terjemahan Wawan Djuanda. (Binacipta. Jakarta. 1994) hal11.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. (1983), hal 152.

terhadap keamanan berbasis pada *self help*, (3) kecenderungan untuk bersandar pada penggunaan kekerasan dan ancaman yang menguatkan *insecurity*, (4) aplikasi yang terbatas terhadap konsep moralitas karena perilaku negara lain yang tidak dapat diprediksi, (5) eksistensi dari dilemma keamanan di mana apabila suatu negara berusaha meningkatkan sekeritasnya, hal tersebut berjalan beriringan dengan perasaan insekuritas negara lain. *Balance of power* menjadi penting untuk mencegah adanya hegemoni regional maupun global, menciptakan keamanan dan stabilitas dalam sistem, dan memperkecil kemungkinan terjadinya perang dengan berkoalisi meng-*counter* potensi agresi. Metode untuk menciptakan ataupun mempertahankan *balance of power* ini adalah : (1) kebijakan untuk membagi dan memerintah, mengurangi *power* dari yang kuat dengan aliansi diantara yang lemah, (2) kompensasi teritori setelah perang untuk mengurangi keuntungan pemenang perang, (3) membuat negara penyangga (*buffer state*), (4) formasi aliansi, (5) mempertahankan pengaruh, (6) intervensi, (7) *diplomatic bargaining*, (8) menyelesaikan sengketa lewat cara-cara legal dan damai, (9) mengurangi persenjataan atau diadakan perjanjian mengenai persenjataan, (10) berperang untuk menciptakan atau mempertahankan *preferred balance*.

#### 1.6.2. Konsep *power*

Sampai saat ini masih belum dapat ditentukan definisi pasti mengenai *power*. David Baldwin menuliskan bahwa *power* sebagai konsep kunci pada teori realis dalam politik internasional, di mana mengakui bahwa 'definisi tepat dari *power* tetap menimbulkan kontroversi.'<sup>8</sup> Baldwin<sup>9</sup> mendeskripsikan konsep *power* sebagai 'salah satu konsep yang paling sukar dideskripsikan dalam studi

<sup>8</sup> David A. Baldwin. *Power and International Relations dalam Handbook of International Relations*. (2002) hal 177.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 177

hubungan internasional. Hans Morgenthau<sup>10</sup> mendefinisikan *power* sebagai suatu cara yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain. Sedangkan Kautilya<sup>11</sup> menjelaskan konsep *power* sebagai sebuah pemilikan kekuatan (atribut) yang berasal dari tiga unsur, yaitu pengetahuan, kekuatan militer, dan keberanian.

Ukuran besaran *power* merupakan sesuatu yang subjektif, tergantung dari sudut pandang manakah yang diambil serta apakah yang dijadikan sumber kekuatan tersebut. Oleh karenanya penentuan kekuatan merupakan hal yang psikologis, di mana yang melihat kekuatan tersebut hanyalah individu yang melihatnya. Joe Stoessinger<sup>12</sup> menyatakan bahwa:

*“nation’s power may depend in considerable measurement on what other nations think it is or even on what it thinks other nations think it is.”*

Hal tersebut menunjukkan bahwa *power* suatu negara sangat relatif, baik jenis maupun ukuran yang dipakai. Kekuatan militer dan ekonomi merupakan contoh dari *hard power*. Selain kekuatan militer dan ekonomi, sesungguhnya masih ada *indirect ways* yang dapat diambil untuk meningkatkan kekuasaan sebuah negara. Sebuah negara dapat meraih tujuan-tujuannya dalam perpolitikan internasional karena negara-negara lain menyukai nilai dan cita-cita negara tersebut. Kemampuan inilah yang disebut sebagai *soft power*, kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan apa yang kita inginkan tanpa melalui pemaksaan atau iming-iming imbalan. Kemampuan untuk menarik (*attract*) negara lain ini, sama pentingnya dengan kemampuan untuk memaksa (*coercion*) melalui militer maupun kemampuan untuk memberikan imbalan (*payments*) melalui ekonomi.

<sup>10</sup> Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations*. (New York: Knopf, 1973). hal 122

<sup>11</sup> Baldwin. *Op.cit.* hal 177

<sup>12</sup> Richard Little dan Michael Smith. *Perspective on World Politics*. (New York: Routledge, 1991)

Konsep *smart power* merupakan konsep baru yang dicetuskan oleh Suzanne Nossel.<sup>13</sup> Konsep ini merupakan kolaborasi atas penggunaan *hard power* dan *soft power*. Dalam kebijakan luar negeri AS, istilah *hard power* merujuk pada pengungkapan kekuatan militer. *Smart power* mengandung arti bahwa pemerintah bisa bekerja sama untuk sebuah kepentingan bersama dan global. Biasanya istilah *soft power* digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk persuasi AS dalam bentuk perjanjian dagang, bantuan luar negeri, diplomasi dan pengaruh budaya (melalui film atau musik).<sup>14</sup> Hal ini juga melibatkan penggunaan *leverage* militer, diplomasi, politik, legal, budaya dan yang terpenting adalah pemilihan instrumen yang tepat dengan penyesuaian kebutuhan untuk melancarkan kebijakan luar negeri.<sup>15</sup> *Smart power* sangat mengedepankan khasanah implementasi kebijakan luar negeri yang mengedepankan dialog bilateral maupun multilateral maupun kemitraan dan aliansi.

Pada penyampaian pidato penerimaan jabatan Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton menambahkan bahwa metode *smart power* akan menjadi karakteristik implementasi kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Barack Obama. Dalam hubungan internasional, pendekatan ini mengurangi bobot penggunaan kekuatan militer, namun mulai mengandalkan dialog dan kemitraan dalam segala aspek untuk mempertahankan pengaruh AS.<sup>16</sup> *Smart power* yang merupakan strategi AS saat ini mempunyai empat prinsip utama dalam politik AS, yaitu mempertahankan

<sup>13</sup> Barry Buzan, *The United States and the Great Powers: World Politics in the Twenty-First Century*, (Norfolk: Biddles Ltd, 2004) hal 34

<sup>14</sup> Richard L. Armitage dan Joseph S. Nye, Jr. *Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America*. (CSIS: Washington 2007)

<sup>15</sup> Keith Porter, *Developing an Integrated Foreign Policy. What is Smart Power*. Diakses dari <http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/a/smartpower.htm>. pada 20 November 2010.

<sup>16</sup> Richard L. Armitage dan Joseph S. Nye, Jr. *Op.cit.* hal 15.

kepemimpinan global baik dalam lingkup politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan, mempertahankan pola interaksi beserta negara yang mempunyai pengaruh kuat, diteruskan memperkuat berbagai institusi internasional yang merupakan perwujudan dalam mekanisme berbagai permasalahan global yang diselesaikan dan yang terakhir untuk memperluas nilai demokrasi secara menyeluruh.<sup>17</sup>

*Smart power* diperlukan untuk membentuk kemitraan dan kerjasama antar bangsa.<sup>18</sup> Seiring dengan berkembangnya aktor hubungan internasional, maka kemitraan dan kerjasama antar negara semakin diperlukan. Di era transnasional di mana aktor-aktor hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh negara (*nation state*), tidak ada negara yang tidak membutuhkan kerja sama dengan negara-negara lain. Misalnya, meskipun dalam hubungan antar negara, kedigdayaan militer AS tidak terkalahkan, namun AS akan sangat kesulitan untuk mengalahkan terorisme internasional yang tidak terikat batasan negara.

Jika dilihat secara lebih jeli, *smart power* memiliki kesamaan dengan konsep hegemoni yang dirumuskan oleh Gramsci.<sup>19</sup> Patut di catat, AS dengan *smart power* bukan berarti menjadi AS yang tidak perlu diwaspadai. Karena baik *hard power* maupun *soft power* sama-sama merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan AS.<sup>20</sup> Kepentingan nasional Indonesia harus tetap menjadi landasan utama pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, diakui atau tidak, AS adalah *the big kid on the block* dalam

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 30

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 33

<sup>19</sup> Steven Lukes, *Power and the Battle for Hearts and Mind: on the Bluntness of Soft Power. Power in World Politics*, (Routledge. 2007) hal 18

<sup>20</sup> Joseph S. Nye, Jr. *The Decline of American Soft Power* diakses dari <http://www.foreignaffairs.com/articles/59888/joseph-s-nye-jr/the-decline-of-americas-soft-power> pada 20 November 2010



hubungan internasional.<sup>21</sup> Jika harus memilih, maka AS dengan *smart power*, jauh lebih baik menguntungkan Indonesia dibanding AS yang menggunakan *hard power*.

### 1.6.3. Konsep Hegemoni

Istilah hegemoni berasal dari istilah Yunani, *hegeisthai* (“to lead”).<sup>22</sup> Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa di sini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah).

Hegemoni bisa didefinisikan sebagai: dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*). Lihat juga definisi di bawah ini:

*“Hegemony is the dominance of one group over other groups, with or without the threat of force, to the extent that, for instance, the dominant party can dictate the terms of trade to its advantage; more broadly, cultural perspectives become skewed to favor the dominant group. Hegemony controls the ways that ideas become “naturalized” in a process that informs notions of common sense”*<sup>23</sup>

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok dominan (*the ruling party*, kelompok yang

<sup>21</sup> Joseph S. Nye, Jr. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. (Public Affairs, New York, 2004)

<sup>22</sup> Todd Gitlin, ‘Prime time ideology: the hegemonic process in television entertainment’, in Newcomb, Horace, ed. (1994), *Television: the critical view – Fifth Edition*. (Oxford University Press, New York, 1994).

<sup>23</sup> Wikipedia, diakses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Hegemony> pada 15 November 2010

berkuasa). Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat menyebar dan dipraktikkan. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian sehingga pihak yang didominasi tetap diam dan taat terhadap kepemimpinan kelompok penguasa.

#### 1.6.4. Konsep Diplomasi Publik

Diplomasi berasal dari kata dalam bahasa Perancis yakni '*diplomatie*,' yang secara harfiah diartikan sebagai kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Menurut Steven Lukes, secara istilah, diplomasi secara sederhana didefinisikan sebagai praktek maupun aturan main yang diterapkan oleh negara-negara dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Istilah tersebut muncul di abad ke-18 ketika dokumen-dokumen diplomatik mulai menjadi bagian dari hubungan internasional. Untuk kemudian para utusan negara bangsa disebut sebagai *diplomatic corps* yang mencakup para duta besar, konsul, hingga para staff yang ambil bagian dalam sebuah misi luar negeri. Sejak itu pula, istilah diplomasi menjadi bagian integral dari politik luar negeri dan hubungan internasional sebuah negara.<sup>24</sup>

Secara sederhana, diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara wakil-wakil dari negara atau sekelompok negara. Istilah ini biasanya merujuk pada diplomasi internasional, di mana hubungan internasional melalui perantara diplomat profesional terkait isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi dan budaya. Begitu pula perjanjian

---

<sup>24</sup> Steven Lukes. *Power and the Battle for Hearts and Mind: on the Bluntness of Soft Power*. Power in World Politics, (Routledge. 2007) hal 28.

internasional yang biasanya dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disetujui oleh politisi nasional dalam negeri.

Definisi diplomasi publik diciptakan pada 1965 oleh Edmund Gullion, dekan dari *Fletcher School of Law and Diplomacy* di Tufts University di Amerika, ketika mereka membangun *Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy*.<sup>25</sup> Namun konsep diplomasi publik mereka terbatas hanya pada menjelaskan dan mempromosikan isu dan kebijakan asing.

Lebih khusus lagi, Deplu AS menyatakan:

*“public diplomacy seeks to promote the national interest and the national security of the United States through understanding, informing, and influencing foreign publics and broadening dialogue between American citizens and institutions and their counterparts abroad.”*<sup>26</sup>

Diplomasi publik juga dikenal dengan istilah ‘*second track diplomacy*’ yang secara umum didefinisikan sebagai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen pemerintah dan non-pemerintah secara tidak resmi (*unofficial*).<sup>27</sup> Perlu dicatat bahwa *second track diplomacy* bukan bertindak sebagai pengganti *first track diplomacy*. Dengan kata lain, upaya-upaya yang dilakukan dalam *second track diplomacy* harus melancarkan jalan bagi negosiasi dan persetujuan dalam rangka *first track diplomacy* dengan cara mendorong para diplomat untuk memanfaatkan informasi penting yang diperoleh pelaku *second track diplomacy*. Dengan kata lain, diplomasi total dengan melibatkan diplomasi publik (*multi-track diplomacy*) sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kesuksesan ketika menjalankan misi politik luar negeri.

<sup>25</sup> Roger Simon. *Gramsci's Political Thought: An introduction*, (London 1991).

<sup>26</sup> Jan Melissen. *Wielding Soft Power. Clingendael Diplomacy Papers, no.2.* (Clingendael, Netherlands. 2005) hal 103

<sup>27</sup> Roger Simon. *Op.cit*

Diplomasi publik (*second-track diplomacy*) melibatkan berbagai aktor dengan bidangnya masing-masing. Diplomasi publik antara lain dilakukan oleh kaum bisnis atau profesional, warga negara biasa, kaum akademisi (peneliti, pendidik, dll), organisasi non pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan dan keuangan, dan yang paling penting adalah jalur kesembilan yakni media massa. Media massa memiliki fungsi yang sangat strategis karena memainkan peran sebagai pemersatu seluruh aktor diplomasi publik melalui aktivitas komunikasi. Tujuan lainnya dari diplomasi publik adalah mengurangi atau menyelesaikan konflik melalui pemahaman komunikasi dan saling pengertian serta mempererat jalinan hubungan antar aktor internasional; mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan, dan salah persepsi; menambah pengalaman dalam berinteraksi; mempengaruhi pola pikir dan tindakan pemerintah dengan menjelaskan akar permasalahan, perasaan, kebutuhan, dan mengeksplorasi pilihan-pilihan diplomasi tanpa prasangka; dan terakhir adalah memberikan landasan bagi terselenggaranya negosiasi-negosiasi yang lebih formal serta merancang kebijakan pemerintah.

#### 1.6.5. Konsep Intelijen Strategis

Konsep Intelijen Strategis (*Strategic Intelligence*) sangat erat dengan semua pihak yang memiliki perhatian pada intelijen pemerintah di tingkat nasional. Sherman Kent menguraikan bahwa bentuk-bentuk intelijen dengan sudut pandang di antara sisi akademis dan sisi pendekatan terapan/praktek intelijen. Kent mengatakan bahwa intelijen strategis adalah intelijen positif (*positive intelligence*) pada level tinggi (*high-level, foreign positive intelligence*) dan pengetahuan yang menempatkan masyarakat sipil secara baik dan militer diharuskan

mengamankan kepentingan nasional (*the knowledge which our highly placed civilians and military men must have to safeguard the national welfare*).<sup>28</sup>

Loch Johnson dan James Wirtz mendefinisikan Intelijen Strategis sebagai berikut:

*“contributes to the processes, products, and organizations used by senior officials to create and implement national foreign and defense policies. Strategic intelligence thus provides warning of immediate threats to vital national security interests and assesses long-term trends of interest to senior government officials. Strategic intelligence is of political importance because it can shape the course and conduct of U.S. policy.”*<sup>29</sup>

Menurut Richard L. Russell (2007),<sup>30</sup> Intelijen Strategis adalah informasi dan analisis yang sangat relevan dengan kepentingan dan tanggung jawab dari presiden sebagai pemimpin sebuah negara. Informasi didapatkan melalui kegiatan klandestin (kegiatan rahasia) yang merupakan kegiatan penting, namun bukan merupakan satu-satunya komponen dari Intelijen Strategis. Dalam era teknologi informasi, informasi yang mendominasi adalah mengenai hubungan internasional yang tersedia secara umum dan dapat diakses secara langsung melalui internet. Kegiatan klandestin digunakan untuk mengumpulkan informasi pelengkap dari informasi yang didapat dari sumber terbuka, tetapi tidak dilakukan dalam jumlah yang lebih sedikit dan hal tersebut digunakan untuk memahami kompleksnya isu-isu aktual yang strategis.

<sup>28</sup> Sherman Kent. 1949. *Strategic Intelligence for American World Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 3, (Princeton 1949) hal 7.

<sup>29</sup> Loch K. Johnson and James J. Wirtz (eds.), *Strategic Intelligence: Windows into a Secret World*. (Los Angeles, CA: Roxbury, 2004), hal. 2.

<sup>30</sup> Richard L. Russell (2007), *Sharpening Strategic Intelligence*, (New York: Cambridge University Press, 2007) hal. 5-9

Berikut adalah beberapa definisi intelijen strategis yang dikutip dari beberapa kamus elektronik:

- a. Pengetahuan intelijen yang diperlukan dalam membuat kebijakan dan perencanaan militer pada tingkat nasional dan internasional.<sup>31</sup>
- b. Pengetahuan intelijen yang diperlukan untuk memformulasikan strategi, kebijakan, dan perencanaan militer dan operasi-operasi di tingkat nasional dan medan pertempuran.<sup>32</sup>
- c. Seputar kegiatan koleksi, proses, analisis, dan penyebaran intelijen yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan dan perencanaan militer di tingkat nasional dan internasional.<sup>33</sup> Pada definisi intelijen strategis yang disebutkan terakhir juga dikutip oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon dengan menyebutkannya di artikel "*Strategic Intelligence*" dalam buku *Joint Publication (JP) 1-02, 509 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms* (Washington: *Department of Defense*, 12 April 2001).<sup>34</sup>

Dengan kata lain intellijen strategis adalah intelijen yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan strategi, biasanya strategi induk atau lebih biasa dikatakan sebagai strategi nasional. Sebuah strategi tidak hanya berupa perencanaan *real*, tetapi juga berupa logika arah perencanaan.

<sup>31</sup> Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2008 Princeton University, Farlex Inc.

<sup>32</sup> *Dictionary of Military and Associated Terms*. (US Department of Defence 2005).

<sup>33</sup> Michael Herman. *Intelligence Power in Peace and War*. 2003

<sup>34</sup> Department of Defense. *Joint Publication* diakses dari [http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new\\_pubs/jp1\\_02.pdf](http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf). pada 30 November 2008

Dalam kaitannya dengan strategi nasional, sebuah strategi nasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional disusun dengan menggunakan beberapa *variable* bidang kehidupan yang cakupannya sangat luas. Oleh karena itu, diperlukan ahli (*in depth expertise*) di tiap-tiap bidang tersebut. Tanpa adanya para ahli masing-masing bidang tersebut (yang memiliki dasar dan detail pengetahuan pada bidang-bidang tersebut), maka sebuah strategi hanya bersifat teori abstrak (*abstract theory*).<sup>35</sup>

Esensi dari Intelijen Strategis adalah informasi (yang didapatkan dari sumber terbuka dan tertutup) digabungkan dengan analisis sehingga dapat digunakan oleh pengambilan kebijakan presiden dalam memperkirakan kekuatan ancaman dan serangan yang menyerang kepentingan nasional.

Intelijen Strategis adalah analisis sintesis dari keragaman informasi yang didapat secara klandestin, meliputi personil intelijen, diplomat, penyadapan komunikasi, dan pemetaan satelit, sebaik informasi dari sumber-sumber terbuka, seperti surat kabar, internet, radio, dan televisi, yang kemudian diproses sebagai pertanggungjawaban kepada presiden dan perangkat keamanan nasional dengan mengatur dan mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk mewujudkan tujuan nasional yang strategis.

---

<sup>35</sup> John G. Heidenrich, "*The State of Strategic Intelligence. The Intelligence Community's Neglect of Strategic Intelligence*", (Central Intelligence Agency's Center for the Study of Intelligence, 2007) Diakses melalui [www.cia.gov](http://www.cia.gov) pada 24 Desember 2008

Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), konsep Intelijen Strategis diimplementasikan dalam sembilan komponen intelijen strategis, meliputi geografi, transportasi dan telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, angkatan bersenjata, sejarah, dan biografi tokoh-tokoh prominen. Komponen-komponen tersebut kemudian diolah, sehingga menghasilkan rumusan mengenai kemampuan, kerawanan dan kemungkinan cara bertindak serta niat suatu negara terhadap negara lain (K3N). Intelijen Strategis merupakan bagian dari upaya menjamin stabilitas nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan dengan penginderaan terhadap lingkungan stratejik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Analisis strategis merupakan produk intelijen sebagai *support* untuk *user* dalam pengambilan keputusan yang mengandung *forecasting* (perkiraan), *early warning* (deteksi dini), dan *problem solving* (alternatif solusi).

Intelijen Strategis diproduksi oleh CIA sebagai salah satu instrumen kritis dari kekuatan nasional untuk digunakan presiden sebagai kewenangannya mengambil kebijakan. Richard Betts menyatakan bahwa:

*"If capacity for informed strategic analysis - integrating political, economic, and military judgment- is not preserved and applied, decisions on the use of force will be uninformed and, therefore, irresponsible."*<sup>36</sup>

Intelijen Strategis yang akurat dapat meningkatkan kekuatan dan mempengaruhi instrumen kekuatan nasional lainnya. Sebaliknya, Intelijen Strategis yang mempunyai kecenderungan blunder dapat menjadi masalah dan

<sup>36</sup> Richard K. Betts, "Should Strategic Studies Survive?," *World Politics*, no. 1 (October 1997), hal. 7-8.



mengurangi pengaruh kepada instrumen Ketahanan Nasional. Departemen Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa keakurasian intelijen secara signifikan meningkatkan keefektifan dari diplomasi dan agresi militer, walaupun intelijen yang akurat tidak menjamin pengambilan kebijakan yang tepat, namun intelijen yang blunder biasanya memberikan kontribusi untuk mengambil kebijakan yang gagal.<sup>37</sup>

## 1.7. METODE PENELITIAN

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif deskriptif*, yaitu membuat gambaran korelasi secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diidentifikasi.

### 1.7.2. Objek Penelitian

Objek penelitian pendekatan *smart power* AS kepada Indonesia, perkembangan kekuatan China dan kepentingan AS di Asia Pasifik.

### 1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari fakta-fakta, buku-buku; majalah dan koran; jurnal; makalah-makalah dan produk akademis lainnya.

---

<sup>37</sup> Maurice R. Greenberg and Richard N. Haas, editor, *Making Intelligence Smarter: The Future of U.S. Intelligence, Report of an Independent Task Force*, (New York: Council on Foreign Relations, 1996) hal. 13.

#### 1.7.4. Pendekatan

Berbeda dengan metode pengumpulan data, yang pada dasarnya merupakan cara untuk menghimpun/memperoleh data, pendekatan ini dimaksudkan sebagai sarana/upaya pemilihan data yang sesuai. Pemilihan fakta dan data mengenai permasalahan, digunakan pendekatan keamanan karena permasalahan yang dibahas terkait dengan bidang keamanan.

#### 1.7.5. Analisis

Analisis intelijen strategik bertujuan untuk memberikan masukan kepada user berupa *early warning*, *early detection*, *foresight* dan *problem solving*. Untuk melakukan analisis dengan tepat diperlukan data yang tepat, aktual dan faktual yang kemudian akan dianalisis.

### 1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab 1 : Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab 2 : Kebijakan Luar Negeri AS di Asia Pasifik.** Bab ini memuat kebijakan luar negeri AS di dunia, khususnya di Asia Pasifik, serta pendekatan maupun strategi apa saja yang telah dilakukan AS dalam upaya mewujudkan hegemoninya. Selain itu bab ini juga membahas mengenai implementasi *smart power* AS kepada Indonesia.

**Bab 3 : Perkembangan China sebagai Ancaman Hegemoni AS di Asia Pasifik.** Dalam bab ini membahas pengaruh China sebagai ancaman terbesar bagi hegemoni AS di Asia Pasifik, serta kerjasama yang telah dilakukan AS-China sebagai upaya perimbangan kekuatan dan penciptaan interdependensi.

**Bab 4 : Analisa Relevansi Pendekatan *Smart Power* AS kepada Indonesia terhadap Kepentingannya di Asia Pasifik.** Bab ini akan membahas mengenai hubungan AS-China, serta pendekatan *smart power* AS kepada Indonesia khususnya, Asia pada umumnya. Selain itu memuat prediksi (*forecasting*) mengenai ancaman dan dampak yang mungkin terjadi ke depan, termasuk perkembangan kekuatan politik dunia serta langkah yang harus diambil Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi kondisi terburuk yang dapat tercipta dari hal tersebut, dengan berpegang pada Kemampuan, Kerawanan, Kemungkinan Cara bertindak serta niat (K3N) dalam konsep intelijen stratejik.

**Bab 5 : Penutup.** Berisi kesimpulan dari pembahasan.

## BAB 2

### KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK

#### 2.1 PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Kebijakan luar negeri AS pada masa Perang Dingin lebih terfokus pada usaha untuk membendung komunisme di seluruh dunia. Di samping itu kebijakan luar negeri AS juga ditujukan untuk mengusahakan kemerdekaan bagi semua negara, membantu Eropa dan Jepang dalam membangun kembali perekonomiannya yang hancur akibat perang Dunia II, mempromosikan pembangunan ekonomi ke semua negara berkembang dan menyediakan tempat penampungan bagi imigran.<sup>38</sup> Tekanan yang dihadapi AS pada saat itu adalah berupa tekanan militer, politik, ekonomi dan ideologi. Hal ini berkaitan erat dengan posisinya sebagai negara *superpower* untuk mengimbangi Uni Soviet.

Sedangkan pada masa pasca Perang Dingin yang dimulai dengan runtuhnya Uni Soviet, sedikit banyak telah merubah fokus kebijakan luar negeri AS. Politik luar negeri AS mencakup keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah nasional AS tentang tindakan terhadap negara lain atau kelompok negara di dunia. Masing-masing presiden AS mempunyai tekanan yang berbeda terhadap pelaksanaan politik luar negeri AS. Namun demikian, tujuan-tujuan dasar dari politik luar negeri AS adalah konstan dari waktu ke waktu.

Politik luar negeri AS secara umum dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> United States Department of State, *Bureau of Public Affairs, Realism, Strength, Negotiation: Key Foreign Policy Statement of the Reagan Administration*, (Washington DC, May 1994) hal 87.

<sup>39</sup> Richard C. Remy, Larry Elowitz & William Berlin, *Government in The United States* (New York: MacMillan Publishing Company, 1984) hal 310.

1. *National Security* (Keamanan Nasional)
2. *World Peace* (Perdamaian Dunia)
3. *Self Government* (Pemerintahan Sendiri)
4. *Free and Open Trade* (Perdagangan Bebas dan Terbuka)
5. *Concern for Humanity* (Kepedulian terhadap Kemanusiaan).

Setelah peristiwa 11 September 2001, AS seolah melakukan legitimasi kekuasaannya dengan dalih '*war on terrorism*.' Istilah-istilah seperti *unilateralism* dan *pre-emptive strike*, yang pada dasarnya telah dikenal jauh sebelumnya, kini semakin mengemuka seiring dengan semakin luasnya 'peperangan melawan teroris' yang dijalankan oleh AS di seluruh dunia.

Dibandingkan era-era tahun sebelumnya (pasca Perang Dunia II), terjadi perubahan yang mendasar dalam pemerintahan AS, terutama kebijakan luar negeri. Di era 50-an hingga 90-an, komunis menjadi musuh utama AS. Sebagai akibatnya, AS harus bertempur di beberapa front: Perang Korea (1950-1953), Invansi Teluk Babi Kuba (1961), Krisis Rudal Soviet di Kuba (Oktober 1962), Perang Vietnam (1968-1975), dan Invasi Grenada (1983). Di samping itu, AS harus memberikan bantuan kepada di Afghanistan (1979-1997), Jenderal Pinochet yang mengkuadeta presiden Chili berhaluan kiri, Salvador Allende (1973), rezim Jenderal Jorge Rafael Videla yang bertahan dari upaya kudeta oposisi kiri Argentina dalam "*Dirty War*" (1976-1983), pemberontak *UNITA* dan *FNLA* melawan rezim Marxis Angola (pertengahan 70-an hingga akhir 2002), monarki Nepal melawan kaum Maoist (1994), gerilyawan Kontra di Nikaragua (1983-1988), dan rezim-rezim kawasan segitiga Amerika Latin: El Salvador, Guetemala, dan Honduras.<sup>40</sup>

Perubahan paradigma kebijakan luar negeri AS dimulai pada tahun 1992. Ketika itu, sekumpulan pejabat penting pada masa pemerintahan Bush senior dipelopori Dick Cheney dan Paul Wolfowitz mengeluarkan Draf

<sup>40</sup> Roger Cliff and Jeremy Shapiro, "The Shift to Asia: Implications for U.S. Land Power" dalam Lynn E. Dans and Jeremy Shapiro (ed) *The U.S. Army and The New National Security Strategy*, (RAND Aroyo Center, 2003) hal 86.

Pedoman dan Rencana Pertahanan (*Defence Planning Guidance Draft*) yang mengharuskan dominasi militer dalam kebijakan AS di masa depan. Dokumen itu, yang di kemudian hari dinamai “*Pentagon Paper*” menganjurkan *pre-emptive force* untuk melindungi AS dari senjata pemusnah massal (*WMD*) serta melakukannya sendiri jika perlu. “Strategi kita (pascajatuhnya Uni Sovyet) harus difokuskan pada pemusnahan segala potensi timbulnya kompetitor global di masa depan.”<sup>41</sup>

Strategi umum AS pasca perang dingin sangat berkaitan dengan pemerintahan Presiden Clinton, yang berkuasa selama dua periode ketika perang dingin usai. Runtuhnya emporium dan kekuatan Uni Soviet merupakan hasil dari ‘*containment strategy*’<sup>42</sup> yang merupakan strategi jangka panjang di masa perang dingin. Inti dari strategi AS tersebut adalah: menahan ekspansi komunisme dan Uni Soviet dengan kekuatan militer nuklir dan konvensional, memberi bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara sekutu AS yang turut membantu ekspansi Uni Soviet tersebut, serta mendorong meluasnya sistem pemerintahan yang demokratis.

Di masa pasca perang dingin, pemerintahan Bill Clinton beranggapan bahwa dalam keadaan global yang semakin terpadu dan semakin mandiri AS tidak akan berhasil dalam meningkatkan berbagai kepentingan di bidang politik, militer maupun ekonomi tanpa keterlibatan secara aktif AS dalam dunia internasional. Pemerintahan Clinton berpendapat bahwa kebijakan *isolationism* bukan merupakan alternatif mengingat tujuan pembaharuan dalam negeri AS akan ditentukan oleh keberhasilan AS dalam membuka pasar luar negeri, menyebarkan demokrasi di berbagai negara penting dan mengekang berbagai ancaman yang muncul.

Berkaitan dengan hal tersebut, para pejabat Gedung Putih merumuskan suatu doktrin kebijakan luar negeri AS untuk era pasca perang dingin dalam bentuk strategi keamanan nasional yang dikenal sebagai kebijakan

<sup>41</sup> Pernyataan Dick Cheney dalam *New York Times*, 8 Maret 1992

<sup>42</sup> *Containment* (pembendungan) strategi pada dasarnya adalah strategi yang dijalankan oleh AS dalam membendung ideologi komunis.

*engagement* dan *enlargement*.<sup>43</sup> Istilah *engagement* adalah sinonim untuk menyebutkan kiprah AS di dunia internasional secara aktif, sementara *enlargement* mengacu pada pentingnya tujuan dari perluasan dan penyebaran demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan pasar terbuka. Kebijakan tersebut dicanangkan pada Februari 1996 dan mencakup tiga tujuan utama,<sup>44</sup> yakni:

- a. meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomasi yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara lain.
- b. mengupayakan peningkatan kemakmuran domestik melalui pembukaan pasar asing dan perkembangan ekonomi global.
- c. meningkatkan demokrasi di luar negeri.

Dengan tiga tujuan utama tersebut sebenarnya AS ingin melindungi kepentingan vital secara global, yang secara umum dirumuskan dengan melindungi dan mempertahankan kehidupan serta kebebasan warga Amerika. Kepentingan AS yang lain adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kehidupan dalam negeri yang lebih baik dan kemakmuran warga AS.

Dinamika global yang juga cukup potensial mempengaruhi konstelasi politik 2010 tidak akan lepas dari tarik menarik kepentingan *major power* dalam menyikapi isu nuklir. AS dan sekutu baratnya akan terus menekan Iran dan Korea Utara agar bersedia membekukan program nuklir masing-masing, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dalam kaitan ini, pendekatan terhadap Iran lebih “keras” bila dibanding dengan Korut. Negara P5+1 (AS, Rusia, RRC, Perancis, Inggris dan Jerman) bahkan telah berhasil mendorong DK-PBB mengeluarkan resolusi ke-4 sebagai sanksi terhadap sikap Iran yang tetap bersikukuh melanjutkan program nuklirnya.<sup>45</sup> Di lain pihak, Iran tidak akan “menyerah” dan tetap melanjutkan pengembangan program nuklir

<sup>43</sup> David J. Myers, *Regional Hegemons, Threat Perception and Strategic Response*. (West View Press, 1991) hal 36

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> BBC, 20 mei 2010 diakses dari [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/05/100520\\_obamairan.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/05/100520_obamairan.shtml), pada 7 November 2010

untuk menjaga kebutuhan energi, sekaligus sebagai alat “perlawanan” terhadap barat. Iran bahkan bisa saja bersikap lebih keras jika langkah konstruktifnya (bersedia berdialog dan bekerjasama dengan *International Atomic Energy Agency/IAEA*) tidak diiringi dengan langkah positif negara-negara Barat yang juga terkesan melakukan politik “pembiaran” terhadap keberadaan program nuklir Israel, India dan Pakistan.<sup>46</sup> Stabilitas politik global tentunya akan semakin panas, mengingat Israel juga berkepentingan untuk mendesak AS melakukan tindakan militer untuk memastikan Iran tidak memperoleh atau mampu membuat senjata nuklir. Situasi ini tentunya mempengaruhi upaya penyelesaian beberapa *trouble spot* di kawasan Timur Tengah, apalagi pengaruh Iran di Palestina, Suriah maupun Lebanon cukup signifikan. Oleh karena itu, perubahan perimbangan geopolitik di Timur Tengah dapat terjadi, jika Iran bertekad memproduksi senjata nuklir untuk mengimbangi kekuatan Israel. Terbentuknya poros Turki-Rusia-Iran-Suriah<sup>47</sup> sebagai formasi politik baru di tengah panggung politik internasional juga tidak bisa diabaikan oleh AS dan Israel. Dengan demikian, potensi terjadinya perlombaan senjata di kawasan akan sangat terbuka, sehingga instabilitas berkepanjangan di Timur Tengah tidak terhindarkan.

Robert Jervis<sup>48</sup> menjelaskan empat doktrin utama Bush senior, yang diteruskan oleh putranya, George W. Bush. Pertama, apa yang menjadi keyakinan rezim lokal akan mewarnai kebijakan luar negeri lalu untuk selanjutnya akan mempengaruhi politik internasional. Oleh karena itu penting bagi AS untuk menopang, membantu, dan melindungi rezim-rezim lokal meskipun rezim itu tidak populer baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terlebih lagi bagi penguasa yang berkonflik dengan kelompok radikal Islam lokal. Rezim Husni Mubarak di Mesir dan rezim Perez Musharraf di Pakistan dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Juga Uzbekistan dan Arab Saudi. Di sisi

<sup>46</sup> Tempo, 2 Maret 2010, diakses dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2010/03/02/brk.20100302-229267.id.html>, pada 7 November 2010

<sup>47</sup> Bataviase, 9 Juni 2010, diakses dari <http://bataviase.co.id/node/244568>, pada 7 November 2010

<sup>48</sup> R. Jervis. *Understanding the Bush Doctrine*, dalam *Political Science Quarterly* Volume 118 Nomor 3, (2003)



lain, AS akan berusaha mengganti rezim yang melawannya dengan orang dalam yang sepaham dengan AS. Rezim Pinochet (Chili), Hamid Karzai (Afghanistan), Iyad Allawi dan Ibrahim al Jafaari serta Ahmed Chalabi (Irak), merupakan pemimpin-pemimpin lokal yang menjadi kepanjangan AS menggantikan rezim sebelumnya.<sup>49</sup>

Kedua, ancaman luar terhadap keamanan nasional AS hanya dapat ditangkal dengan melakukan serangan pendahuluan (*preemptive war*) terhadap ancaman itu. Menyerang sebelum diserang. AS memandang ancaman terbesar berasal dari jaringan teroris internasional. AS menyerbu Afghanistan karena Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden. AS menyakini Osama memiliki kemampuan untuk menyerang pusat-pusat kepentingan AS dan sekutunya di seluruh dunia. Salah satu alasan invasi AS ke Irak adalah karena Irak dianggap memiliki senjata pemusnah massal yang bisa mengancam AS dan sekutunya di Timur Tengah, meski kemudian terbukti Irak tidak memilikinya.

Ketiga, bertindak sendiri (*unilateral*) bila diperlukan. Invasi Afghanistan (2002) dan Irak (2003) merefleksikan keyakinan Bush itu. Unilateralisme AS juga bisa terlihat dari tindakan AS keluar dari keanggotaan Mahkamah Internasional, Perjanjian Non Proliferasi Nuklir, dan Protokol Kyoto.

Doktrin Bush yang terakhir adalah hegemoni AS terhadap dunia. Joshua S Goldstein<sup>50</sup> menyatakan jika hegemoni berarti kebiasaan untuk mendikte, mendominasi, mengatur, dan merancang konstelasi dan geopolitik internasional, maka AS bisa dikatakan telah menghegemoni. Dan untuk melanggengkan hegemoni itu, AS memerlukan militer yang kuat.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Joshua S. Goldstein. *Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age*. (New Haven: Yale University Press 1988) hal 78

AS bertindak layaknya sebuah pemerintah di mana negara-negara lain adalah warga negaranya (*world's government*). Sebagaimana yang diungkapkan G. John Ikenberry,<sup>51</sup> AS memiliki dua strategi besar untuk menempatkan posisinya sebagai *the world's government*. Strategi besar pertama adalah orientasi realis di mana AS berusaha sebisa mungkin melakukan pencegahan perluasan kekuatan politik dan militer musuh. Pencegahan ini dapat melalui penempatan pasukan AS di luar negeri atau dengan menciptakan aliansi militer di sebuah kawasan. Strategi besar kedua adalah dengan mendorong pasar bebas melalui lembaga internasional dan mempromosikan pasar bebas. Dengan strategi pertama, AS melakukan *military hegemony*; sedangkan melalui strategi besar kedua, AS melakukan *benign hegemony*.

Dengan kedua strategi besar ini, AS menjadi pemimpin dunia. Meski banyak negara tidak setuju dengan posisi hegemoni AS ini, tak satu pun negara yang berusaha mengubah perimbangan kekuasaan yang ada. Hal ini karena keadaan tempat AS sekarang memimpin dunia cenderung menguntungkan negara-negara lain yang ada dalam sistem internasional. Seperti yang dikatakan Mark Twain: "*weather that everybody talks about it but nobody does anything about it.*"<sup>52</sup>

Namun, bagi warga AS akhir-akhir ini, kedua strategi besar ini begitu mahal dan membuang sumber daya AS untuk memakmurkan warga negaranya. Penempatan pasukan di basis AS di luar negeri membutuhkan biaya yang tak sedikit, padahal tidak ada ancaman militer yang nyata setelah runtuhnya Uni Soviet. Pasar bebas telah membuat pasar domestik AS menjadi surga bagi produk-produk negara lain. Tak mengherankan jika neraca perdagangan AS selalu berada dalam kondisi defisit. Apalagi setelah memasuki abad ke-21, musuh utama AS bukan lagi berbentuk sebuah *nation-state*, melainkan *non-state actor* yang memiliki karakteristik jauh berbeda

<sup>51</sup> G. John Ikenberry (ed), *American Foreign Policy. Theoretical Essays*, Third Edition. (New York: Longman, 1999) hal 33.

<sup>52</sup> *Op cit*, Goldstein.

dengan karakteristik *nation-state*. Sehingga kedua strategi besar AS yang mahal ini pun, dianggap masyarakat AS tak berdampak banyak terhadap penangkalan terorisme. Data statistik menunjukkan bahwa AS mengeluarkan lebih dari USD 400 miliar untuk anggaran keamanan dan hanya menyalurkan USD 80 miliar untuk anggaran pendidikan.<sup>53</sup> Diperkirakan, hutang AS kepada negara lain dalam bentuk *bond* sama dengan 60 persen dari GNP AS. Dengan kata lain, setiap USD 100 yang dihasilkan warga AS, USD 60 harus dialokasikan untuk membayar hutang AS.

Kebijakan luar negeri AS saat ini terbentur dengan permasalahan domestik yang menyimpannya, sehingga AS pun berada dalam kondisi dilematis. Di satu sisi, menjadi hegemon adalah posisi bergengsi yang sangat menguras energi. Di sisi lain, AS juga harus memakmurkan warga negaranya.

## 2.2 PERUBAHAN PENDEKATAN DIPLOMASI AS, DARI *HARD POWER* MENJADI *SMART POWER*

*Smart power* merupakan kombinasi antara *hard power* dengan *soft power*. Ditinjau dari segi definisi, *hard power* cenderung memaksa negara lain memenuhi keinginan dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan. Sementara *soft power* membuat mitra tertarik untuk berbagi tujuan yang menjadi kepentingan kita melalui dialog dan pertukaran. Ditinjau dari segi sasaran *hard power* bertujuan untuk membunuh, menguasai atau mengalahkan musuh. Sedangkan *soft power* bertujuan untuk mempengaruhi melalui pemahaman dan identifikasi kesamaan.<sup>54</sup>

Tehnik yang digunakan dalam *hard power* sepenuhnya mengandalkan sanksi dan kekuatan senjata. Sedangkan dalam *soft power* berakar pada

<sup>53</sup> Daniel Bombey dan Jeremy Lemer, *Spiralling Defense Budget: US Military Responsibilities to Expand* diakses dari <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17325>, pada 7 November 2010

<sup>54</sup> <http://www.themarknews.com/articles/895-hard-power-vs-soft-power> diakses pada 25 Desember 2010.

pertukaran yang sangat berarti dan seni mempengaruhi. Sehingga nilai (*values*) yang dimiliki juga berbeda. *Hard power* cenderung *macho*, absolut dan mengutamakan kemenangan mutlak. Sementara *soft power* fleksibel, cerdas dan mengutamakan *win/win solution*. Dari segi etos, *hard power* mengakibatkan ketakutan, penderitaan dan kecurigaan, sedangkan *soft power* menyuburkan atmosfer keyakinan diri, kepercayaan dan penghormatan.<sup>55</sup>

Oleh karena itu, *smart power* diperoleh berdasarkan pada ide bahwa kombinasi dari "*hard power*" dan "*soft power*" akan membuat AS dapat membuat kerangka kerja yang tepat untuk menghadapi *unconventional threats* yang ada pada masa ini. Presiden Barack Obama berniat untuk membuat keseimbangan antara 3D yaitu: *defense*, *diplomacy* dan *development* dengan cara merekonstruksi diplomasi sipil dan kapasitas pengembangan. Kebangkitan *smart power* AS merepresentasikan pergeseran signifikan dalam strategi keamanan nasional AS, dan walaupun terlalu dini untuk menilai sampai seluas mana pemerintahan AS akan mengaplikasikan konsep ini, namun dorongan baru telah diciptakan untuk mengembangkan kerjasama keamanan.

Pergantian kepemimpinan AS, dari George W. Bush kepada Barack Obama menjadi titik tolak perubahan strategi pendekatan diplomasi AS kepada dunia, khususnya kepada Asia. Namun demikian, pada tataran politik dan keamanan, AS tetap berupaya mempertahankan hegemoninya di tingkat global.

Pemerintahan Barack Obama berkomitmen untuk merubah strategi "*hard power*" yang dijalankan AS pada masa Pemerintahan George W Bush menuju "*smart power*" dengan mengedepankan semangat multilateral dalam menyikapi setiap isu regional maupun global.<sup>56</sup> Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri Barack Obama yang berlandaskan *smart power* menggunakan

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Dalam briefing Joseph Nye, Jr. 'Smart Power Under Obama-What Can We Expect?', 17 Maret 2009.

beberapa penunjang (*tools*) antara lain: *pertama*, negosiasi, bujukan, penggunaan pengaruh. *Kedua*, kerjasama dengan militer sekutu AS dan departemen lain dalam pemerintahan. *Ketiga*, kerjasama dengan LSM, sektor swasta dan organisasi internasional. *Keempat*, penggunaan teknologi modern untuk meraih simpati publik. *Kelima*, pemberian wewenang kepada tim negosiasi yang akan melindungi kepentingan nasional AS, seraya berupaya memahami kepentingan pihak lain.

Langkah nyata yang Barack Obama ambil di awal pemerintahannya adalah dengan menutup penjara Guantanamo yang dianggap sebagai simbol pemerintahan George W Bush dalam memerangi terorisme. Namun demikian, hal ini tidak merubah fokus AS dalam membendung perlawanan dan pengaruh Al Qaeda di kawasan manapun.

Saat berpidato di Universitas Kairo, Mesir pada Juni 2009, Barack Obama menyampaikan langkah terobosan penting, berupa janji untuk merangkul dan memperbaiki hubungan AS dengan dunia Islam. Menindaklanjuti hal itu, pada akhir April 2010, Pemerintah AS mengundang 250 *entrepreneur* dari 50 negara berpenduduk mayoritas muslim, termasuk 9 orang dari Indonesia untuk menghadiri "*Presidential Summit on Entrepreneurship*" ke Washington.<sup>57</sup> Sementara itu, menyikapi konflik Israel-Palestina yang kental dengan sentimen agama, Barack Obama berkomitmen mengupayakan "solusi dua negara," dengan menjamin keamanan Israel dan memperkuat Otoritas Palestina. Di samping itu, Barack Obama juga berkomitmen menggalang masyarakat internasional untuk mengurangi produksi maupun penggunaan senjata nuklir dan tetap *concern* melakukan pembaharuan hubungan diplomatik melalui "*people to people*," LSM/NGO, kalangan bisnis, dan Perguruan Tinggi, karena ikatannya dinilai dapat berlangsung lama.

<sup>57</sup> Antasari 28 April 2010, diakses dari <http://antasari.net/obama-puji-entrepreneur-ri/>, pada 10 Juni 2010

Pada tataran ekonomi, sosial dan budaya, AS bersama mitra *G-20* menitikberatkan pada upaya berskala besar di negara-negara yang tergolong paling miskin dan rentan. Dalam kaitan ini, Pemerintahan Barack Obama memprioritaskan usaha pemberantasan kemiskinan global di bawah program PBB yang disebut Tujuan Pembangunan Milenium (*MDG'S*) pada tahun 2015.<sup>58</sup> Di sisi lain, AS juga tidak mengabaikan hubungan konstruktif dengan RRC, Rusia, dan India, karena dinilai sebagai faktor penentu di masa datang, sambil tetap menjaga hubungan tradisional dengan UE, Jepang dan Korsei. Di wilayah Amerika Latin, AS berupaya menjalin kemitraan baru dalam bidang energi, memberantas perdagangan narkoba, dan mengkonsolidasikan sejumlah pencapaian demokrasi. Di samping itu, AS tetap *concern* terhadap isu HAM, gender, memperkuat masyarakat sipil, memajukan pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memerangi korupsi. Mengingat sistem politik luar negeri AS yang sangat pragmatis, tekad Barack Obama untuk mewujudkan tatanan dunia yang lepas dari standar ganda, mengurangi senjata nuklir, serta memperbaiki hubungan dengan dunia Islam tidak akan mulus, karena konsentrasinya akan lebih berfokus pada isu domestik, apalagi Partai Demokrat gagal mempertahankan suara mayoritas di Kongres pada Pemilu November 2010.

Kehadiran Barack Obama di Indonesia mengagendakan penyempurnaan hasil kesepakatan sebelumnya, baik pertemuan bilateral sebelumnya maupun di sela-sela pertemuan multilateral, demikian juga beberapa putaran pertemuan tingkat tinggi dan yang terakhir pertemuan kedua menteri luar negeri antara Hillary Clinton dan Marty Natalegawa pada September 2010. Kedua menteri sepakat untuk melakukan rencana aksi kemitraan komprehensif meliputi kerjasama bidang politik dan keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai implementasi dari *smart power* AS. Komisi ini dibagi menjadi beberapa kelompok kerja yakni kelompok kerja bidang pendidikan,

<sup>58</sup> *MDGS, The Efforts to Achieve the MDGs in Indonesia* diakses dari [http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=25&Itemid=12](http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=12), pada 20 Oktober 2010

demokrasi, iklim dan lingkungan, perdagangan dan investasi, keamanan, dan energi. Kedua menteri juga tengah menjajaki kelompok kerja tambahan. Poin-poin tersebut yang akan menjadi dasar pertemuan.

Pendekatan *smart power* digunakan AS dalam bentuk kemitraan komprehensif, yang mengedepankan *diplomacy* dan *development*. Berikut beberapa aspek kerjasama dalam Kemitraan Komprehensif antara AS-Indonesia:

### 2.2.1 Kerjasama Perdagangan dan Investasi

Dalam bidang perdagangan dan investasi, Obama berkomitmen meningkatkan peran AS terhadap Indonesia. AS saat ini merupakan salah satu mitra dagang terpenting dengan nilai mencapai USD 21 miliar pada tahun 2008. AS juga merupakan investor terbesar ketiga untuk Indonesia.<sup>59</sup>

Kerjasama di bidang ini ditujukan untuk kemajuan reformasi ekonomi di Indonesia dan pemulihan ekonomi di AS sehingga mampu membentuk pondasi yang kuat dalam perdagangan dan investasi kedua belah pihak. Selain itu, AS juga menciptakan *Global Entrepreneurship Program* di Indonesia untuk memfasilitasi para pengusaha dan bisnis skala menengah hingga skala kecil.

### 2.2.2 Kerjasama Pendidikan

Dalam kerjasama pendidikan AS akan menginvestasikan USD 165 juta selama lima tahun, program tersebut meliputi pertukaran penting dalam pengalaman kepemimpinan dan manajemen, keahlian ilmiah dan teknis, serta pemahaman budaya.<sup>60</sup> Secara terperinci kerjasama tersebut berisi program Pengembangan program *Fulbright*, *Community College Initiative*, layanan konsultasi mahasiswa dan pertukaran lainnya yang

<sup>59</sup> Kompasiana, 11 November 2010, diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2010/11/11/manfaat-mudiknya-bang-obama-ke-jakarta-bagi-indonesia/> pada 30 November 2010.

<sup>60</sup> Okezone, 28 Juni 2010, diakses dari <http://news.okezone.com/read/2010/06/28/373/347404/as-dukung-pendidikan-tinggi-ri-usd165-jt> pada 30 November 2010.

disponsori oleh Departemen Luar Negeri AS. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan tinggi di Indonesia melalui program Kemitraan Perguruan Tinggi yang akan mendukung kerjasama lembaga-lembaga pendidikan tinggi Indonesia dan Amerika Serikat.

Kedua pihak juga telah menyepakati kerjasama melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Indonesia concerning the Establishment of the American-Indonesian Exchange Foundation (AMINEF)* pada 16 Februari 2009. Pemerintah AS telah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pelajar Indonesia ke AS, yang saat ini berjumlah sekitar 7.000 orang menjadi 14.500 orang dalam lima tahun pertama masa pemerintahan Presiden Obama. Pemerintah AS juga berkomitmen untuk memberikan bantuan pendidikan kepada Indonesia sebesar USD 10 juta yang ditujukan untuk lembaga-lembaga pendidikan umum dan pesantren-pesantren. Kepentingan AS terhadap pertukaran pelajar cukup jelas, karena AS ingin menciptakan tokoh-tokoh intelektual yang akan melegitimasi seluruh kebijakannya di negeri ini, ini merupakan bagian dari tujuan *soft power* AS yang telah berlangsung sejak lama, dan kini semakin dipertegas dalam pendekatan *smart power*.

Dari bentuk-bentuk kerjasama yang akan di tandatangani, AS tampak berupaya untuk memastikan agar haluan sistem pendidikan Indonesia berada dalam garis yang diinginkan. Setelah AS melalui lembaga yang multilateral yang di pimpinnya seperti WTO dan *World Bank* yang telah berhasil membuat seluruh anggotanya menjalankan program privatisasi pendidikan, kerjasama bilateral juga digunakan untuk mempercepat serta memastikan seluruh skema sektor ini agar relevan dengan kepentingan nasionalnya, sehingga tetap di bawah dominasi AS.



### 2.2.3 Kerjasama Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Presiden Obama berkomitmen untuk mengucurkan bantuan senilai 136 juta dollar AS untuk tiga tahun dalam bentuk program-program yang mendukung kerjasama Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, seperti: Kemitraan *SOLUSI* senilai USD 119 juta yang mencakup bidang kerjasama lingkungan hidup dan perubahan iklim seperti Ilmu Pengetahuan, Kelautan, Penggunaan Lahan dan Inovasi. Program-program yang termaktub dalam *SOLUSI* adalah perjanjian *Tropical Forest Conservation Act* ke-dua, *Forestry and Climate Support Project (IFACS)*, *Marine and Climate Support Program (IMACS)*, *Clean Energy Development (ICED)*, dan lain-lain.

Kerjasama RI-AS di bidang program konservasi kehutanan dilaksanakan melalui kerangka *Debt for Nature Swap-Tropical Forest Conservation Act (DNS-TFCA)*. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah AS mengalokasikan pembayaran hutang Pemerintah RI senilai USD 19,6 juta melalui pelaksanaan program konservasi kehutanan di Kepulauan Sumatera selama sekitar delapan tahun. Pelaksanaan program melibatkan dua *LSM Swap Partner*, yaitu *Conservation International (CI)* Indonesia dan Yayasan KEHATI, yang turut menambahkan dana sejumlah USD 2 juta.

AS juga memberikan dukungan Indonesia dalam mendirikan Pusat Perubahan Iklim di tingkat nasional, regional, dengan kebijakan prioritas strategis tahap awal pada emisi lahan gambut. AS mengumumkan bantuan senilai USD 7 juta untuk lembaga ini dan USD 10 juta untuk proyek-proyek maupun kemitraan-kemitraan yang berkaitan termasuk kemitraan publik-swasta yang fokus berhubungan dengan perubahan iklim. Namun demikian AS memberikan beberapa persyaratan yakni Indonesia memiliki kewajiban memelihara hutan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memiliki target untuk mengurangi 26% emisi gas sebelum 2020.

#### 2.2.4 Kerjasama Pertanian (Ketahanan Pangan)

Direktur Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Indra Darmawan menuturkan investasi AS selama 2000-2009 senilai USD 10,96 juta. investasi ini dilakukan pada tanaman pangan dan perkebunan. Nilai tersebut merupakan bagian dari total investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Indonesia sebesar USD 2,61 miliar, untuk 302 proyek.<sup>61</sup> Komoditas yang dikerjasamakan antara lain kakao, kopi, minyak kelapa sawit (*CPO*) dan produk turunannya. pada bidang investasi, Pemerintah Indonesia mengundang investor AS untuk meningkatkan investasi di sektor pertanian. Investor AS tersebut akan didorong untuk berinvestasi pada lahan tanaman pangan seperti di *food estate* Merauke, Papua.

Kerjasama komprehensif tersebut digunakan untuk meningkatkan penjualan berbagai komoditas pertanian yang melambung di pasar dunia, yang bertujuan untuk peningkatan ekspor, sehingga akan meningkatkan devisa.

#### 2.2.5 Kerjasama Energi

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi langsung perusahaan AS di Indonesia pada kuartal I/2010 mencapai USD 436,9 juta.<sup>62</sup> Nilai tersebut merupakan 11,6% dari total keseluruhan penanaman modal asing pada rentang waktu tersebut. Jumlah itu menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2009 nilai investasi penanaman modal langsung AS sebesar USD 171,5 juta dan 2008 sebesar USD 151,3 juta.<sup>63</sup> Kepentingan AS atas sumber energi Indonesia sangat besar, kedatangan Barack Obama di Indonesia adalah bagian dari usaha untuk menjaga dan meningkatkan suplai energi ke AS.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

AS menjalin kerjasama bilateral dalam bidang energi melalui *Energy Policy Dialogue (EDP)* yang membahas mengenai keamanan energi kedua belah pihak, perdagangan dan investasi di bidang energi dan inovasi teknologi energi yang efisien dan ramah lingkungan. Pada pertemuan 28-30 Juni 2010, pemerintah AS dan RI sepakat untuk memperluas kerjasama dalam iklim investasi di bidang ini, pembangunan kapasitas dan infrastruktur serta partisipasi dalam memasarkan gas metana serta dalam memberi dukungan pemerintah maupun swasta dalam investasi dan kerjasama pada sektor energi.<sup>64</sup>

### 2.2.6 Kerjasama Keamanan

Masalah keamanan dan militer adalah isu paling vital dalam kerja sama kemitraan komprehensif. Tujuan dari kerja sama ini adalah membangun skema politik-militer untuk mempertahankan stabilisasi keamanan kawasan Asia Pasifik. Peningkatan kerja sama keamanan dan militer ini menyangkut pendidikan militer bagi perwira dan sipil, meningkatkan penjualan peralatan perang modern, dan secara umum menyiapkan dan menjalani skema *COIN (counter insurgency)* sebagai strategi terkini AS untuk menghambat dan menghancurkan secara sistematis pemberontakan bersenjata, khususnya gerakan revolusioner dan terorisme.

Sejak revolusi nasional anti kolonialisme, pemerintah AS terlibat langsung dalam usaha-usaha untuk menghancurkan seluruh potensi dan manifestasi dari gerakan rakyat anti imperialisme hingga sekarang. Agenda terkini yang dijalankan oleh pemerintah AS dan pemerintah Indonesia adalah mendidik, membiayai dan asistensi seluruh agenda perang melawan “terorisme” di Indonesia, khususnya menyangkut operasi dari Densus 88. AS memberikan bantuan *Anti Terrorism Assistance (ATA)* antara lain melalui pelatihan dan pemberian perlengkapan kepada Densus

<sup>64</sup> US-Indonesia Joint Commission and Bilateral Meeting. 17 September 2010. [www.whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov). Diakses pada 28 Desember 2010.

88 Anti Teror serta pelatihan dan pembentukan *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*. Selain itu dilakukan juga *information sharing dan capacity and institutional building*. AS juga telah menawarkan bantuan di bidang *counter terrorism* dalam mengusut peristiwa pengeboman di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 17 Juli 2009.

Dalam konteks mengatasi ancaman kelompok teroris internasional, Barack Obama menyadari bahwa ancaman teror terhadap AS harus diselesaikan dengan pendekatan baru. Obama melakukan tekanan lebih serius terhadap kelompok-kelompok teroris di Afganistan sekaligus menetralkan pengaruh terorisme di negara-negara muslim. Obama memfokuskan kekuatan militernya di wilayah pegunungan Afganistan, berupaya menghancurkan Al-Qaeda, sementara pada saat yang bersamaan, melakukan diplomasi yang khususnya ditujukan kepada negara-negara muslim. Salah satu caranya yakni dengan pencitraan AS sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi beragama melalui penyiaran *Voice of America (VOA)*.

### 2.3 DINAMIKA HUBUNGAN AS DENGAN NEGARA-NEGARA DI ASIA PASIFIK

AS memiliki kepentingan yang cukup besar di kawasan Asia Pasifik karena itu pemerintah AS memiliki berbagai kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan sehubungan dengan berbagai krisis keamanan yang terjadi dalam kurun waktu 1993-1998. Berbagai peristiwa tersebut antara lain, ketegangan antara RRC-Taiwan, program nuklir Korea Utara dan ujicoba peluncuran rudal Taepo Dong 1 dan 2 Korea Utara, yang melintasi wilayah udara Jepang.

Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan ketertiban keamanan kawasan Asia Pasifik, Barack Obama tetap meneruskan kebijakan presiden AS sebelumnya, terutama dalam hal menyokong sekutu, sebagai salah satu implementasi dari *smart power*, yakni strategi keamanan berdasarkan

kebijakan *engagement dan enlargement* yang dikemukakan Bill Clinton sejak 1995. Kebijakan tersebut terdiri atas tiga bagian kebijakan utama, yakni:

1. memperkuat persatuan kawasan (terutama dengan sekutu) dalam rangka mengidentifikasi berbagai basis baru dalam era pasca perang dingin.
2. mempertahankan kehadiran kekuatan militer AS.
3. membangun institusi regional.<sup>65</sup>

Di samping itu, pemerintahan Clinton juga berusaha membangun berbagai dialog keamanan bilateral dengan berbagai negara kawasan termasuk RRC, Rusia dan berbagai negara di Asia Tenggara. AS menerapkan strategi *engagement dan enlargement* sebagai strategi global, sedangkan strategi keamanan AS di Asia Pasifik cenderung menggunakan keamanan berupa *engagement strategy* secara kooperatif dengan sekutunya, yaitu strategi militer AS yang memberdayakan kekuatan, aset, dana dan program dalam tiga bentuk utama: mempertahankan kehadiran pasukan AS di Asia Timur, memperkuat aliansi dengan sekutunya, dan merespon berbagai krisis yang timbul.<sup>66</sup>

Ada beberapa jenis bantuan yang diberikan AS kepada sekutu-sekutunya. Pertama, *Foreign Military Financing (FMF)*. *FMF* merupakan kesediaan AS menjual produk senjatanya (termasuk servis dan training) kepada negara asing. *FMF* meningkat signifikan dari 2001 sampai 2005; dari 3,5 miliar dolar hingga 4,6 miliar dolar. Proses *FMF* berlangsung *G to G (government to government)* antara Pentagon dan negara yang bersangkutan.

Kedua, *Economic Support Fund (ESF)*. *ESF* didesain sebagai program asistensi AS kepada sekutunya dengan tujuan mengurangi akar-akar penyebab terorisme. Ketiga, *International Military Education and Training (IMET)* yang bertujuan melatih tentara-tentara asing dengan pejabat militer dan senjata AS. Dalam 2004, AS telah mengeluarkan 9 miliar dolar untuk melatih 11 ribu serdadu dari seratus negara. Keempat, *Excess Defense Articles (EDA)*. Dengan

<sup>65</sup> Cato Handbook for Congress, *East Asian Defense Commitments*, 2002, hal 551.

<sup>66</sup> *Ibid*.

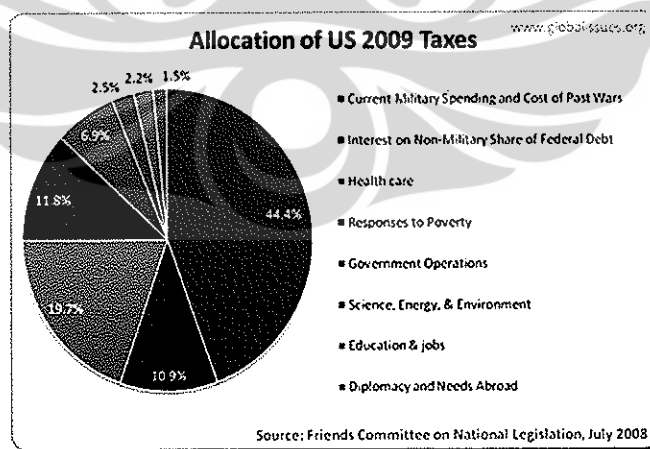
EDA, AS dapat mentransfer senjata secara gratis atau dengan diskon besar. Kelima, *Emergency Drawdown* yang memungkinkan AS memberikan bantuan senjata secara cepat dan lunak dalam keadaan kritis.

Garis besar dari strategi keamanan AS di Asia Timur dan Pasifik tertuang dalam *East Asia Strategic Initiative (EASI)* yang disampaikan oleh badan *International Security Affairs (ISA)*, di dalamnya menjelaskan berbagai hal yang menjadi kepentingan AS terhadap kawasan Asia Timur dan Pasifik, antara lain: melindungi AS dari berbagai bentuk serangan, mendukung kebijakan *global deterrence*, melindungi akses politik dan ekonomi AS di kawasan, mempertahankan *balance of power* untuk mencegah munculnya hegemoni di kawasan, memperkuat orientasi barat terhadap negara-negara Asia, mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan Hak Asasi Manusia, mencegah Proliferasi Nuklir. Disebutkan pula bahwa strategi keamanan AS di Asia Pasifik merupakan refleksi dan dukungan terhadap strategi keamanan global AS.<sup>67</sup>

Gambar di bawah ini memperlihatkan besarnya persentasi AS pada bidang militer dibandingkan bidang-bidang lainnya:

Gambar 2.1 Alokasi Anggaran AS 2009

Sumber : [www.globalissues.org](http://www.globalissues.org)



<sup>67</sup> Dalam EAS report ke 4 tahun 1998

Oleh karena itu, Obama saat berkunjung ke Singapura untuk menghadiri KTT *APEC* mengenalkan dirinya sebagai presiden pertama AS yang mempunyai akar Asia Pasifik.<sup>68</sup> Pidato Obama saat itu mencerminkan bahwa perhatian politik dan keamanan AS beralih ke Samudera Pasifik dari Samudera Atlantik, yang hal ini bertolak belakang dengan kebijakan Washington dalam beberapa dekade terakhir. Indeks ekonomi menunjukkan bahwa Asia Timur menjadi kawasan yang paling berkembang di dunia, bahkan sejumlah kekuatan besar ekonomi ada di kawasan ini.<sup>69</sup> Lebih dari itu, diprediksikan bahwa pusat perkembangan ekonomi dunia akan beralih dari Eropa yang menginjak usia manula, ke kawasan Asia yang muda dan terus berkembang.

AS yang merupakan kekuatan berpengaruh di Pasifik, dihadapkan pada kendala serius di kawasan. 60 tahun lalu, Samudera Pasifik menjadi ajang uji coba AS yang berujung pada pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Kini, persaingan antarnegara di kawasan Asia Pasifik kian kuat. Dari satu sisi, AS hingga kini berpikir aspek keamanan di kawasan, sedangkan dari sisi lain, kekuatan-kekuatan besar seperti Cina, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara *ASEAN* tengah menggali potensi dirinya untuk berperan lebih besar di sistem internasional. Dua sisi setara ini membuat Washington menghadapi kendala dengan Jepang, China dan bahkan dengan Korea Selatan. Pada saat yang sama, masalah nuklir Korea Utara juga menjadi kendala utama bagi AS. Sebab, keberhasilan Korea Utara dalam menguasai teknologi nuklir militer mau tidak mau membatasi manuver kekuatan AS di Asia Timur.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, pada Januari 2010, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyatakan prinsip-prinsip yang akan meredefinisikan kepemimpinan AS di Asia Pasifik dan pendekatan AS dalam hal kerja sama multilateral bahwa:

<sup>68</sup> *Dibalik Kebijakan Obama di Asia Timur*, diakses dari [http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&view=article&id=16765:di-balik-kebijakan-obama-di-asia-timur&catid=15:lintas-warta&Itemid=58](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=16765:di-balik-kebijakan-obama-di-asia-timur&catid=15:lintas-warta&Itemid=58), pada 10 November 2010.

<sup>69</sup> *Ibid.*

- a. hubungan aliansi dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Thailand, dan Filipina menjadi tonggak keterlibatan AS di kawasan Asia Pasifik.
- b. Institusi kawasan dan upaya yang dilakukan harus bekerja untuk memajukan tujuan-tujuan AS yang tegas dan dikehendaki di kawasan tersebut.
- c. Institusi-institusi tersebut harus efektif dan terfokus untuk mencapai tujuan.
- d. AS harus senantiasa menjaga fleksibilitasnya dalam mengejar tujuan-tujuannya.
- e. AS haruslah memastikan institusi mana yang akan menjadi yang terpenting dalam melindungi dan mempromosikan tujuan negara-negara kawasan secara kolektif.<sup>70</sup>

Selain itu, dalam pidatonya pada 28 Oktober 2010 di Hawaii, Hillary Clinton menegaskan kembali langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Obama untuk memperkokoh keterlibatan AS di Asia, antara lain: mengintensifkan hubungan dengan sekutu-sekutu AS (Jepang, Korea Selatan, Australia, Thailand, dan Filipina) dan membangun kemitraan baru, serta upaya kebijakan AS bekerja sama dengan institusi kawasan.<sup>71</sup>

Perangkat-perangkat tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan diplomasi dalam tiga tujuan utama: pertama, membentuk masa depan perekonomian kawasan Asia Pasifik; kedua mendukung keamanan kawasan (*underwriting regional security*); dan ketiga, memperkokoh institusi demokratis dan meningkatnya dukungan akan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sehingga kontrol terhadap kawasan menjadi lebih mudah.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Suzie Sudarman. *Ekspektasi Peningkatan Hubungan RI-AS Pasca Kunjungan Obama*. (Media Indonesia: November 2010)

<sup>71</sup> Pidato Hillary Clinton di Hawaii, 3 November 2010, dalam rangkaian kunjungan ke negara-negara di Asia Pasifik.

<sup>72</sup> Suzie Sudarman, *op.cit.*



### 2.3.1 Postur Pasukan AS di Asia Pasifik

Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dibagi menjadi dua komando militer, yaitu *the US Pacific Command* dan *US Central Command* di mana dua dari sembilan Komando Kombatan dan dari lima Komando Wilayah. Asia Pasifik berada dibawah Komando Pasifik, bagian dari Selatan dan Asia Tengah adalah bagian dari Komando Sentral.

#### a. *Pacific Command*

*The United States Pacific Command (US PACOM)* berpangkalan di Hawaii mempunyai area tanggung jawab meliputi sekitar 50% permukaan bumi dan kira-kira 60% dari penduduknya, termasuk dua negara yang banyak penduduknya yaitu Indonesia .

*US PACOM* membawahi 43 negara dengan lima negara sekutu. *US PACOM* meliputi area tanggung jawab dari Alaska ke Madagaskar dan dari India ke Pasifik Selatan. *U.S. Pacific Command* memasukkan *U.S. Forces Japan*, *U.S. Forces Korea*, *Special Operations Command Pacific*, dan *Alaska Command*. Secara operasional, Panglima Pasifik melapor secara langsung kepada Menteri Pertahanan dan Presiden.

#### b. *Central Command*

*The US Central Command (CENTCOM)* adalah Kesatuan Komando tempur dengan bidang tanggung jawab yang memasukkan Timur Tengah dan bagian-bagian Afrika Timur dimana kekuatan militer menyebar keseluruh wilayah. Konsentrasi terbesar terdapat di Jepang, Korea dan Afghanistan. Demi untuk meningkatkan keluwesan angkatan perang AS di Asia dan peningkatan efektivitas gerakan pasukan, maka pasukan AS disembarkan sampai zona konflik, sebagian militer AS disembarkan di Jepang dan Korea Selatan serta diperluas di Guam, Alaska, Hawaii, dan Pantai Barat Amerika Serikat.

Dasar rasional bagi bagi pengiriman pasukan AS di luar negeri adalah sistem San Fransisco yang ditata setelah AS memenangkan PD II dan membentuk Persekutuan bilateral Pasifik, Sistem dikembangkan tahun 1950 sewaktu Amerika Serikat berusaha membendung komunisme dengan aliansinya yaitu Jepang, Australia, Korea Selatan, Thailand dan Philipina. Aliansi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kerjasama Pertahanan AS dengan Jepang

Perjanjian Kerjasama Pertahanan antara AS dengan Jepang ditandatangani di Washington, DC pada 19 Januari 1960. Perjanjian pengikatan Jepang kepada pihak Barat selama perang dingin. Perjanjian juga meliputi kerjasama dalam bidang ekonomi.

Perjanjian Keamanan sebelumnya ditandatangani tahun 1951 sebagai dasar bagi perjanjian keamanan Jepang-AS. Ditandatangani setelah Jepang mendapatkan kedaulatan penuh setelah perjanjian okupasi. Pembicaraan bilateral untuk merevisi pakta keamanan 1951, dimulai pada tahun 1959, dari *The New Treaty of Mutual Cooperation and Security* yang ditandatangani di Washington 19 Januari 1960.

Di bawah perjanjian, kedua pihak diwajibkan untuk memelihara dan mengembangkan kapasitas untuk menolak serangan musuh dan saling membantu apabila terjadi serangan di wilayah teritorial Jepang. Hal tersebut dapat dipahami, bahwa Jepang tidak dibolehkan membantu militer AS sebab konstitusinya melarang pengiriman tentara ke luar negeri. Selain itu, perjanjian tersebut menandakan bahwa Jepang dilarang mengembangkan kekuatan darat, laut dan udara.

Pada April 1996 dalam kesempatan kunjungan Presiden Clinton ke Jepang, telah dicapai kesepakatan antara kedua pemerintah AS dan Jepang (PM Hashimoto) yang dituangkan dalam suatu Deklarasi Bersama atau "*US-Japan Joint Declaration on Security*," yang intinya adalah untuk meninjau kembali atas garis-garis besar (*guidelines*) dari *US-Japan Security Agreement*

tahun 1987, karena hal ini dipandang perlu disesuaikan lagi dengan tuntutan dan perubahan politik Pasca Perang Dingin. Kedua kepala pemerintahan sepakat bahwa *US-Japan Security Relationship* tetap dipandang sebagai pijakan untuk mencapai dan terpeliharanya perdamaian dan kemakmuran di Asia Pasifik dalam memasuki abad ke-21. Disepakati pula bahwa meskipun perang dingin telah usai, potensi ke arah *instability* dan *uncertainty* di Asia Pasifik masih besar, karenanya upaya mempertahankan perdamaian dan keamanan di kawasan ini menjadi sangat penting bagi keamanan Jepang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian dilakukan *review* atas *guidelines* tahun 1978 oleh *US-JAPAN Security Consultative (SCC)*. Pada 23 September 1997 di New York oleh kedua Menlu AS dan Jepang telah diumumkan hasil-hasil *review* yang dilakukan, yang dituangkan dalam sebuah *Joint Statement of US-Japan Security Consultative Committee, Completion of the Review of the Guidelines for US-Japan Defence Cooperation*.

Berdasarkan *guidelines* baru tersebut maka kerjasama keamanan AS-Jepang akan mencakup 3 aspek kerjasama yaitu :

- a. Kerjasama keamanan dalam situasi normal.
- b. Tindakan-tindakan yang harus diambil jika terjadi suatu serangan militer terhadap Jepang, dan
- c. Kerjasama keamanan dalam hal terjadi suatu perkembangan situasi di sekitar Jepang yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas Jepang (*Situations in areas surrounding Japan*).

Meskipun *guidelines* baru ini telah diperluas dari *guidelines* tahun 1978, namun tetap dipegang dan dipertahankan beberapa prinsip dasar yang sudah ada yaitu:<sup>73</sup>

- a. Bahwa hak-hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam *US-Japan Security Treaty*, tidak mengalami perubahan.

<sup>73</sup> Dalam *US-Japan Joint Declaration on Security 1996* diakses melalui <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html> pada 27 November 2010.

- b. Setiap tindakan Jepang harus tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi Jepang, dan kebijakan pertahanan Jepang yang berpegang teguh pada 3 prinsip non-nuklir Jepang.
- c. Setiap tindakan yang dilakukan Jepang dan AS harus konsisten dan tidak bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB.
- d. *Guidelines* dan program-program yang tercantum dalam *guidelines* ini oleh masing-masing pemerintah tidak perlu harus diikat melalui suatu perundangundangan atau administrasi dan anggaran biaya yang khusus, namun akan dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku pada masing-masing negara.

Secara umum, kerjasama keamanan antara AS-Jepang tersebut antara lain mencakup hal berikut ini:<sup>74</sup>

(1). *Cooperative Under Normal Circumstances*

Kedua negara akan berpegang teguh pada *US-Japan Security Treaty* yang telah ada, di mana masing-masing negara akan tetap berpegang pada postur pertahanan yang dirasakan sesuai dengan masing-masing pihak. Dalam rangka mempertahankan komitmennya, AS akan tetap mempertahankan kemampuan tangkal nuklirnya, penempatan pasukannya di Asia Pasifik dan saran-saran lain yang diperlukan untuk menunjang pasukan-pasukan di atas. Kedua negara akan melakukan kerjasama termasuk pertukaran informasi dan konsultasi politik.

(2). *Actions in Response to an Armed Attack Against Japan*

Dibedakan antara 2 hal yaitu pada saat terancam dan pada saat serangan terjadi. Pada situasi pertama, kedua pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan Jepang. Pada situasi kedua, kedua pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan

<sup>74</sup> *ibid.*

bersama yang diperlukan untuk mematahkannya pada tingkat sedini mungkin. Dalam situasi di atas, Jepang jika diperlukan akan menyediakan tambahan-tambahan fasilitas sesuai dengan perjanjian keamanan yang ada. Jika perlu, Angkatan Bersenjata AS dan *Self Defence Force (SDF)* Jepang akan menggunakan semua fasilitas yang tersedia yang dimiliki oleh kedua Angkatan Bersenjata.

*(3). Cooperation in situations in areas surrounding Japan.*

Dibedakan antara 2 hal yaitu pada saat situasi di sekitar Jepang sedang dalam antisipasi, dan respons terhadap situasi yang terjadi atau berkembang. Pada situasi pertama, kedua pemerintah akan mengintensifkan pertukaran informasi dan intelijen dan konsultasi politik termasuk untuk mencari kesamaan *assessment* terhadap situasi. Pada saat yang bersamaan upaya-upaya diplomatik juga dilakukan untuk mencegah situasi berkembang memburuk. Jika situasi semakin memburuk, upaya-upaya pengumpulan intelijen dan surveilen akan lebih ditingkatkan termasuk kesiapan untuk memberikan respons. Dalam situasi di atas, Jepang akan memberikan tambahan-tambahan fasilitas termasuk "*rear area support*" kepada pasukan AS yang diperlukan untuk kelancaran operasi-operasi militer.

Termasuk dalam hal ini adalah pangkalan-pangkalan udara Jepang maupun bandara dan pelabuhan-pelabuhan sipil di Jepang. fasilitas-fasilitas swasta. Mengenai pengertian "*rear area support*" dijelaskan bahwa dalam rangka menunjang operasi-operasi yang dilancarkan AS, Jepang akan memberikan fasilitas-fasilitas yang dimiliki Jepang baik yang berada atau terletak di wilayah teritorial Jepang, maupun di laut lepas dan wilayah udara sekitar Jepang, yang dilihat dari area di mana operasi-operasi kombatan sedang dilakukan.

*Guidelines* 1997 ini merupakan revisi terhadap *Guidelines* 1978 yang merupakan penjabaran dari *AS-Jepang Security Treaty* yang ditandatangani

tahun 1951. Dibanding *Guidelines* 1978, yang baru adalah yang menyangkut klausul ketiga yaitu “*Cooperation in situations in areas surrounding Japan.*”<sup>75</sup> Klausul ini sangat dicurigai China sebagai upaya AS dan Jepang untuk ikut campur dalam masalah Taiwan. Dan secara keseluruhan China menganggap kesepakatan baru AS-Jepang sebagai upaya “*containment*” terhadap China.

Terlepas dari motivasi maupun reaksi atas klausul baru di atas, pembaharuan kerjasama keamanan AS-Jepang ini merupakan langkah strategis baik bagi AS maupun Jepang dalam mengantisipasi perkembangan kawasan setelah berakhirnya perang dingin dan terjadinya perubahan peta politik yang signifikan di kawasan ini. AS dalam rangka mempertahankan komitmen dan kepentingannya di Asia Pasifik memerlukan tetap terpeliharanya kerjasama dengan Jepang. Sebaliknya juga Jepang memerlukan AS selama upaya untuk mengembangkan angkatan bersenjata tetap harus dibatasi Konstitusi. Dipertahankannya komitmen AS di Asia Pasifik sedikit banyak dapat menekan ambisi-ambisi hegemoni China dan dilain pihak juga mampu menekan Jepang untuk tidak mengembangkan kekuatan militernya.

#### b. Kerjasama Pertahanan AS-Korea Selatan

Kerjasama Pertahanan AS dengan Korea Selatan dimulai sejak tahun 1953. Melalui *Mutual Security Agreement* tersebut disepakati kerjasama untuk saling membela satu sama lain bila terjadi serangan dari luar (agresi). Berdasarkan Perjanjian tersebut AS mempunyai hak mendirikan pangkalan militer, dan hingga sekarang ini jumlah personel militer AS di Korea Selatan adalah 25.000 orang. Berdasarkan perjanjian tersebut Korea Selatan ikut membantu menyumbang tentaranya untuk bergabung dalam perang Vietnam dan Irak.

Namun demikian terdapat beberapa perbedaan dalam memandang isu-isu regional dewasa ini antara Pemerintah AS dan Korea Selatan, terutama dalam menangani masalah Korea Utara. Dalam menyikapi Isu Korea Utara.

<sup>75</sup> Dalam *The Guidelines for Japan-US Defense Cooperation*. Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/guideline2.html> pada 27 November 2010.

AS dan Korea Selatan berusaha untuk mengembangkan “*strategic flexibility*,” dengan menempatkan kembali dan mengubah struktur angkatan perangnya di Korea Selatan. Konsep ini memerlukan adanya sejumlah besar kesatuan-kesatuan aktif yang bisa disebarkan sampai situasi darurat kemanapun terjadi. Kebijakan ini kelihatannya bertentangan dengan posisi Korea Selatan bahwa mereka mempunyai hak veto penggelaran pasukan ke negara ketiga.

### c. Kerjasama Pertahanan AS-Taiwan

Sejak akhir perang Korea, AS terus merasa berkepentingan akan masa depan Taiwan yang damai. Untuk tujuan itu, AS telah memberikan sejumlah besar bantuan ekonomi di tahun 60-an dan 70-an dan membentuk aliansi militer di tahun 1955 serta mensuplai Taiwan dengan sejumlah besar peralatan militer.

Periode di antara 1979 sampai dengan 1983-1984 memperlihatkan bahwa walaupun AS terus punya hubungan keamanan dengan Taiwan, hubungan dengan China tetap berlangsung mulus. Masalah Taiwan saat itu memang dikesampingkan oleh China mengingat hubungan ekonomi yang ekstensif dengan AS dan negara-negara Barat lebih mendesak untuk dilakukan demi terwujudnya kepentingan modernisasi ekonomi yang dijalankannya.

Sesudah periode tersebut di atas, masalah Taiwan kembali muncul di permukaan. Pada pertengahan 1980-an memang arti strategis China untuk AS sudah berkurang. Kebijakan AS pada masa pemerintahan pertama Reagan yang bersikap lebih suportif kepada Taiwan, memancing kemarahan China. Begitu juga periode akhir kepemimpinan Presiden Bush dengan penjualan 150 pesawat F-16.

Pada masa Clinton, pada awalnya Clinton sangat suportif terhadap Taiwan. Namun terjadi pergeseran pandangan dalam melihat peran China.

Dengan kebijakan “*comprehensive engagement*” Clinton tidak ingin mengisolasi China, tetapi mengikutsertakan China dalam setiap isu global. Sayangnya, dalam pelaksanaannya kebijakan ini tidak koheren dan tidak terintegrasi dalam satu paket yang menyeluruh.

Yang terjadi kemudian lebih berkenaan dengan ketidakjelasan dan friksi dalam bermacam-macam persoalan yang menyangkut hubungan AS-China seperti perdagangan, HAM, *piracy*, penjualan senjata, Taiwan dan sebagainya. Hal-hal tersebut menimbulkan kritik yang tajam dari anggota kongres yang saat ini lebih aktif turut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dalam soal hubungan luar negeri. Di tengah ketidakpuasan terhadap cara Clinton menangani kebijakan terhadap China, Kongres AS banyak mencampuri dengan cara menekan pihak eksekutif dalam berbagai macam RUU. Dalam campur tangannya, masalah Taiwan mendapat perhatian yang khusus dari anggota Kongres. Seringkali campur tangan ini tidak bisa diatasi oleh presiden, mengingat banyaknya kepentingan dan pertimbangan serta pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini.



## BAB 3

### PERKEMBANGAN CHINA SEBAGAI ANCAMAN HEGEMONI AS DI ASIA PASIFIK

#### 3.1.KEKUATAN CHINA

China adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia yang mencapai rata-rata hampir 10% tiap tahun sejak tahun 2000 China ini. Dua belas persen pertumbuhan ekonomi dunia berasal dari pertumbuhan ekonomi. China juga berhasil menarik investasi asing ke China, termasuk Taiwan yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar. Hal ini di mungkinkan karena keterbukaan ekonomi China dalam beberapa dekade sejak dilakukannya program keterbukaan dan pembangunan ekonomi oleh mantan perdana menteri Deng Xiao Ping pada tahun 1980-an.

China juga mencatat surplus perdagangan dengan hampir semua negara penting dunia. Khususnya dengan AS, pada tahun 2005 surplus perdagangan China mencapai 200 milyar dolar lebih yang merupakan 26% dari total defisit perdagangan AS. Bahkan diperkirakan bahwa China akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia, menggantikan posisi Amerika Serikat pada antara tahun 2020-2050.

Secara umum orang akan mengatakan bahwa China telah sangat berhasil membangun ekonomi, menjadikan dirinya menjadi kekuatan ekonomi dunia, dan bahkan kini disebut-sebut sebagai calon *super power* baru yang dapat mengimbangi posisi AS baik secara ekonomi, politik, dan strategis. Keberhasilannya dalam sistem politik yang relatif unik dibandingkan dengan negara-negara lain karena masih di pertahankannya sistem politik komunisme, sebagian orang menyebut China sebagai contoh atau model diktator yang berhasil (*a succesful dictatorship*).

Pada tahun 2010 total perdagangan *ASEAN-China* mencapai 200 milyar Dollar AS.<sup>76</sup>

Mengapa China tumbuh cepat? Paling tidak ada 5 faktor yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi China:

- a. pertama adalah penerapan atau pelaksanaan ekonomi pasar yang menggantikan peran negara dalam penentuan harga dan alokasi modal.
- b. kedua, pertumbuhan ekonomi China disebabkan oleh keterbukaannya pada ekonomi dunia yang terutama di tandai dengan mengalirnya investasi ke China. Ini juga memberikan insentif sangat kuat kepada perusahaan-perusahaan domestik untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan di China.
- c. ketiga adalah adanya tingkat tabungan dan investasi yang tinggi;
- d. keempat, adanya perubahan komposisi sektoral buruh di mana saat ini mereka yang bekerja pada sektor pertanian hanya berkisar 50% dibandingkan 70% pada dekade-dekade sebelumnya; dan
- e. kelima adalah tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat pendapatan perkapitanya masih rendah.<sup>77</sup>

Secara eksternal, kepentingan ekonomi China juga memaksa negara tersebut untuk menerapkan politik luar negeri yang bersahabat dengan masyarakat internasional dengan ditopang oleh diplomasi yang makin asertif untuk melindungi kepentingan strategis dan perdagangan internasionalnya. Saat ini 50% minyak mentah China berasal dari Timur Tengah.<sup>78</sup> China hanya mempunyai 2.1% cadangan minyak dunia. Sembilan puluh persen kebutuhan minyak China di impor melalui laut dan akan terus naik karena China akan mengimpor 12.7 juta barel/hari pada tahun 2020. Saat ini China mengimpor 6,2 juta barel/hari.<sup>79</sup> Ini berarti ketergantungan China terhadap perairan Asia Tenggara dan Indonesia khususnya akan terus menguat.

<sup>76</sup> Antara 29 Oktober 2010, diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/1288354865/asean-china-targetkan-nilai-perdagangan-500-miliar-dolar> pada 26 November 2010

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> *Kenaikan Impor Minyak Cina*. Diakses dari <http://www.pacific2000.co.id/research/berita-hong-kong/impor-minyak-cina-diperkirakan-naik-5-persen-ditahun-2010.php> pada 20 November 2010

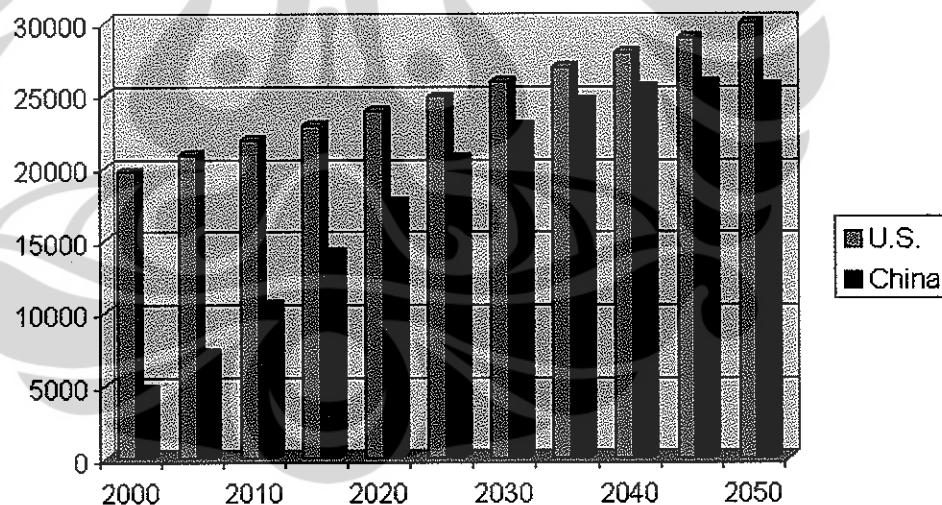
<sup>79</sup> *ibid*

China bukanlah sebuah negara yang kaya akan sumber alam yang cukup untuk mendukung pertumbuhannya yang sangat tinggi. Bisa dikatakan China saat ini sedang mengalami *lateral pressure*, di mana meningkatnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi akan mendesak sebuah negara untuk mencari sumber daya alam, terutama minyak sebagai sumber energi, dalam jumlah yang sangat besar dan beragam di tempat lain di luar wilayahnya. Oleh karena itu, berbagai macam usaha ke luar negeri harus dijalankan oleh China untuk dapat memperoleh pasokan minyak yang cukup untuk kebutuhan pembangunannya. Seiring dengan kebutuhan minyak, China juga harus mampu mengamankan jalur pelayaran pengantar minyak.

Grafik berikut menunjukkan kebutuhan akan energi dari dua negara besar (AS-China),<sup>80</sup> yang menjadi salah satu sebab timbulnya persaingan:

Gambar 3.1 Konsumsi Minyak AS dan China.

#### Daily Oil Consumption (in thousands of barrels)



Analisis futuristik (tahun 2020) yang dikeluarkan CIA memprediksikan China (bersama India) akan menjadi kekuatan utama masa depan (*new major*

<sup>80</sup> Diakses dari <http://www.gminsidenews.com/forums/f12/driving-gas-guzzler-may-worth-4500-more-congress-considers-new-program-74120/index8.html>, pada 2 Desember 2010.

*global player*) yang mampu menandingi kekuatan AS.<sup>81</sup> Bukan karena ideologi komunis Mao, melainkan karena China memiliki apa yang disebut sebagai 4 faktor penyokong *global power*: Produk domestik bruto (PDB), populasi, anggaran pertahanan, dan inovasi teknologi.<sup>82</sup>

Produk domestik bruto China mencapai USD 4,9 triliun (2009) dan diperkirakan akan menjadi USD 25.155 miliar di tahun 2025,<sup>83</sup> sementara China pada 2010 telah mengeluarkan USD 77,9 triliun untuk memperkuat pertahanannya.<sup>84</sup>

Selain itu, penandatanganan Deklarasi Aliansi Keamanan untuk abad ke-21 antara AS dan Jepang yang merupakan upaya mewujudkan keberadaan strategi pertahanan perang bintang serta rencana pembangunan sistem pertahanan rudal nasional (*national missile defense system*) di wilayah nasional setiap negara sekutu AS seperti Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Australia, sejak awal tahun 2003, mendapat tentangan keras dari China. China berpendapat aliansi tersebut seharusnya tidak ada seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin. Untuk meminimalisasikan dan menyeimbangkan keberadaan aliansi tersebut, China menjalankan strategi diplomatik menjalin hubungan militer lebih erat dengan Rusia dan mendukung penuh rezim keamanan multilateral di kawasan Asia Pasifik yakni *ASEAN Regional Forum (ARF)*.<sup>85</sup>

Kekuatan terbesar China terletak pada aspek ekonomi dan militernya. Berikut merupakan data mengenai kekuatan ekonomi maupun militer China:

<sup>81</sup> CIA, National Intelligence Council, Mapping the Global Future, Desember 2004, diakses dari [www.cia.gov](http://www.cia.gov), pada 17 November 2010

<sup>82</sup> (Gregory F. Treverton dan Seth G Jones, Measuring National Power, rand.org)

<sup>83</sup> Detik 15 Februari 2010, diakses dari

<http://www.detikfinance.com/read/2010/02/15/083007/1299458/4/pdb-jepang-masih-kalahkan-china> pada 17 November 2010

<sup>84</sup> *Anggaran Belanja Militer China*, diakses dari

<http://beritahankam.blogspot.com/2010/03/anggaran-belanja-militer-china-rp-722.html>, pada 17 November 2010

<sup>85</sup> DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A., *Makna Strategis Pembangunan Militer China* diakses dari [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna\\_strategis\\_pembangunan\\_militer\\_cina.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna_strategis_pembangunan_militer_cina.pdf), pada 21 November 2010.

### 3.1.1. Kekuatan Ekonomi China

Tak dapat dipungkiri bahwa selama satu dekade terakhir, China telah tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru yang paling berpengaruh dalam sistem internasional. Beberapa pihak memperkirakan bahwa China, bersaing dengan AS, akan tumbuh sebagai negara *superpower* pada 2020. Pengaruh kekuatan ekonomi China dalam sistem internasional semakin meningkat setelah China bergabung menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 2001.<sup>86</sup> Pada tahun 2009, cadangan devisa China merupakan yang terbesar di dunia, yaitu mencapai angka USD 2,5 triliun.<sup>87</sup> Pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2009 mencapai 8,7%,<sup>88</sup> dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 10,6 persen selama lima tahun terakhir.<sup>89</sup> Namun sebenarnya, pertumbuhan ekonomi China sudah relatif stabil di kisaran 10 persen per tahun sejak era 1980-an,<sup>90</sup> yakni sejak dibukanya kawasan khusus ekspor (zona ekonomi khusus) di Propinsi Guangdong dan Fujian.<sup>91</sup>

Pertumbuhan ekonomi China yang fantastis, didukung pula oleh strategi pemerintahannya untuk lebih *outward-looking*, terutama dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan internasional. Pergeseran kondisi perekonomian China dari negara penghasil industri primer menjadi negara industri manufaktur hanya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat, 10 tahun. Pada tahun 1980, kontribusi sektor industri manufaktur China terhadap perolehan ekspor berada pada kisaran 45 persen, lebih rendah dibandingkan kontribusi

<sup>86</sup> Financial Timer, dikutip oleh Chaimers Johnson. *No Longer the "Lone" Superpower: Coming to Terms with China*. (Japan Policy Research Institute Working Paper no.105. maret 2005).

<sup>87</sup> Kompas 12 Oktober 2010, diakses dari

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/10/12/15320345/Cadangan.Devisa.China.Terbesar.Dunia.pada.17.November.2010>

<sup>88</sup> Detik 15 Februari 2010, diakses dari

<http://www.detikfinance.com/read/2010/02/15/083007/1299458/4/pdb-jepang-masih-kalahkan-china.diakses.pada.17.November.2010>

<sup>89</sup> Ibid

<sup>90</sup> *The 6<sup>th</sup> Five Year Plan (1981-1985)*. Diakses dari

<http://china.org.cn/english/MATERIAL/157619.htm> pada 18 November 2010

<sup>91</sup> Simon Saragih. *Jika Mau, Indonesia Lebih Mudah Berbalik Arah* di dalam *Cermin dari China*. Editor: Bagus Dharmawan. (Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2006) hal.36.

sektor industri primer yang mencapai 55 persen, namun pada tahun 1990, perolehan ekspor dari sektor industri primer hanya mencapai 25 persen dan terus menurun hingga mencapai 10 persen pada tahun 2000.<sup>92</sup> China sudah tercatat sebagai produsen perangkat televisi terbesar di dunia sejak tahun 1990, produsen semen terbesar sejak 1995, serta menempati urutan tertinggi sebagai penghasil pupuk buatan dan baja pada tahun 1998.

Beberapa pakar perdagangan internasional berpendapat bahwa sifat perdagangan ASEAN-China lebih bersifat kompetitif. Mengenai hal tersebut, Bank Dunia pada tahun 2004 telah memperkirakan bahwa China akan menjadi kompetitor utama bagi produk ekspor non-migas Indonesia, terutama untuk produk-produk tekstil, mainan anak-anak, alat olahraga dan produk lainnya.<sup>93</sup>

Selain Singapura, China merupakan salah satu negara Asia yang tidak terkena dampak krisis Asia 1997 secara signifikan. Penanaman modal asing di China pasca krisis Asia memang sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 1999-2000, namun kembali meningkat pada tahun 2001.<sup>94</sup> China juga merupakan negara penerima FDI (*Foreign Direct Investment*) terbesar kedua di dunia, dengan nilai investasi total (*FDI Flow*) pada tahun 2008 mencapai USD 92,4 triliun.<sup>95</sup> Aktivitas perekonomian internasional dan surplus perdagangan China sejak tahun 1990 terus mengalami peningkatan, terutama pasca keanggotaan WTO (2001).<sup>96</sup> Dalam kegiatan perdagangannya, China mengalami defisit dengan negara-negara tetangganya (Jepang, Korea Selatan, ASEAN, Australia dan India), namun mengalami surplus

<sup>92</sup> Ignatius Wibowo, *Belajar dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang dalam Era Globalisasi*. (Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2005) hal32.

<sup>93</sup> *Ibid* hal 119

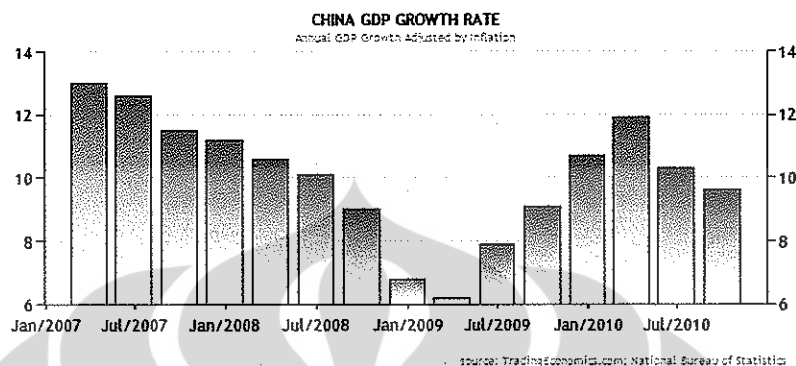
<sup>94</sup> *Ibid* hal 33

<sup>95</sup> *China Foreign Direct Investment* diakses dari <http://www.chinability.com/FDI.htm> pada 12 November 2010.

<sup>96</sup> Chengzong Yan, *FDI from China-Situation, Obstacles and Expectations*. (UNITAR (United Nations Institute for Training and Research)/SHU Series on International Economics and Finance: 2006) diakses dari <http://www.unitar.org> pada 12 November 2010.

perdagangan yang amat signifikan dengan AS, Hongkong dan Uni Eropa.<sup>97</sup>

Gambar 3.2 GDP China



Salah satu hal utama yang dapat dipelajari dari latar belakang kesuksesan ekonomi China adalah kemampuan pemerintahnya untuk menyingkirkan isu-isu yang terkait dengan politik, militer, dan ideologi antara blok barat dan timur, serta kebijakan pemerintahnya untuk mendahulukan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, teknologi dan korporasi.<sup>98</sup> Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah China menyadari bahwa perseteruan ideologi dengan blok barat, justru dapat menghambat pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya China di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping mulai menekankan pentingnya *outward looking* dan lebih membuka diri terhadap negara-negara barat.<sup>99</sup> Djafar mengemukakan bahwa ada lima kebijakan penting yang selanjutnya memberikan signifikansi bagi pertumbuhan ekonomi China, yaitu (1) mendorong pembangunan *non state enterprise* (NSE) dengan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, (2) perusahaan-perusahaan milik negara harus tunduk pada ketentuan pemerintah, tidak memiliki hak-hak istimewa, dan menghadapi *fair competition* dengan NSE; (3) menekankan prinsip non diskriminasi dalam memperlakukan segala sektor kegiatan

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid*

<sup>99</sup> Abdul Rahman Mahmud, *Kesadaran Krisis Global*, diakses dari [http://www.ipislam.edu.my/index.php/artikel/archive/December\\_2008](http://www.ipislam.edu.my/index.php/artikel/archive/December_2008), pada 17 November 2010.

perekonomian; (4) mereformasi aturan hukum yang tidak sinergis dengan prinsip-prinsip WTO; dan (5) mengutamakan prinsip ekonomi politik, keadilan sosial dan kepentingan umum.<sup>100</sup>

Kesadaran pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan arus globalisasi ekonomi, tidak menjadikan China serta merta “tunduk” terhadap kebijakan negara-negara barat. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kesadaran China bahwa negara merupakan *key factor* dalam menentukan arah perekonomian nasional.<sup>101</sup> Selain merumuskan berbagai kebijakan mendasar sebagai upaya untuk meningkatkan struktur perekonomiannya, pemerintah China juga melaksanakan reformasi di berbagai bidang dengan tetap mengedepankan peran pemerintah. Pertama, melaksanakan reformasi pada berbagai badan usaha milik pemerintah (*state-owned enterprise/SOE*), yaitu antara lain dengan mentransformasi struktur tradisional *SOE* menjadi perusahaan modern berorientasi pasar, namun tetap memprioritaskan negara (pemerintah) sebagai pengambil keputusan utama. Kedua, mendorong pertumbuhan *non state enterprise (NSE)* di tingkat distrik dan pedesaan sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Ketiga, mengembangkan sektor UKM dengan memaksimalkan kemampuan manajerial UKM untuk mengoptimalkan pendapatan dan tingkat produktivitas. *NSE* bersama-sama dengan sektor UKM di China telah memainkan peranan penting sebagai akselerator perbaikan ekonomi, juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan basis inovasi. Keempat, reformasi sistem perbankan melalui restrukturisasi sistem keuangan yang konsisten, modern dan sinergis dengan ekonomi pasar.<sup>102</sup>

Dua per tiga aktivitas perekonomian China didominasi oleh sektor UKM. Sektor ini juga telah diakui secara internasional sebagai

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*



bagian penting dari *global supply chain*. Pesatnya pengembangan UKM di China didukung pula oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, karena hampir semua lulusan universitas di negara tersebut sangat antusias untuk turut serta secara langsung sebagai praktisi UKM.<sup>103</sup> Sehingga, walaupun kemajuan teknologi China belum dapat menyaingi AS dan Jepang, China dapat mengantisipasi perubahan sistem ekonomi internasional, dan dapat memposisikan diri dengan baik sebagai *key player* dalam perdagangan global.

### 3.1.2. Kekuatan Militer China

Dalam Buku Putih Pertahanan Nasional China disebutkan bahwa tujuan keamanan nasional China adalah melindungi kedaulatan, melakukan modernisasi dan menciptakan stabilitas nasional.<sup>104</sup> China mengambil kebijakan pertahanan yang defensif yang mencakup beberapa aspek antara lain mengkonsolidasi pertahanan nasional, melawan agresi, meredam gerakan subversi bersenjata, mempertahankan keamanan dan integrasi wilayah, persatuan dan kedaulatan negara. Kebijakan China untuk modernisasi pertahanannya hanyalah untuk mempertahankan diri. Pembangunan kekuatan China bukan merupakan ancaman bagi siapapun, maupun menjadi ancaman kekuatan hegemoni, namun lebih ditujukan pada usaha untuk menciptakan perdamaian. Namun seandainya hegemoni dan politik kekuasaan masih ada dan terus berkembang khususnya, usaha untuk melakukan reunifikasi secara damai terhalangi, China akan meningkatkan kemampuannya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan dengan kekuatan militer.

China menekankan kemandirian sebagai landasan untuk menjaga keamanan negara dengan tetap menyusun kebijakan pertahanan nasional dan strategi pembangunan secara mandiri. China

---

<sup>103</sup> Ibid hal 57

<sup>104</sup> [www.globalsecurity.org](http://www.globalsecurity.org) diakses pada 17 November 2010

berprinsip mengutamakan operasi-operasi defensif, mempertahankan diri dan hanya memberikan serangan balasan jika diserang terlebih dahulu. Pertahanan seperti ini berarti menggabungkan usaha untuk penangkalan perang dengan persiapan-persiapan untuk memenangkan perang, mempertahankan diri pada masa damai dan melakukan kebijakan pertahanan strategis dengan operasi ofensif taktis pada masa perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, di samping mengandalkan diri pada persenjataan yang ada, angkatan bersenjata China *People's Liberation Army (PLA)* atau Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang mendalam di lingkungan militer internasional dan siap melakukan operasi-operasi pertahanan menggunakan persenjataan berteknologi tinggi.<sup>105</sup>

Dilihat dari sudut geografi, ancaman terhadap kedaulatan China dewasa ini berasal dari darat maupun laut. Dari laut difokuskan adalah konflik Laut China Timur dengan kemungkinan AS terlibat didalamnya. Potensi konflik yang dapat terjadi di Laut China Timur melibatkan China, Jepang dan Taiwan. Begitu juga dengan ancaman di garis perbatasan, permasalahan nuklir di Korut, aktivitas teroris di Xinjiang, pengamanan jalur energi laut terutama di Selat Malaka. Masalah keamanan ini menghasilkan penyesuaian strategi pertahanannya dan menghasilkan apa yang dinamakan "*beishounangong*" berupa proyeksi postur pertahanan yang defensif di Utara, Barat Laut dan Barat Daya serta Pertahanan Ofensif di sepanjang Selat Taiwan.<sup>106</sup>

Untuk memahami strategi pertahanan China, perlu dilihat dari konteks sejarah pembentukan militer China dan hubungannya dengan Partai Komunis China. Hal tersebut dikarenakan peran yang sama dalam pembentukan negara komunis China, serta perjuangannya dalam

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Deplu RI, *Konsultasi Bilateral mengenai masalah keamanan antara RI dan RRC*, (Jakarta, Juli 1999), hlm 63.

melawan kaum Nasionalis (Kuomintang), pengalaman perang melawan Jepang di Manchuria serta keterlibatan dalam Perang Korea telah menjadikan TPR sebagai tentara yang profesional. Perkembangan selanjutnya hubungan sipil militer militer China–Partai Komunis China (PKC) serta adopsi soviet model dalam regulasi dan standarisasi TPR mewarnai perkembangan militer China. Adopsi tersebut salah satunya disebabkan adanya embargo militer dari negara barat.<sup>107</sup>

Pembentukan Strategi pertahanan China juga dilihat dari karakteristik hubungan sipil-militer antara PKC dengan TPR dapat dilihat dalam beberapa komponen antara lain: Kesamaan ideologi dan proses revolusi, adanya status politik yang seimbang serta memiliki kepentingan yang sama.<sup>108</sup> Puncak dari kerjasama sipil-militer RRC ini dapat dilihat ketika peristiwa Tianamen di mana dukungan TPR terhadap PKC dalam menghadapi demonstrasi rakyat. Hubungan sipil-militer direfleksikan dalam komando tertinggi dari TPR. Pemimpin Partai secara otomatis menjadi komando tertinggi dalam *CCP Central Military Commission (CMC)* dengan dibantu oleh perwira lainnya seperti *General Staff Department, General Political Affairs Department, General Logistical Department*, dan *General Armament Department* dan empat angkatan lain seperti angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kekuatan strategi rudal.

Perumusan kebijakan pertahanan ditentukan oleh kelompok pemimpin di jajaran elit pimpinan Partai Komunis China dan selalu melibatkan partai dan militer. Hal ini disebabkan oleh perkembangan komunisme China yang tidak terpisahkan dengan kekuatan militer selama revolusi kelompok komunis melawan kelompok nasionalis. Oleh karena itu, strategi kebijakan militer juga tergantung kepada ketua PKC yang sedang memimpin. Oleh karena itu kebijakan

---

<sup>107</sup> Review of East Asia Strategic 1998 1999, hlm 121-127.

<sup>108</sup> Mark Twight, *Relations between the Chinese Mainland and Taiwan : PRC White Paper*, hlm 45

pertahanan dan strategi militer China periode 2003-2007, juga dipengaruhi oleh kepemimpinan Hu Jintao yang diangkat menjadi Ketua PKC sejak 2004 menggantikan Li Peng.

China mendefinisikan *Grand Strategy*-nya sebagai “strategi bangsa secara keseluruhan, atau persekutuan bangsa-bangsa yang menggunakan keseluruhan kekuatan nasional.” Untuk mencapai tujuan politik yang terkait dengan keamanan nasional dan pembangunan China. Konsep yang dapat digunakan untuk memahami strategi militer China adalah *Comprehensive National Power (CNP)* atau *Strategic Configuration of Power (SHP)*. *CNP* merupakan konsep yang telah dievaluasi oleh para ahli strategis China yang mengukur posisi China dalam relasinya dengan negara lain diantaranya adalah pendekatan pada aspek perbatasan, sumber daya alam, kekuatan ekonomi, pengaruh diplomatik, pemerintahan domestik, kapabilitas militer dan pengaruh budaya. Militer China merupakan bagian yang sangat penting dari strategi nasional. China mengembangkan potensinya yang sangat difokuskan kepada angkatan laut dan angkatan udara.

Perdebatan mengenai strategi yang semakin intensif sejak 1980-an kemudian menghasilkan formulasi strategi *pertahanan aktif*<sup>109</sup> (*jiji fangyu*). Deng Xiaoping sendiri merupakan pendukung strategi ini, menurutnya prinsip-prinsip strategi pertahanan aktif harus memberi kemampuan bagi China untuk menciptakan sistem pertahanan yang efektif. Sejalan dengan strategi itu, China harus mampu memperlambat pecahnya perang, namun dalam situasi perang harus mampu menahan serangan musuh dan mengubah perimbangan kekuatan melalui operasi-operasi defensif dan ofensif sehingga memperoleh kemenangan dalam perang mempertahankan diri.

---

<sup>109</sup> Chen Zhimin, Nationalism, internationalism and Chinese Foreign Policy, *Journal of Contemporary China*, Carfax (Publishing 2005) hal 35-53.

Strategi ini mendapat dukungan luas dari para pemikir strategi dan pemimpin China seiring dengan berubahnya penilaian mereka terhadap bentuk-bentuk perang yang mungkin akan dihadapi oleh China di masa mendatang.<sup>110</sup> Secara keseluruhan, doktrin pertahanan aktif memang dimaksudkan untuk menghadapi tiga jenis perang, yaitu<sup>111</sup>: perang dunia, perang skala luas dalam menghadapi agresi negara asing terhadap China dan konflik perbatasan atau perang terbatas. Namun sejalan dengan berubahnya persepsi para pemimpin China terhadap lingkungan internasional sejak akhir 1990-an China merasa yakin bahwa jenis perang ketiga merupakan skenario yang paling mungkin dihadapi.

Dalam kaitannya dengan reformasi, paling tidak ada empat prinsip pragmatis yang mendasari modernisasi China<sup>112</sup>:

1. sistem ekonomi yang bertujuan mensejahterakan rakyat
2. membangun negara kuat
3. monopoli PKC di bidang politik
4. PKC memformulasikan dan mengawasi kebijakan berorientasi pasar.

Dengan bidang-bidang prioritas modernisasi adalah industri, pertanian, iptek dan pertahanan nasional/militer.<sup>113</sup> Seiring dengan modernisasi dalam doktrin strategis, para perancang militer China juga menyadari pentingnya modernisasi militer yang mencakup modernisasi peralatan tempur darat, udara dan laut. Dalam hal ini, modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aspek terpenting.<sup>114</sup> Dalam rangka itu, modernisasi pertahanan dilakukan melalui dua jalur utama, yakni melalui alih teknologi yang dapat dikembangkan bagi

---

<sup>110</sup> *ibid*

<sup>111</sup> *ibid*

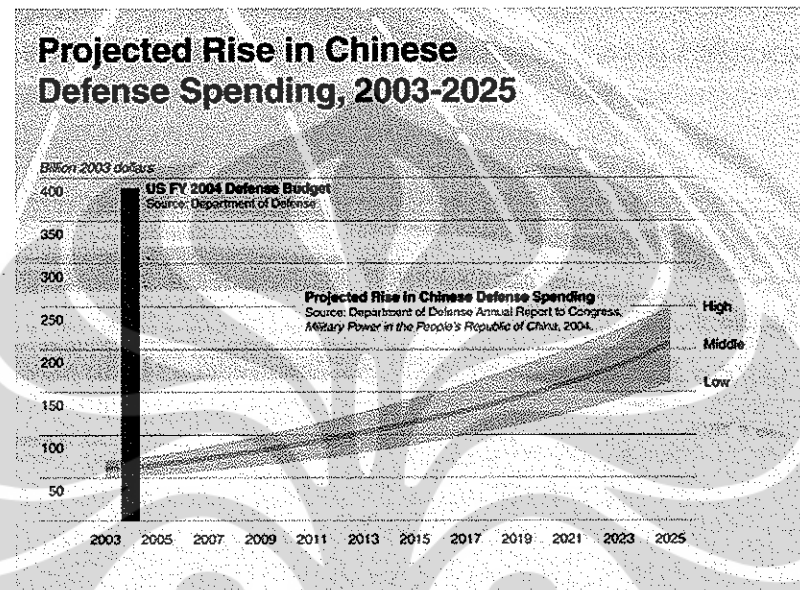
<sup>112</sup> Jan S. Prybyla. Notes on The Methodology of China Economic Reforms, *Issues and Studies* 35 No. 4. (Juli/Agustus 1999): hal 4.

<sup>113</sup> Patrick Tyler, *A Great Wall, Six President and China, an Investigative History* (New York: Century Foundation Book, Public Affairs 1999 hal 259.

<sup>114</sup> Roger Cliff & Keith Crane, *A New Direction for China's Defence industry*, (RAND Project Air Force, 2005), hal 12-16.

modernisasi persenjataan dari barat dan peningkatan penelitian serta pengembangan di bidang militer (lihat gambar).<sup>115</sup>

Gambar 3.3 Pengeluaran Militer China



Dalam menilai kekuatan militer China, para analis barat berpendapat bahwa kekuatan militer China masih memiliki daya operasional terbatas. Meskipun demikian, China cukup mampu memproyeksikan kekuatannya ke seluruh kawasan Asia. Senjata nuklir China, seperti *ICBM* (*Intercontinental Ballistic Missile*) mampu menjangkau dan menghancurkan pusat-pusat industri di wilayah Rusia dan seluruh Asia. *IRBM* (*Intermediate Range Ballistic Missile*) mampu menghancurkan pusat-pusat industri di wilayah Rusia Tengah dan Timur juga sasaran-sasaran di Asia Timur dan Selatan.

<sup>115</sup> Diambil dari <http://thomaspmbarnett.squarespace.com/globlogization/tag/china?currentPage=10> pada 2 Desember 2010

### 3.2.TAIWAN SEBAGAI FAKTOR PENTING DALAM HUBUNGAN CHINA AS

Masalah Taiwan merupakan dampak yang tidak diharapkan dari Perang Dunia II dan kelanjutan kemenangan komunis China di China daratan. Para pemimpin aliansi anti-fasis telah memutuskan bahwa pulau Formosa (Taiwan) akan dikembalikan kepada China setelah berakhirnya perang. Pulau Formosa berada di bawah yurisdiksi kekaisaran Jepang berdasarkan *Treaty of Shimonoseki* tahun 1895 (yang mengakhiri Perang Sino-Jepang) dan menjadi koloni Jepang sampai tahun 1945. Setelah pihak yang berwenang di China daratan menerima penyerahan Jepang atas Taiwan, mereka mulai membentuk aparat administrasi untuk menjalankan pemerintahan di wilayah yang kembali menjadi salah satu propinsi di China.<sup>116</sup>

Antara tahun 1945-1949, terjadi perang saudara di China daratan. Kemudian pada awal tahun 1949, Chiang Kaishek memutuskan untuk menjadikan Taiwan sebagai wilayah pertahanan Republik China. Sisa-sisa pemerintahan dan tentara nasionalis mundur, dan Taiwan mendirikan ibukota sementara Republik China di Taipei. Sementara itu, tentara komunis China mulai menggelar kekuatan di sepanjang garis pantai Propinsi Fujian yang berseberangan dengan Taiwan, bersiap-siap untuk melakukan serangan pasukan amfibi terhadap sisa-sisa pasukan nasionalis. Pada saat itu, invasi tentara komunis ke Taiwan tampaknya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Invasi Korea Utara dan Korea Selatan yang menandai awal pecahnya perang Korea merubah secara dramatis situasi di Asia Timur. AS memandang invasi tersebut sebagai tindakan agresi yang dirancang oleh para pemimpin di Kremlin dan bersiap melibatkan diri dalam konflik di Semenanjung Korea dengan dukungan dari PBB.

Dalam perang tersebut, pasukan AS dan sekutunya terlibat dalam konflik senjata dengan tentara komunis China yang memberikan dukungan kepada Korea Utara. Keadaan ini menyebabkan Taiwan menjadi memiliki arti penting bagi AS

---

<sup>116</sup>A. James Gregor, *The China Connection, US Policy and The People's Republic of China*, (California Standard University, 1986), hlm 124

baik secara strategis maupun untuk kepentingan logistik. Taiwan menjadi penghubung yang sangat penting dalam rantai pertahanan berupa gugusan pulau anti-komunis yang terbentang mulai dari Kepulauan Jepang sebelah Utara sampai ke Filipina.

Masalah status internasional Taiwan menjadi kekhawatiran utama bagi China dengan ditematkannya kekuatan angkatan laut AS di Selat Taiwan menyusul pecahnya perang Korea. Dengan diproklamirkannya Republik Rakyat China (RRC) tahun 1949, pemerintah RRC mengklaim bahwa pemerintahan yang baru berdiri ini merupakan pengganti Republik China sehingga satu-satunya pemerintahan yang sah di seluruh wilayah China dan menjadi satu-satunya wakil yang sah di arena internasional. Pemerintahan komunis menggantikan pemerintahan nasionalis di mana badan-badan utama dari hukum internasional yang sama tidak berubah sehingga kedaulatan China serta wilayah integralnya tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, pemerintah RRC secara jelas memperoleh dan menjalankan kedaulatan China termasuk kedaulatan terhadap Taiwan.<sup>117</sup>

Setelah tahun 1949, klaim pemerintah RRC di Beijing atas Taiwan didasarkan pada kebijakan pemerintahan nasionalis berupa integrasi penuh Taiwan ke dalam wilayah China yang bersatu.<sup>118</sup> Mereka beranggapan bahwa kegagalan mereka untuk memperoleh kontrol terhadap Taiwan, termasuk juga Pescadores dan Kepulauan Kinmen serta Matsu merupakan konsekuensi dari intervensi AS. Sejak itu masalah reunifikasi Taiwan menjadi salah satu agenda nasional yang penting bagi pemerintah RRC dan menjadi salah satu masalah yang mengganjal dalam hubungan RRC dengan AS.

Berkaitan dengan klaimnya sebagai satu-satunya penguasa yang sah di China termasuk Taiwan, pemerintah China merumuskan prinsip satu China (*One China Principle*). Dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain

<sup>117</sup>Relations between the Chinese mainland and Taiwan : PRC White paper, *Asian Affairs* 27, (Februari 2000): hal 40

<sup>118</sup> *Ibid.*



setelah berdirinya RRC, pemerintah RRC mensyaratkan bahwa negara tersebut mengakui pemerintah RRC sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah yang mewakili seluruh China dan bahwa negara tersebut tidak melakukan hubungan diplomatik dengan penguasa Taiwan. Prinsip satu China ini merupakan landasan kebijakan pemerintah RRC terhadap Taiwan.

Sejak tahun 1979, pemerintah RRC menerapkan kebijakan reunifikasi damai dan secara bertahap menyusun konsep “satu negara, dua sistem” (*One Country, Two Systems*). Konsep penyelesaian ini merupakan inisiatif dari Deng Xiaoping yang telah ditawarkan kepada Inggris dalam penyelesaian Hongkong dan kepada Portugal dalam penyelesaian Macao. “Prinsip satu China” dan “Satu Negara, dua sistem” kemudian menjadi prinsip dasar pemerintah RRC dalam upaya penyelesaian masalah Taiwan.<sup>119</sup>

Tujuan utama dari prinsip dasar dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan prinsip tersebut adalah bahwa China akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. China akan mendorong secara aktif kontak masyarakat dan pertukaran ekonomi serta budaya antara China dan Taiwan dan memulai sesegera mungkin perdagangan langsung serta pelayanan jasa pos, udara dan pelayanan. China akan mencapai reunifikasi melalui negosiasi damai dengan dasar prinsip satu China, segala sesuatunya dapat dinegosiasikan. Setelah reunifikasi, kebijakan “satu negara, dua sistem” akan dilaksanakan. Dengan kebijakan tersebut, China daratan akan terus menjalankan sistem sosialis sedangkan Taiwan tetap mempertahankan sistem kapitalis dalam jangka panjang.

Namun demikian, pemikiran untuk mengkooptasi Taiwan seutuhnya tetap menjadi harapan China. Sebagai negara yang separuh wilayahnya dikelilingi oleh rangkaian kepulauan, China harus meluaskan pengaruhnya ke wilayah Pasifik di mana masa depan China akan ditentukan. Taiwan, yang menghadap pasifik di sebelah Timur, merupakan satu-satunya jalan keluar tanpa hambatan menuju

---

<sup>119</sup>*Ibid*, hal 42

Pasifik. Apabila China berhasil menyatukan kembali Taiwan dengan China daratan maka China akan lebih mudah untuk melakukan manuver di Pasifik Barat. Selain itu, dengan memanfaatkan posisi strategis Taiwan, China dapat mempengaruhi perluasan pengeluaran militer AS serta dukungan atas perekonomian Jepang. Dengan demikian, kembalinya Taiwan ke China daratan dapat membantu mengatasi masalah di Laut China Selatan dan mengacaukan rantai strategis AS di wilayah Asia Pasifik.

### 3.3. KERJASAMA CHINA-ASEAN

Hubungan kerjasama informal ASEAN-China dimulai sejak *ASEAN Ministerial Meeting* ke-24 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Juli 1991.<sup>120</sup> China kemudian menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada bulan Juli 1996. China merupakan mitra wicara ASEAN pertama yang menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* pada KTT ke-7 ASEAN menyampaikan keinginannya untuk mengakses *Protocol to the Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone (SEANWFZ)*.<sup>121</sup>

Mekanisme kerjasama ASEAN-China dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitu KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-China, *ASEAN-China Senior Official Consultation (ACSOC)*, *ASEAN-China Joint Cooperation Committee (ACJCC)*, dan *ASEAN-China Working Group on Development Cooperation (ACWGDC)*. Dokumen dasar kerjasama ASEAN-China adalah *Joint Declaration of the Heads of State/ Government of the Association of the Southeast Asian Nations and the People's Republic of China on Strategic Partnership for peace and prosperity* yang ditandatangani pada KTT ke-7 ASEAN-China pada tanggal 8 Oktober 2003 di Bali.<sup>122</sup> Untuk melaksanakan Deklarasi Bersama tersebut, pada KTT ke-8 ASEAN-China di Vientiane, 29 November

<sup>120</sup> Deplu Indonesia. *ASEAN-China FTA: A Wake Up Call*, diakses dari <http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=3173&l=id> pada 17 November 2010

<sup>121</sup> *Ibid*

<sup>122</sup> ASEAN. *Joint Declaration of The Heads of State/Government of The Association of Southeast Asian Nation and The People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity*, diakses dari <http://www.aseansec.org/15265.htm>, pada 18 November 2010

2004, para pemimpin *ASEAN* dan China mengadopsi *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership*, serta *Joint Statement of ASEAN-China Commemorative Summit* di Nanning tahun 2006.<sup>123</sup>

Prioritas bidang kerjasama *ASEAN-China* meliputi 10 bidang : Pertanian, informasi dan teknologi komunikasi, sumber daya manusia, *mutual investment*, *Mekong Development*, Transportasi, budaya, pariwisata, energi dan kesehatan publik. Terkait bidang politik dan keamanan, China telah menandatangani beberapa kesepakatan dengan *ASEAN* antara lain *MoU between the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan the Government of the people's Republic of China on Cooperation in the field of non-traditional security issues dan the declaration on the conduct of parties in the South China Sea (DOC)* sebagai *confidence-building measures* antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyelesaian ketegangan di Laut China Selatan.<sup>124</sup>

China menjadikan dekade terakhir abad ke 20 sebagai dekade pembinaan hubungan baik, dengan *ASEAN*. Sepanjang periode ini China menandatangani dokumen bilateral maupun kolektif dengan *ASEAN*. Di samping itu, China juga semakin meningkatkan hubungan dagang dengan *ASEAN*. Di antara negara *ASEAN*, Singapura merupakan rekanan dagang terbesar diikuti oleh Indonesia, Malaysia, dan Philipina. Dewasa ini atau sesudah krisis keuangan Asia, China mulai meningkatkan investasinya ke *ASEAN*.

Hubungan China-Taiwan yang fluktuatif menuntut sikap fleksibel dari *ASEAN*. Sikap resmi *ASEAN* terhadap hubungan kedua negara tersebut adalah hanya mengakui satu China. Dalam pandangan *ASEAN* konflik kedua negara adalah urusan dalam negeri mereka, oleh karena itu *ASEAN* tidak akan ikut campur di dalamnya. Sekalipun demikian, bukan berarti *ASEAN* mengabaikan

<sup>123</sup> ASEAN. *ASEAN-China Dialogue Relation* diakses dari <http://www.aseansec.org/4979.htm>, pada 18 November 2010

<sup>124</sup> *Hubungan Indonesia Cina*, diakses dari <http://oseafas.wordpress.com/2010/02/09/hubungan-asean-%E2%80%93-cina/>, pada 18 November 2010.

keberadaan Taiwan. Kepentingan ekonomi *ASEAN* mendorongnya untuk tetap memelihara hubungan dengan Taiwan sejauh tidak menimbulkan kritik dari China daratan yang cenderung peka terhadap isu-isu hubungan China-Taiwan.

*ASEAN* cenderung menjaga stabilitas hubungan kedua negara untuk mencegah munculnya perang antara China dan Taiwan. Provokasi terhadap stabilitas hubungan saat ini akan memicu pecahnya perang China-Taiwan yang pada akhirnya mengundang keterlibatan Amerika di dalamnya. Perang China *versus* AS akan mengguncang ekonomi-politik *ASEAN* yang sudah tentu akan sangat merugikan masa depan *ASEAN* sebagaimana krisis finansial tahun 1997. Di samping itu instabilitas di Selat Taiwan dengan sendirinya juga akan merusak keamanan jalur minyak pensuplai kebutuhan energi Jepang. Ancaman terhadap perekonomian Jepang pada akhirnya juga akan merugikan *ASEAN*.

Kedekatan *ASEAN* dengan AS adalah upaya *ASEAN* untuk memerangi peluang perluasan pengaruh China di *ASEAN*. China menyadari sikap *ASEAN* dan mengkritik kerjasama militer AS dan negara-negara *ASEAN*. China mempersoalkan latihan militer AS-Philipina (*balikatan*), AS-Thailand (*Golden Cobra*), kehadiran tentara AS di Philipina untuk membantu tentara Philipina menghadapi Abu Sayyaf. Keterlibatan Jepang dalam kampanye antiteror yang dicanangkan AS meningkatkan aktifitas militer Jepang sebagaimana tercermin pada keterlibatan pasukan Bela Diri Jepang (*Japan Self-Defence Force*) dalam operasi militer AS di Irak, walaupun tidak berada di garis depan. Perkembangan ini sudah tentu meningkatkan kekhawatiran China.

Sering dengan semakin meningkatnya hubungan China-*ASEAN*, hubungan ekonomi China-*ASEAN* pun terus berkembang. Hubungan China dan *ASEAN* sebelum krisis ekonomi yang melanda *ASEAN* tahun 1997 telah mulai meluas pada forum *ASEAN+3* dan *China-ASEAN Free Trade Agreement*.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Raul L. Cordenillo. *The Economic Benefits to ASEAN of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* diakses dari <http://www.aseansec.org/17310.htm>, pada 17 November 2010

China dan *ASEAN* telah meluncurkan dialog kerjasama tahun 1991 dan menandatangani Kesepakatan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Komprehensif pada 2002 yang mengusulkan pembentukan *ACFTA* pada 2010. Pada November 2004, China dan *ASEAN* menandatangani kesepakatan perdagangan barang dan kesepakatan serupa di bidang jasa pada 2007. Sesuai *ACFTA*, standar tarif impor China untuk barang-barang asal *ASEAN* mencapai 5,8% sejak 2007 dan turun menjadi 2,4 persen pada 2009.<sup>126</sup> Penurunan tarif akan berakhir hingga 93% untuk produk impor *ASEAN* pada 2010 ketika *ASEAN*, yang telah menyeragamkan tarif produk impor untuk China rata-rata 6,3 persen pada 2007, membuat kesepakatan serupa.<sup>127</sup> Perdagangan *ASEAN* dan China tahun 2004 mencapai 105,9 miliar dolar AS, kemudian naik pada 2007 menjadi 202,5 miliar dolar AS. Volume ini naik lagi 14 persen menjadi 231,12 miliar dolar AS selama 2008, sekalipun terjadi krisis keuangan global.<sup>128</sup> *ASEAN* diperhatikan oleh para pebisnis China sebagaimana China mempertimbangkan kawasan itu sebagai kunci wilayah untuk menciptakan perusahaan China dalam upaya diversifikasi pasar luar negerinya. Langkah diversifikasi pasar luar negeri ini sukses membantu China dalam mengurangi dampak negatif krisis keuangan global. Saat ini *ASEAN* adalah mitra dagang terbesar keempat China setelah Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Saat *ACFTA* terbentuk, volume perdagangan bilateral mencapai 1,2 triliun dolar AS sehingga *ACFTA* akan menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Utara dan Eropa.<sup>129</sup>

China mendekati *ASEAN* dengan menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* dan kode etik penyelesaian damai atas konflik teritorial di Laut Cina Selatan, serta melancarkan diplomasi energi baik ke Asia Tengah, Afrika, maupun Amerika Latin. Perlu diketahui China adalah negara pertama non-

<sup>126</sup> *Ibid*

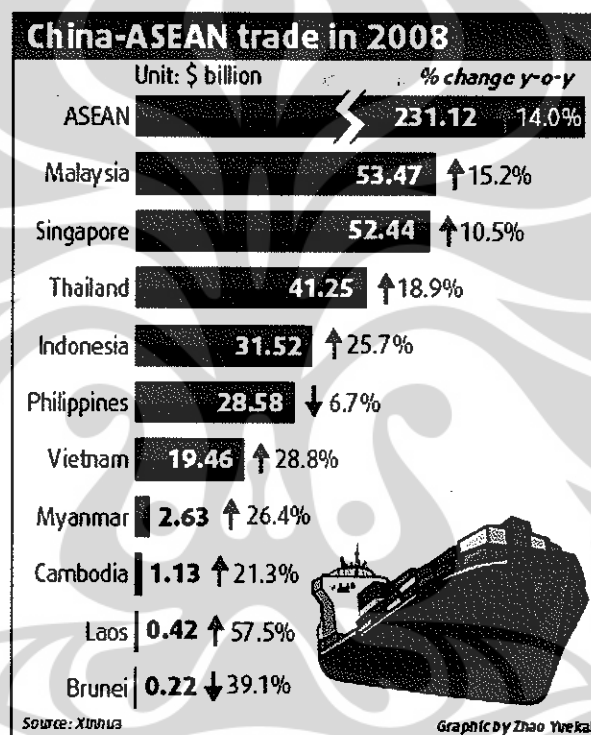
<sup>127</sup> *Republika* (Jakarta), 12 April 2009, diakses dari [http://rol.republika.co.id/berita/43433/ASEAN\\_Gantikan\\_Jepang\\_Sebagai\\_Mitra\\_Utama\\_China](http://rol.republika.co.id/berita/43433/ASEAN_Gantikan_Jepang_Sebagai_Mitra_Utama_China), pada 17 November 2010.

<sup>128</sup> *Hubungan ASEAN-China*, diakses dari <http://oseafas.wordpress.com/2010/02/09/hubungan-asean-%E2%8C%93-cina/>, pada 17 November 2010

<sup>129</sup> *ibid*

*ASEAN* yang menandatangani *TAC* pada tahun 2003.<sup>130</sup> Negara-negara Asia Tenggara diyakini semakin memiliki pengaruh yang besar bagi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan China, begitu juga sebaliknya. Namun hubungan strategis yang dilancarkan Asia Tenggara dan China juga menimbulkan potensi konflik regional di masa depan. Dalam satu dekade terakhir China semakin giat melancarkan pendekatan ekonomi dan diplomasi ke negara-negara Asia Tenggara.

Gambar 3.4 Perdagangan China ASEAN tahun 2008



Diakui bahwa China mempunyai kepentingan untuk mengamankan kebutuhan energi domestiknya dan menjadi salah satu faktor utama pentingnya Asia Tenggara bagi China. Mulai tahun 2015 sekitar 40% dari kebutuhan gas alam cair (*LNG*) China sebagian besar akan di pasok dari Asia Tenggara, diantaranya Malaysia, Indonesia, Brunei, Myanmar dan Laut Cina Selatan. Bahkan pasokan utama energi ke China dari Timur Tengah dan Afrika akan melewati jalur laut

<sup>130</sup> *China joins Treaty of Amity, Cooperation in Southeast Asia* diakses dari <http://id.china-embassy.org/eng/xwdt/t87231.htm>, pada 17 November 2010

Selat Malaka yang dimiliki bersama oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura. Bagi China selain sebagai sumber migas, Laut Cina Selatan adalah sabuk pengaman dan wilayah penyangga (*Buffer Zone*) bila ada ancaman dari arah selatan dari sekitarnya (*Southern Seas*). Selain itu, yang lebih penting lagi adalah China menjadikan kawasan ini sebagai *silk route* yang digunakan untuk kegiatan rute transportasi perdagangannya yang menghubungkan China dan Eropa.

Kawasan Asia Tenggara selalu menempati posisi penting bagi China baik secara politik maupun strategis. Hal ini tampaknya tidak akan berubah bahkan akan makin kuat karena kepentingan China yang makin besar untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena pertama, Asia Tenggara adalah kunci untuk memperluas pengaruh terutama persaingan dengan Jepang; kedua, Asia Tenggara sangat strategis untuk kepentingan ekonomi dan keamanan, terutama karena menjadi jalur laut internasional (*SLOC/Sea Lanes Of Communication*): perairan Asia Tenggara di layari oleh kapal-kapal dagang dan tanker dengan nilai lebih dari USD 350 miliar tiap tahunnya. Sembilan puluh persen minyak China juga melalui perairan Asia Tenggara. Ketiga, Asia Tenggara yang berpenduduk sekitar 500 juta jiwa merupakan pasar yang sangat potensial bagi China, bahkan menjadi area investasi di masa yang akan datang; keempat, Asia Tenggara menjadi area sangat penting bagi China untuk mengembangkan strategi multilateralisme untuk menyeimbangkan posisi dengan AS di kawasan dan untuk memproyeksikan wajah diplomasi China yang *benign dan peaceful* sebagaimana ditunjukkan oleh penandatanganan *code of conduct* di Laut Cina Selatan, dan terakhir Asia Tenggara penting bagi China untuk bersama-sama menghadapi tekanan Barat dan soal yang berkenaan dengan hak asasi manusia.

Memang tidak dapat dipungkiri, krisis ekonomi tahun 1997 memberikan ruang yang cukup luas bagi China untuk lebih aktif di Asia Tenggara, di mana China bersedia untuk tidak mendevalusi mata uangnya walaupun China jelas mengalami tekanan berat. Untuk ini China bersedia menanggung kerugian yang cukup besar. Dalam Krisis Global sekarang ini negara *ASEAN plus China*, Jepang

dan Korea Selatan (*ASEAN +3*) telah sepakat menyiapkan 80 milyar dollar (800 Triliun) sebagai antisipasi meluasnya Krisis Ekonomi Global ke Asia Tenggara.<sup>131</sup> Dana tersebut berasal dari penyesihan cadangan devisa negara-negara tersebut di atas, yang diputuskan dalam pertemuan *ASEM (Asia Europe Meeting)* ke-7 pada tanggal 24 Oktober 2008. Adapun China, Korea Selatan dan Jepang menyediakan 80% dari total dana atau sekitar USD 65 miliar (650 triliun) di mana sisanya akan ditanggung oleh 10 negara anggota *ASEAN*.<sup>132</sup> *ASEAN+3* awalnya memang dibentuk untuk mengurangi dominasi AS dalam bidang ekonomi yang menemukan momentumnya pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1997, di mana China dan Jepang tampil lebih meyakinkan dari pada AS yang lebih menyukai *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)* dan berdiri di belakang *IMF (International Monetary Fund)* yang sering memaksakan kebijakan ekonomi yang justru memperburuk keadaan.

---

<sup>131</sup> *Detik* 5 April 2009. diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2009/05/04/062251/1125623/5/asean-3-kini-punya-lembaga-penjamin-kredit-bersama> pada 17 November 2010.

<sup>132</sup> *Ibid.*



## BAB 4

### ANALISA

#### RELEVANSI PENDEKATAN *SMART POWER* AS KEPADA INDONESIA TERHADAP KEPENTINGANNYA DI ASIA PASIFIK

##### 4.1 DINAMIKA HUBUNGAN AS-CHINA TERKAIT PEREBUTAN PENGARUH DI ASIA PASIFIK

Hubungan kedua negara biasanya dijelaskan dalam deskripsi yang kompleks dan penuh dengan persaingan. Kebanyakan dari persaingan ini adalah produk dari persepsi dan *image* mereka terhadap satu sama lain. Karakter hubungan keduanya bisa diidentifikasi sebagai hubungan antarnegara yang bukan aliansi, namun juga bukan musuh. Secara umum, Pemerintah AS tidak melihat China sebagai musuh, melainkan sebagai kompetitor di beberapa isu dan teman di beberapa isu tertentu lainnya. Saat ini ekonomi AS adalah yang terkuat di dunia, sedangkan China menempati posisi kedua, dengan menggantikan posisi Jepang.<sup>133</sup> Keduanya merupakan konsumen energi, baik itu batu bara maupun minyak bumi, yang terbesar di dunia. Kedua negara juga merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar sehingga memiliki beban dan tanggung jawab yang besar dalam menanggulangi efek perubahan iklim. Sesungguhnya hubungan AS-China sudah relatif stabil, kendati mendapati dinamika fluktuatif dalam beberapa kesempatan seperti percobaan intervensi AS terhadap isu pelanggaran HAM pemerintah China kepada rakyat di Tibet, Xinjiang, keterbatasan dalam akses terhadap informasi, tidak adanya kebebasan pers, minimnya pertumbuhan masyarakat sipil maupun status politik Taiwan.

---

<sup>133</sup> WM Morrisson. *China's Economic Outlook*. diakses dari <http://www.fas.org/sgp/crs/row/IB98014.pdf> pada 17 November 2010

Hubungan antara keduanya diperburuk setelah kejadian di Tiananmen, Beijing. Peristiwa tersebut menjadi noda terhadap konsep perlindungan rakyat oleh China, dan dianggap sebagai kesalahan fatal di mata AS karena kontradiktif terhadap kepentingan dan nilai yang dibela oleh AS. Pasca pembantaian Tiananmen, hubungan AS dan China kembali merenggang. Respon pemerintah AS, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ronald Reagan dan awal pemerintahan Presiden George Bush (senior) adalah konfrontasi terhadap China dalam berbagai bidang. Konfrontasi pertama yang dijatuhkan AS kepada China adalah *skorsing* berupa moratorium terhadap hubungan dagang, investasi China ke AS, dan pembekuan perusahaan asuransi swasta China pada tanggal 5 Juni 1989.<sup>134</sup> Moratorium ini akhirnya dicabut oleh Presiden Bill Clinton pada tahun 2001. Presiden George Bush juga membebaskan embargo ekspor persenjataan AS kepada China dari tahun 1990-1994. AS juga secara eksplisit menolak proposal donasi China terhadap *World Bank* dan kredit IMF yang ditujukan untuk proyek-proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena bagi AS, China telah gagal memberikan kesejahteraan bahkan bagi rakyat di dalam negerinya sekalipun.

Hubungan antara AS-China semakin diperburuk ketika NATO meledakkan kedutaan China di Belgrade, Serbia pada tahun 1999. NATO mengkonfirmasi bahwa peristiwa itu terjadi karena unsur kesalahan intelijen mereka, namun China tidak menerima alasan ini dan menuduh bahwa pengeboman tersebut dilakukan secara sengaja dan atas dasar prakarsa AS.<sup>135</sup> Pasca serangan 9/11, normalisasi hubungan internasional China dan AS mulai tampak, terutama setelah China menawarkan dukungannya dan juga dukungan China di Dewan Keamanan PBB dalam resolusi 1373 mengenai penggelaran pasukan koalisi ke Afghanistan dalam misi *War on Terrorism*.<sup>136</sup>

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *US Bombing of Chinese Embassy: Implausible Blunder?*

[www.globalpolicy.org/component/content/article/.../38827.html](http://www.globalpolicy.org/component/content/article/.../38827.html). diakses pada 18 November 2010.

<sup>136</sup> *What Obama and China Disagree On*. Diakses dari

<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1939568,00.html?iid=sphere-inline-bottom> . pada 17 November 2010.

China bukan saja mendukung inisiatif AS, namun juga mendonasikan USD 150 juta untuk proyek rekonstruksi Afghanistan pasca jatuhnya Taliban.

Di kawasan Asia, AS cenderung akan mengungguli China dalam membangun pengaruh dan kekuatan, terutama di *ASEAN*. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, *pertama*, posisi China nampaknya tidak begitu menguntungkan secara geopolitik dan geostrategi untuk secara langsung menghadapi pertarungan dengan AS di *ASEAN*, di mana AS memiliki beberapa aliansi di kawasan tersebut. *Kedua*, AS dengan dukungan dari Australia dan bangkitnya kembali kekuatan angkatan bersenjata Jepang, telah menempatkan China dalam posisi yang tidak menguntungkan sebagai kekuatan pengimbang AS di kawasan Asia Tenggara.

AS juga menyadari bahwa “pertarungan” utama China di *ASEAN* bukan pada bidang pertahanan, melainkan di bidang ekonomi dan bisnis. Dengan mengenali kepentingan China yang lebih mementingkan lahan bisnisnya tetap terjaga di *ASEAN*, maka China tidak akan berani terlalu frontal menghadapi AS dalam pertarungan antar adidaya di kawasan *ASEAN*. Diprediksikan dalam jangka waktu dekat China tidak akan berani mengambil resiko melancarkan ofensif militer kepada AS, kecuali jika AS secara sepihak mengkooptasi Korea Utara.

Dalam konstalasi seperti itu, posisi strategis Indonesia maupun negara-negara *ASEAN* lainnya seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, sama sekali tidak dalam posisi sebagai pemain kunci yang ikut menentukan. Negara-negara ini hanya sekedar menjadi pion-pion pasif dari permainan catur global antara AS versus Cina. Sehingga pada gilirannya Indonesia dan negara-negara mitra *ASEAN* tak lebih hanya sekedar faktor pelengkap karena untuk skema penguasaan *ASEAN* dalam rangka melemahkan China, AS tetap mengandalkan Australia dan Jepang sebagai aktor-aktornya yang utama.

Hingga saat ini, belum ada kekuatan di *ASEAN* yang bisa menandingi AS. Bahkan Kamboja dan Vietnam yang di masa lalu merupakan negara-negara yang

berhasil “mempermalukan” Amerika pada sekitar 1975-1976, sekarang pun cenderung mengorbit ke AS melalui berbagai kerjasama bilateral. Apalagi jika dalam waktu dekat AS akan berhasil merangkul Myanmar melalui manuver *smart power* pemerintahan Presiden Obama.

Banyak klaim dilontarkan bahwa kebijakan luar negeri AS sudah semakin oportunis. Hal ini terlihat pada penerapan kebijakan luar negeri AS ke China, kendati politik domestik China adalah ancaman bagi misi demokratisasi AS, meski ada beberapa kepentingan AS dan China yang menciptakan interdependensi, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk menjadi mitra dialog dan kerja sama. Pertumbuhan pesat China secara ekonomi merupakan ancaman terhadap dominasi AS. Lebih penting lagi, hubungan kedua negara ini harus dilihat dari dimensi yang berbeda, yakni bahwa kedua negara adalah mitra dagang terbesar bagi satu sama lain dan memiliki kepentingan yang sama dalam mencegah dan memberantas terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. China memiliki 2 triliun dolar, dalam bentuk surat hutang AS, yang merupakan konsumsi China untuk mendanai paket stimulus AS bagi perusahaan di dalam negeri dalam rangka memperbaiki keadaan perekonomian domestik AS pada masa krisis.<sup>137</sup> Menteri Keuangan AS sebelumnya, Henry M. Paulson pernah mengindikasikan bahwa ketidakseimbangan struktural ini juga harus diperbaiki guna membantu AS keluar krisis finansial. Pada tanggal 23 Februari 2009, Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton berhasil mengunjungi China dan meyakinkan para petinggi China untuk memastikan bahwa pangsa pasar AS di China masih merupakan tempat aman bagi China untuk menanamkan investasi dan kedua belah pihak setuju untuk menggalakkan investasi dari negara masing-masing ke negara satu sama lain.<sup>138</sup> Meskipun China adalah pemegang hutang AS terbanyak saat ini, China dianggap sebagai juruselamat untuk memecah kebuntuan di dalam menyelesaikan krisis finansial global. Namun demikian, AS masih tetap berupaya untuk meminimalisir dominasi China di wilayah Asia Pasifik.

---

<sup>137</sup> C. Fred Bregsten, *A Partnership of Equals: How Washington Should Respond to China's Economic Challenge*, *Foreign Affairs* 88, (May/June 2009): hal 57.

<sup>138</sup> *A Special Report on China and America: A Message from Confucius*, diakses dari [http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story\\_id-14678507](http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id-14678507) pada 25 November 2010

## 4.2 PENURUNAN HEGEMONI AS DAN PENGUATAN PENGARUH CHINA DI ASIA PASIFIK

Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan menurunnya hegemoni AS berganti dengan menguatnya pengaruh China di Asia Pasifik antara lain:

### 4.2.1 Peristiwa Tiananmen pada 1989

Peristiwa demonstrasi mahasiswa di lapangan Tiananmen, yang berakhir dengan jatuhnya korban masyarakat sipil, dianggap AS dan internasional sebagai genosida. AS mengecam keras peristiwa tersebut dan mendesak China mengusut kembali kasus tersebut. Namun, reaksi *ASEAN* tidak seperti reaksi negara-negara barat. *ASEAN* menyikapi peristiwa tersebut dengan tidak berlebihan. Hal ini menarik perhatian China yang melihat *ASEAN* meski sedang didominasi oleh negara-negara barat namun tidak bisa sepenuhnya dikendalikan AS. Oleh sebab itu, China mulai melakukan pendekatan dan menanamkan pengaruhnya di wilayah *ASEAN*.

### 4.2.2 Krisis Ekonomi 1997-1998

China telah berperan besar dalam memberikan sumbangsih bagi kestabilan ekonomi di Indonesia dan negara-negara *ASEAN* lain, terutama saat masa krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998. Selain itu Cina rela menanggung defisit dalam mengadakan hubungan dagang dengan negara-negara *ASEAN*.

Peran besar China dalam menghadapi krisis tersebut adalah dengan mempertahankan nilai mata uangnya pada masa krisis sehingga krisis ekonomi yang melanda Asia tidak berlangsung berlarut larut. Pada era kepemimpinan Megawati, Deputy Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyatakan bahwa China selalu mengalami defisit perdagangan dengan negara *ASEAN*. Sikap ini membuat China terkesan seperti pahlawan bagi negara *ASEAN*, terutama karena pada saat krisis tersebut George Soros yang merupakan perlambang negara barat dijadikan kambing hitam.<sup>139</sup>

<sup>139</sup> Dalam <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0111/08/eko08.html>, diakses pada 2 Januari 2011.

#### 4.2.3 *ASEAN Plus Three*

Ide pembentukan *Asian Monetary fund (AMF)*. Ketika krisis melanda (pada 1997/1998), Jepang mengajukan pembentukan *Asian Monetary Fund (AMF)* sebagai bentuk solidaritas Asia karena negara-negara di Asia cenderung kehilangan kepercayaan terhadap kinerja *International Monetary Fund (IMF)* bentukan AS. Proposal ini tidak terlaksana, namun ditindaklanjuti dengan pertemuan antara *ASEAN* dan tiga negara yaitu Jepang, China, dan Korea Selatan yang menjadi embrio dari terbentuknya *ASEAN+3*. Ide pembentukan badan moneter lain selain *IMF*, yang digagas dan didukung oleh Jepang yang merupakan sekutu AS, merupakan indikasi penurunan kepercayaan yang signifikan kepada AS bahkan oleh sekutunya sendiri.

#### 4.2.4 *ASEAN China Free Trade Area*

*Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Bersediannya negara-negara *ASEAN* untuk membebaskan bea masuk bagi barang-barang produk China, yang jelas merugikan negara-negara *ASEAN* merupakan salah satu faktor yang memperlihatkan meluasnya pengaruh China. Dalam jangka panjang, kebangkitan ekonomi China menjadi ancaman sekaligus kesempatan bagi negara-negara *ASEAN*. Dengan adanya *ACFTA*, industri dalam negeri anggota *ASEAN* terancam gulung tikar apabila tidak mampu bersaing melawan China, namun demikian *ACFTA* tetap disepakati untuk mendapat kesempatan investasi China di negara-negara *ASEAN*.

### 4.3 FORECASTING SMART POWER AS KEPADA INDONESIA TERKAIT DENGAN MENGUATNYA PENGARUH CHINA

#### 4.3.1 Ancaman Smart Power AS

Pendekatan dengan metode *smart power* memang cenderung terlihat menguntungkan kedua belah pihak (*win/win solution*), namun tetap mengandung ancaman. Dalam hal ini, ancaman yang ditimbulkan dari pendekatan *smart power* AS sulit untuk diidentifikasi dan lebih berdampak pada jangka waktu yang panjang.

Kemitraan Komprehensif yang ditawarkan AS adalah bentuk nyata penggunaan *smart power* pemerintahan Obama. Tentu tujuannya adalah memperdalam pengaruh dan kontrol AS atas negara yang dijadikan sasaran *smart power* itu dalam hal ini adalah Indonesia. Menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis seharusnya dibaca sebagai upaya AS merangkul Indonesia sebagai 'sahabat' AS dalam memoderasi kesan hegemoninya.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa kedatangan Obama di Indonesia juga untuk kepentingan ekonomi AS. Kepentingan tersebut antara lain mengokohkan, melindungi, dan memperluas ekspansi perusahaan AS terutama di sektor strategis seperti energi (minyak, gas) dan pertambangan (emas) di Indonesia; menjadikan Indonesia sebagai pasar penting ekspor AS untuk membuka dan menggerakkan kembali ekonomi AS serta memperbanyak lapangan pekerjaan di Amerika; AS juga punya kepentingan untuk memenangkan pertarungan ekonomi AS yang baru melawan China di Asia Pasifik.

Sementara itu, krisis ekonomi yang melanda AS sejak beberapa tahun lalu, hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Pengangguran masih meningkat, biaya hidup yang di rasakan semakin berat bagi mayoritas rakyat AS dan kebijakan-kebijakan yang dianggap strategis dan obat jitu dari Obama untuk keluar secepatnya dari krisis juga tidak memberikan efek berarti. Maka berbagai langkah penyelamatan harus dilakukan, termasuk mencari bantuan dari Jepang bahkan ASEAN.

Selain itu, Indonesia juga perlu berhati-hati terhadap langkah baru AS karena perubahan yang terjadi hanyalah pada gaya dan cara pendekatan, sedangkan substansi yang menjadi tujuannya akan selalu sama, siapapun yang menjabat sebagai Presiden AS. Substansi tersebut yaitu kepentingan AS untuk tetap menjadi *world's government*, mengontrol negara-negara lain serta mengeksploitasi sumber dayanya demi kepentingan AS. Dalam kerangka *grand strategy* AS, Indonesia memiliki beberapa faktor yang menjadi pertimbangan AS untuk meningkatkan kerjasamanya, antara lain:

**Universitas Indonesia**

- a. Indonesia dianggap sebagai negara yang secara geografis sangat strategis bagi kepentingan AS. Maka Indonesia juga harus dimasukkan bagian dari mitra strategisnya dalam pemulihan ekonomi domestik AS. Dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial dari produk-produk AS, peningkatan ekspor menjadi salah satu bagian dari upaya AS.
- b. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, Indonesia adalah mitra yang tidak mungkin dikesampingkan terutama dalam upaya pemerintahan Barack Obama untuk menghapus citra kurang baik AS di kalangan negara-negara berpenduduk muslim dalam perang global melawan terorisme. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi jembatan strategis untuk membangun kepercayaan dan citra positif di dunia Islam.
- c. Kepentingan regional di kawasan Asia-Pasifik, AS melalui Obama harus memastikan sekutunya Australia bisa menjadi penopang atas dominasi AS di kawasan Asia-Pasifik dengan melibatkan Indonesia dan Jepang sebagai negara potensial dengan berbagai aspeknya. AS hendak menghentikan dominasi ekonomi China dan ekspansi pasar China di kawasan Asia-Pasifik, sekalipun di dalam negeri AS sendiri mengalami kesulitan yang berarti untuk menghentikan laju dan serbuan produk China yang berimplikasi kepada sektor industri AS. Selain itu AS tetap terus berusaha menjaga stabilitas keamanan dan memastikan isu Taiwan dan Korut dengan senjata nuklirnya dalam pengawasan dan kontrol penuh AS. Serta menempuh langkah yang signifikan untuk menekan China melalui gelar latihan militer dan peneguhan pangkalan militer AS di wilayah Jepang.

Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk (pendadakan strategis) dari permasalahan ini, Pemerintah Indonesia perlu melihat beberapa hal yang dapat menjadi ancaman maupun potensi ancaman di masa depan. *Pertama*, kerjasama bidang pendidikan terdapat dua hal pokok yang menjadi berpotensi mengancam kepentingan nasional bahkan kedaulatan NKRI yakni program beasiswa ke



universitas-universitas di AS dan pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan terutama kepada pesantren-pesantren. Pemberian beasiswa untuk belajar di universitas terkemuka AS dari lembaga-lembaga seperti *Fulbright* memang telah berlangsung sejak lama, dan saat ini, Pemerintahan Barack Obama mulai menggalakkan kembali program tersebut. Secara kasat mata, program beasiswa tersebut menguntungkan pelajar Indonesia yang berprestasi karena memberikan kesempatan belajar ke universitas terkemuka di AS secara gratis. Namun program tersebut memiliki ancaman yang besar dampaknya. Pelajar-pelajar Indonesia yang berprestasi tersebut secara akademik diubah pola pikirnya menjadi pola pikir barat dan pro Amerika. Ketika pola pikir berubah, Pemerintah AS juga dapat mengatur para penerima beasiswa tersebut di masa depan, terutama ketika para penerima beasiswa tersebut menjabat posisi penting dalam pemerintahan maupun swasta.

Begitu pula halnya dengan pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan di dalam negeri, terutama pesantren-pesantren. Melalui bantuan dan perlakuan khusus terhadap umat Muslim, AS mencoba mengangkat isu agama menjadi faktor pembeda dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan semakin maraknya usulan penegakan Syariat Islam di beberapa daerah, yang menimbulkan potensi disintegrasi bangsa. Kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi apabila tidak dilakukan penanganan yang baik, adalah terjadinya perang saudara, sesama bangsa Indonesia.

*Kedua*, di bidang ekonomi, kerjasama-kerjasama di bidang perdagangan dan investasi bahkan pembangunan pada akhirnya hanya ditujukan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk AS. Dengan peningkatan daya beli dari negara-negara Asia terhadap produk AS, maka lapangan kerja di AS akan bertambah, kemudian ekonomi AS akan semakin membaik. Hal ini tentu berbahaya bagi kelangsungan ekonomi negara karena akan merugikan industri domestik Indonesia.

*Ketiga*, di bidang sosial budaya, dengan hadirnya globalisasi, AS melakukan penetrasi budaya melalui LSM maupun program-program budaya seperti *VOA* sehingga mengubah pola pikir masyarakat yang kemudian memperlemah karakter bangsa Indonesia. Selain itu, dominasi kepentingan dengan memainkan isu-isu klasik, seperti penegakan HAM, sangat mungkin dilakukan oleh Obama terhadap Indonesia.

#### 4.3.2 *Assesment* : Kemampuan, Kerawanan dan Kemungkinan Cara Bertindak dari AS dan China

Dalam rangka memberikan saran tindak bagi *user* (dalam hal ini Presiden RI), intelijen harus memperhatikan kemampuan, kerawanan serta kemungkinan cara bertindak dari AS sebagai pokok bahasan penelitian ini dan China sebagai kompetitor AS dalam penanaman kekuasaan di wilayah Asia Pasifik. Ketiga komponen tersebut merupakan salah satu metode dalam analisis intelijen strategis, yang sesuai digunakan untuk topik ini.

Kekuatan AS terletak pada pengaruhnya kepada dunia, mengingat perannya sebagai *world's government*, militer yang kuat, memiliki banyak sekutu, memiliki banyak diplomat handal sehingga cenderung mampu memoderasi kesan hegemoninya di kawasan Asia Pasifik.

Kerawanan AS dilihat dari kondisi ekonomi dalam negerinya yang masih belum pulih dari *subprime mortgage crisis*. Oleh karena itulah AS membutuhkan Asia Pasifik sebagai tempat untuk menjual produknya sehingga perekonomian negaranya kembali normal.

Kemungkinan cara bertindak AS sangat ditentukan oleh garis besar kebijakan politik luar negerinya. Pendekatan *smart power* yang ditempuh Pemerintahan Barack Obama memungkinkan AS untuk dapat bertindak secara diplomasi maupun militer terhadap pihak-pihak yang dianggap menghalangi kepentingan nasionalnya. Meskipun demikian, hingga saat ini AS masih memilih untuk mengedepankan diplomasi dalam pencapaian kepentingannya. Sebagai

negara adidaya, AS dapat melakukan segalanya kepada negara kecil seperti Indonesia, namun AS menganggap Indonesia penting untuk dirangkul.

Di lain pihak, kemampuan China terletak pada pertumbuhan ekonominya yang luar biasa. Dengan kekuatan ekonomi, China mampu membuat negara-negara lain di dunia tunduk padanya. China juga mampu memproduksi barang-barang dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produksi dari industri lokal. Selain itu, China juga memiliki militer yang kuat dengan alokasi anggaran yang sangat besar.

Akan tetapi China juga memiliki kerawanan pada hubungannya dengan Taiwan, yang dapat dimanfaatkan oleh AS untuk meraih keuntungan pada keduanya. Selain itu, ideologi komunisnya menjadi kerawanan tersendiri mengingat AS sedang gencar-gencarnya menggalakkan demokrasi di dunia.

Oleh karena itu, kemungkinan cara bertindak China lebih ditujukan kepada upaya China untuk menguasai pasar Asia melalui *ACFTA* yang jelas merugikan industri domestik, terutama bagi industri skala kecil dan menengah yang ada di Indonesia.

#### 4.4 SARAN TINDAK UNTUK MENGHADAPI SMART POWER AS MAUPUN PENGARUH CHINA DI KAWASAN ASEAN

##### 4.4.1 Strategi Regional

Dalam konstelasi yang dipicu oleh persaingan global AS-China di kawasan Asia Tenggara sebagai *the battle ground*, maka kesediaan AS untuk menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* merupakan suatu isyarat bagi AS untuk kembali hadir sebagai kekuatan adidaya di kawasan Asia Tenggara. Pada tataran yang lebih rawan, *ASEAN* harus mengantisipasi kemungkinan semakin menajamnya persaingan pengaruh antara Jepang dan Cina. Karena dalam persaingan antara AS versus China di

Asia Tenggara, AS dipastikan akan mendorong Jepang sebagai kekuatan ekonomi adidaya di Asia Pasifik, untuk menghadapi kehadiran dan pengaruh China yang semakin menguat di negara-negara kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan latarbelakang semacam ini, adanya *TAC* yang memberi pintu masuk bagi AS untuk ikut serta dalam mengatasi berbagai masalah di kawasan *ASEAN*, maka pada perkembangannya justru akan memicu ketegangan baru di kawasan Asia Tenggara. Menindaklanjuti perkembangan ini, negara-negara *ASEAN* harus mengantisipasi kemungkinan ke arah itu, sehingga bisa memainkan peran strategis dalam kemungkinan pertarungan global baru di kawasan *ASEAN*. Karena itu, keseimbangan hubungan antara *AS-ASEAN-China*, patut menjadi suatu kondisi yang harus dipelihara.

Di lain pihak, gagasan *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* merupakan peluang bagi negara-negara *ASEAN* untuk mengembangkan ekonominya. Namun hal itu akan menjadi bumerang apabila dalam tubuh internal *ASEAN* masih belum memiliki kesatuan, terutama mengenai implementasi pasar tunggal. Apabila berjalan sesuai rencana, *ACFTA* akan lebih dulu terealisasi sebelum pasar tunggal *ASEAN*. Kondisi tersebut mencerminkan situasi yang kurang ideal, karena sistem ekonomi-politik *ASEAN* saat ini masih terpecah belah dan masih banyak diwarnai oleh friksi-friksi politik antar anggotanya. Dorongan untuk merealisasikan integrasi ekonomi regional semakin menguat, sebagai salah satu upaya untuk mencegah dominasi China di kawasan Asia Tenggara. Sifat perdagangan *ASEAN-China* yang bersifat non komplementer dan produk-produk China yang lebih kompetitif di pasar internasional dikhawatirkan dapat memperkuat pengaruh China di kawasan dan mengurangi daya tawar *ASEAN* di level internasional. Kurangnya *political will* negara-negara *ASEAN* untuk mewujudkan integrasi regional secara menyeluruh, serta ketidakhadiran institusi supranasional di *ASEAN*,

merupakan permasalahan utama yang menghambat kemajuan proses integrasi ekonomi.

Para anggota *ASEAN* menyadari bahwa untuk menghadapi sesama negara *ASEAN*, integrasi ekonomi mungkin tidak perlu menjadi prioritas utama, karena sifat perdagangan intra-kawasan yang bersifat non-komplementer. Namun dalam menghadapi China, negara-negara *ASEAN* tidak dapat berdiri sendiri. Banjir produk impor dari China sudah menjadi keseharian, bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya di kawasan. Pada dasarnya hubungan perdagangan yang saling kompetitif mengindikasikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dapat saling mensubstitusi satu sama lain.<sup>140</sup> Hal tersebut dapat pula berlaku dalam menganalisis hubungan perdagangan intra-*ASEAN* maupun *ASEAN-China*. Dalam menghadapi China pihak *ASEAN* juga perlu menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat dilaksanakan secara regional untuk menandingi kapabilitas dan produktivitas China. Menjawab tantangan tersebut, konsep *Regional Production Network (RPN)* perlu segera dikembangkan seiring dengan perkembangan wacana pasar tunggal *ASEAN*. *RPN* dapat meningkatkan produktivitas regional *ASEAN* melalui pembangunan jaringan produksi antar negara di kawasan dengan tetap melibatkan sektor UKM dan sektor usaha informal.

Dalam jangka pendek, persaingan kedua negara besar tersebut tidak akan memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kawasan Asia Pasifik, khususnya *ASEAN*. Kompetisi AS-China cenderung akan lebih menguntungkan negara-negara *ASEAN* apabila negara-negara *ASEAN* mampu untuk bekerjasama tanpa didikte dan tetap menjaga kepentingan nasionalnya masing-masing.

---

<sup>140</sup> Chi Hung Kwan. *The Effects of SARS on Asian Economies*. China in Transition, April 30, 2003. <http://www.rieti.go.jp/en/china/03050701.html> diakses pada 7 Februari 2010.

#### 4.4.2 Strategi Indonesia

Era globalisasi yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi sudah tidak dapat dibendung lagi. Berbagai negara, baik negara maju maupun Negara berkembang, sudah mulai bersiap-siap menghadapi situasi yang disebut sebagai *The Borderless World*. Kecenderungan ini mengakibatkan pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada satu orang pun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi. Sebagai implikasi langsung, perkembangan global yang demikian akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang dan mengingat sifat perekonomian Indonesia yang semakin terbuka.

Secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Selat Malaka. Sedangkan secara ekonomi, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Di samping itu, dengan jumlah penduduk lebih dari 243 juta jiwa, Indonesia adalah pasar potensial bagi produk-produk negara-negara industri.

Perhatian AS di kawasan Asia Tenggara sebenarnya bukan kepada Indonesia, melainkan lebih diarahkan untuk menghadapi semakin besarnya kekuatan China di berbagai bidang. AS memprediksikan China dapat menjadi negara yang paling berpengaruh setelah AS dalam 20 tahun ke depan. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia, dan negara-negara di Asia Tenggara, telah melakukan Perjanjian Perdagangan Bebas *ASEAN-China* pada tahun 2010.

AS saat ini tengah kewalahan akibat banjirnya produk China di pasar Asia. Perdagangan bebas yang dilakukan China dengan *ASEAN* meraih keuntungan perdagangan hingga USD 25 miliar setiap tahun. Selain kerugian perdagangan, AS juga memiliki kekhawatiran mengenai tingkat pengangguran di negaranya yang meningkat seiring hilangnya pasar produk Amerika di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, AS berusaha lebih keras

untuk menggarap pasar Asia. Pangsa pasar yang sangat besar di kawasan Asia Pasifik dapat menjadi penolong bagi masalah krisis perekonomiannya. Dalam kontes inilah, Indonesia dilihat AS sebagai negara yang memiliki posisi penting bagi kepentingan nasionalnya.

Maka terdapat beberapa agenda utama yang diusung dalam kunjungan Obama ke Indonesia, yaitu mendesak Indonesia memperbaiki iklim investasi, peningkatan kerja sama perdagangan Amerika-Indonesia, dan menawarkan forum kerja sama perdagangan regional Asia Pasifik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia memperhitungkan besaran untung-rugi kerja sama di bidang ekonomi dengan AS yang sudah terjalin selama ini.

Diperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia di tahun 2010 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 yang tentunya akan menyebabkan tekanan pada neraca transaksi berjalan yang selanjutnya akan menekan neraca pembayaran Indonesia. Proses pemulihan ekonomi global dikhawatirkan terhambat akibat melambatnya kegiatan ekonomi di AS, China dan Jepang. Perlambatan ekonomi di AS terutama disebabkan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi sehingga konsumsi rumah tangga masih lemah. Daya beli rumah tangga yang masih lemah tersebut menyebabkan kegiatan di sektor industri melambat.

Karenanya kedatangan Obama ke Indonesia dan beberapa negara Asia dapat dipastikan bukan semata-mata untuk kepentingan politik luar negerinya, tetapi justru karena adanya agenda untuk melakukan *rescheduling* berbagai transaksi ekonomi/perdagangan serta untuk memastikan agar perusahaan-perusahaannya tetap aman beroperasi di Asia Pasifik serta memoderasi kesan hegemoninya. Disamping itu kondisi perdagangan AS yang kian menurun daya saingnya dibandingkan dengan negara lain, khususnya negara China dan ASEAN, "memaksa" AS

menciptakan strategi baru agar negara-negara di Asia tetap setia untuk menjadi mitra-dagangnya.

Oleh karena itu, AS berkeinginan agar Indonesia masuk dalam blok ekonomi baru yang sedang disusun Gedung Putih. Blok baru dalam kerangka perdagangan bebas itu bernama *Trans Pacific Partnership (TPP)*. Saat ini, Indonesia masih mempertimbangkan tawaran AS tersebut. Gagasan atau isu yang diemban oleh AS adalah mengajak Indonesia untuk tetap membangun blok baru perdagangan bebas dengan delapan negara terpilih. Antara lain Indonesia, Singapura, Brunei, Vietnam, Australia, Selandia Baru, Chili dan Peru. Blok perdagangan bebas *Trans Pacific Partnership* ini akan menjadi bahan utama gerilya yang dilakukan Presiden Barack Obama.

Untuk itu, Indonesia harus segera mengambil keputusan untuk mengurangi berbagai kerjasama yang ditawarkan AS, baik dari transaksi perdagangan maupun dari penanaman modal asing melalui investasi-yang beresiko tinggi untuk jangka panjang. Apabila negara Indonesia mempunyai keberanian untuk mengurangi kerjasama yang beresiko tinggi, tentunya harus memulai dengan melakukan perdagangan yang dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri dan menaikkan jumlah lowongan bagi tenaga kerja Indonesia.

Di pihak lain, Indonesia perlu mencanangkan kembali program-program pendidikan yang menguatkan karakter bangsa. Pengangkatan topik keagamaan seharusnya tidak perlu dilakukan karena hanya semakin memperjelas batasan individu satu dengan lainnya. Pemerintah Indonesia perlu mendorong rakyat Indonesia untuk melepaskan identitas keagamaannya untuk kemudian menekankan pada identitas sebagai satu bangsa. Hal ini harus menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya konflik/perang saudara di masa depan..



Selain itu, kebangkitan China pada saat memasuki abad 21, merupakan sebuah fenomena dramatis dalam hubungan internasional kontemporer yang akan semakin mewarnai dinamika politik-ekonomi global dan regional dalam beberapa dekade mendatang. Implikasi kebangkitan China tersebut akan sangat besar pengaruhnya bagi tatanan regional di kawasan Asia Timur.

Oleh karena itu Indonesia-sebagai salah satu negara kawasan-berkepentingan untuk memiliki sebuah cetak biru strategis (*strategic blueprint*) yang memuat identifikasi kepentingan strategis Indonesia, cara kita dalam memposisikan China dan juga AS, memahami karakteristik dan implikasi kebangkitan China dan AS bagi arsitektur keamanan di kawasan, strategi serta kebijakan yang akan diambil dalam merespon perkembangan tersebut.

Salah satu perspektif yang berkembang di Indonesia terkait dengan kebangkitan dan peran strategis China dalam kerjasama Asia Timur, adalah pembahasan yang difokuskan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, apa visi dan kepentingan strategis Indonesia di Asia Timur. Kedua, bagaimana Indonesia memandang peran China dalam kaitannya dengan kepentingan strategis Indonesia tersebut. Ketiga, bagaimana memaksimalkan kemitraan strategis Indonesia-China untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi terwujudnya sebuah Asia Timur yang stabil, damai dan sejahtera.

Terkait dengan kerjasama kawasan dengan China, yakni *ACFTA*, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Indonesia, antara lain:

- a. Penguatan daya saing global meliputi penanganan isu-isu domestik meliputi: penataan lahan dan kawasan industri, pembenahan infrastruktur dan energi, pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya), membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang,

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dsbnya), pembenahan sistem logistik, perbaikan pelayanan publik, penyederhanaan peraturan dan peningkatan kapasitas ketenagakerjaan).

- b. Pengamanan pasar domestik melalui: (a) pengawasan di *border* dengan meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan *FTA*, menerapkan *Early Warning System* untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor, pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dari negara-negara mitra *FTA*, pengawasan awai terhadap kepatuhan SNI, label, ingridien, kadaluarsa, kesehatan, lingkungan, security dsb, penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO terhadap industri yang mengalami kerugian yang serius akibat tekanan impor dan penerapan instrumen anti *dumping* dan *countervailing duties* atas impor yang bersifat *unfair*, (b) peredaran barang di pasar lokal meliputi *task force* pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri dan kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia, dan (c) promosi penggunaan produksi dalam negeri dengan mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres Nomor 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri revisi Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah.
- c. Penguatan ekspor dengan penguatan peran perwakilan luar negeri, pengembangan *trading house*, promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor, pengawasan penggunaan SKA Indonesia, peningkatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendukung pembiayaan ekspor dan optimalisasi *trade financing*.
- d. Bimbingan yang berkesinambungan agar Usaha Kecil/Mandiri (UKM) dapat menerapkan manajemen stok yang lebih adaptif terhadap pasar dan differensiasi pasar yang memungkinkan terjadinya subsidi silang.

- e. Perlu dilakukan kajian yang berkelanjutan terhadap kondisi UKM yang lebih mendetail terhadap jenis dan variasi produk-produk pertanian dan industri kecil yang mempunyai peluang pasar yang besar dan dapat dilakukan secara spesifik di berbagai daerah.
- f. Perlu diberi peran yang lebih besar kepada *trading house* untuk melakukan penetrasi produk-produk UKM di berbagai negara *ASEAN* dan China yang dilaksanakan secara periodik, (misalnya selama satu bulan pada tiap-tiap negara).
- g. Perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas aparat pusat dan daerah dalam menata produk-produk yang dapat diproduksi UKM serta menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri.
- h. Perlu dipertimbangkan keterpaduan para gerakan koperasi yang mempunyai bidang usaha yang sama diantara negara kawasan *ASEAN* dan China (*Transnational Cooperative*), sehingga dapat membangun sinergitas guna menciptakan efisiensi sumberdaya yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat.

Bagi Indonesia, kawasan Asia Pasifik haruslah menjadi kawasan damai, stabil dan sejahtera, dimana ketiga nilai tersebut dicapai melalui kerjasama di antara negara-negara pemangku kepentingan (*stakeholder*). Stabilitas regional ini harus dicapai melalui cara pandang "*security with*" dan bukan melalui "*security from*." Indonesia menghendaki sebuah Asia Pasifik yang ditandai oleh pola-pola kerjasama antar negara sebagai *norms*, bukan sebagai *exception*. Pada saat yang sama, secara ideal Indonesia juga berharap kawasan ini tidak ditandai oleh keberadaan rivalitas antar negara yang permanen.

Dalam konteks keberadaan kekuatan-kekuatan besar dan implikasinya bagi perkembangan arsitektur regional di kawasan Asia Pasifik, kepentingan strategis Indonesia pada dasarnya adalah :

- (1) terbentuknya arsitektur regional yang tidak memaksa Indonesia untuk mengambil pilihan antara *bandwagoning* atau *balancing* di antara negara-negara besar ;

- (2) menjamin relevansi strategis Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) di mata semua negara besar di kawasan, dan
- (3) terbukanya peluang untuk memanfaatkan hubungan dengan negara-negara besar bagi kepentingan nasional Indonesia.

Sedangkan pada level taktis, yaitu untuk memastikan kemampuan Indonesia dalam menjamin tiga kepentingan strategis tersebut dalam 5-10 tahun mendatang, di mana Indonesia diharapkan dapat mengambil peran penting dan ikut dalam mempengaruhi bentuk arsitektur regional di masa mendatang. Bagi Indonesia, hakikat kebangkitan China juga sarat dengan ketidakpastian, di mana Indonesia juga menghadapi tantangan dari proses kebangkitan China ini. Hubungan Indonesia-China, meskipun belakangan ini mulai membaik, tetap diwarnai oleh berbagai komplikasi dan persoalan. Masa depan respon dan sikap Indonesia terhadap China juga akan ditentukan oleh kemauan China untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam hubungan bilateral kedua negara. Oleh karena itu penting bagi kedua negara untuk segera memanfaatkan hubungan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan Kemitraan Strategis yang telah ditandatangani pada 2005 yang lalu.

Kebijakan Indonesia sejak restorasi hubungan diplomatik pada 1990, adalah membangun hubungan dengan China melalui kerangka multilateral, khususnya dalam kerangka *ASEAN*. Sejak 1990 hingga 1998, sikap Indonesia ditandai dengan kehati-hatian. Pada saat negara-negara *ASEAN* lainnya giat membangun hubungan dengan China, Indonesia tidak secara aktif mengembangkan hubungan itu. Indonesia cenderung berhubungan dengan China melalui kerangka multilateral, baik melalui *ASEAN* maupun *ASEAN Regional Forum (ARF)*.

Bagi Indonesia, *ASEAN* adalah instrumen yang efektif dalam mengelola hubungan dengan China. *ARF* juga dilihat sebagai instrumen untuk memastikan bahwa China akan menghormati norma-norma hubungan antar negara. Dengan kata lain, tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menjamin bahwa China akan

terus memperkuat komitmen dan keterlibatannya dalam jejaring proses keamanan multilateral di kawasan.

Pendekatan demikian itu sudah saatnya untuk ditinjau ulang, karena baik *ASEAN* maupun *ARF* semakin berkurang relevansinya dalam menghadapi perkembangan geo-politik antar negara besar dewasa ini. Sebab apabila negara-negara besar tidak lagi yakin dengan kegunaan arsitektur berbasis *ASEAN*, maka besar kemungkinan mereka akan mempertimbangkan sebuah arsitektur regional baru yang dapat mengakomodasikan berbagai tantangan strategis yang lahir akibat terjadinya pergeseran kekuatan tersebut.

Pada saat yang sama, apabila arsitektur yang ada dianggap tidak lagi mampu menjawab tantangan krisis global dan regional, maka kebutuhan akan sebuah arsitektur regional baru juga akan semakin menonjol. Dan akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap *ASEAN* sebagai *manager of regional order* yang efektif, adalah bukan tidak mungkin akan muncul pengaturan-pengaturan regional baru (*new regional arrangements*) yang diprakarsai oleh negara-negara besar.

Kecenderungan ke arah itu sudah mulai terasa, dan diperkirakan akan semakin kuat dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang. Negara-negara Asia Timur Laut semakin serius membahas pentingnya sebuah institusi multilateral di kawasan tersebut, di mana hal itu terlihat dari gagasan untuk mentransformasikan *six party talk (SPT)* menjadi sebuah lembaga kerjasama regional yang lebih luas dan permanen. Tidak tertutup kemungkinan juga bahwa negara-negara besar akan terdorong untuk membangun sebuah *concert of powers* di kawasan, dalam rangka mengatur hubungan di antara mereka dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan mereka. Untuk mempertahankan sentralitas strategis dan diplomatik Indonesia di masa mendatang, maka diperlukan suatu reposisi strategis Indonesia di kawasan Asia-Pasifik.

## BAB 5

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di muka, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, terjadi perubahan pendekatan diplomasi pada AS dari *hard power* menjadi *smart power* semenjak terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden AS. AS yang bertindak sebagai *world's government* berupaya memoderasi kesan hegemoninya di Asia Pasifik, melalui Indonesia.

*Kedua*, hubungan AS-China merupakan sebuah hubungan antar negara non-aliansi, yang menciptakan kerjasama sekaligus kompetisi di antara keduanya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi China dan meningkatnya anggaran militer negara tersebut, menjadikannya suatu ancaman baru bagi AS. Selain itu, China yang juga mulai mendominasi pasar Asia menjadi alasan utama AS untuk mulai melakukan pendekatan bilateral sekaligus multilateral melalui kemitraan komprehensif pada kawasan *ASEAN*, antara lain di bidang perdagangan dan investasi, pendidikan, lingkungan hidup dan perubahan iklim, pertanian, energi dan keamanan.

*Ketiga*, guna membendung pengaruh China, AS berupaya memperkokoh aliansinya dan membangun kemitraan baru dengan negara-negara *ASEAN* khususnya, Asia Pasifik pada umumnya. Kerjasama-kerjasama yang dibangun AS, khususnya di bidang ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di negara-negara Asia Pasifik terhadap produk-produk buatan AS. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya AS meningkatkan lapangan kerja di negaranya setelah krisis finansial pada 2008.

*Keempat*, bagi AS, Indonesia memiliki nilai strategis di kawasan Asia Pasifik, baik secara geografis, sistem pemerintahannya yang demokratis, pangsa pasar yang baik dan sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Dengan menggunakan kedekatan psikologis Obama, yang pernah menghabiskan masa

kecil di Jakarta, AS melakukan pendekatan *smart powernya* untuk kemudian masuk ke kawasan Asia Pasifik.

*Kelima*, hubungan AS-China dalam beberapa waktu ke depan, lebih ditekankan dan diarahkan pada pembangunan ekonomi kedua negara, akan tetapi China masih tetap tidak menghendaki adanya intervensi AS dalam segala hal pada kepentingan dalam negeri China, terutama mengenai masalah Taiwan.

*Keenam*, kerjasama-kerjasama antara AS maupun China dengan *ASEAN (TAC, ASEAN+3, ARF, maupun AFTA)* menjadi peluang sekaligus ancaman bagi negara-negara *ASEAN* untuk lebih meningkatkan nilai kompetitifnya masing-masing. Belum adanya kesatuan sistem ekonomi-politik dalam tubuh *ASEAN* akan menjadi kelemahan bagi kawasan, yakni mengurangi daya tawar *ASEAN* di level internasional.

*Ketujuh*, masa depan *ASEAN* lebih ditentukan oleh kepiawaian organisasi kawasan tersebut dalam mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari kerjasama dengan AS dan China sebagai bentuk kebijakan penyeimbang kekuatan besar dunia di kawasan Asia Tenggara dengan tetap menjaga hubungan baik antara keduanya

*Kedelapan*, kesempatan Indonesia untuk meraih kesuksesan dari liberalisasi perdagangan di level *regional*, akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam meningkatkan daya saing sektor usaha domestik, terutama kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).

## **Lampiran 1. Remarks By The President On a New Beginning**

June 4, 2009

Cairo University  
Cairo, Egypt 1:10 P.M. (Local)

PRESIDENT OBAMA: Thank you very much. Good afternoon. I am honored to be in the timeless city of Cairo, and to be hosted by two remarkable institutions. For over a thousand years, Al-Azhar has stood as a beacon of Islamic learning; and for over a century, Cairo University has been a source of Egypt's advancement. And together, you represent the harmony between tradition and progress. I'm grateful for your hospitality, and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people, and a greeting of peace from Muslim communities in my country: Assalaamu alaykum. (Applause.)

We meet at a time of great tension between the United States and Muslims around the world -- tension rooted in historical forces that go beyond any current policy debate. The relationship between Islam and the West includes centuries of coexistence and cooperation, but also conflict and religious wars. More recently, tension has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many Muslims, and a Cold War in which Muslim-majority countries were too often treated as proxies without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change brought by modernity and globalization led many Muslims to view the West as hostile to the traditions of Islam.

Violent extremists have exploited these tensions in a small but potent minority of Muslims. The attacks of September 11, 2001 and the continued efforts of these extremists to engage in violence against civilians has led some in my country to view Islam as inevitably hostile not only to America and Western countries, but also to human rights. All this has bred more fear and more mistrust.

So long as our relationship is defined by our differences, we will empower those who sow hatred rather than peace, those who promote conflict rather than the cooperation that can help all of our people achieve justice and prosperity. And this cycle of suspicion and discord must end.

I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world, one based on mutual interest and mutual respect, and one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap, and share common principles -- principles of justice and progress; tolerance and the dignity of all human beings.

I do so recognizing that change cannot happen overnight. I know there's been a lot of publicity about this speech, but no single speech can eradicate years of mistrust, nor can I answer in the time that I have this afternoon all the complex questions that brought us to this point. But I am convinced that in order to move forward, we must say openly to each other the things we hold in our hearts and that too often are said only behind closed doors. There must be a sustained effort



to listen to each other; to learn from each other; to respect one another; and to seek common ground. As the Holy Koran tells us, "Be conscious of God and speak always the truth." (Applause.) That is what I will try to do today -- to speak the truth as best I can, humbled by the task before us, and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.

Now part of this conviction is rooted in my own experience. I'm a Christian, but my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As a boy, I spent several years in Indonesia and heard the call of the azaan at the break of dawn and at the fall of dusk. As a young man, I worked in Chicago communities where many found dignity and peace in their Muslim faith.

As a student of history, I also know civilization's debt to Islam. It was Islam -- at places like Al-Azhar -- that carried the light of learning through so many centuries, paving the way for Europe's Renaissance and Enlightenment. It was innovation in Muslim communities -- (applause) -- it was innovation in Muslim communities that developed the order of algebra; our magnetic compass and tools of navigation; our mastery of pens and printing; our understanding of how disease spreads and how it can be healed. Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires; timeless poetry and cherished music; elegant calligraphy and places of peaceful contemplation. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality. (Applause.)

I also know that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognize my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second President, John Adams, wrote, "The United States has in itself no character of enmity against the laws, religion or tranquility of Muslims." And since our founding, American Muslims have enriched the United States. They have fought in our wars, they have served in our government, they have stood for civil rights, they have started businesses, they have taught at our universities, they've excelled in our sports arenas, they've won Nobel Prizes, built our tallest building, and lit the Olympic Torch. And when the first Muslim American was recently elected to Congress, he took the oath to defend our Constitution using the same Holy Koran that one of our Founding Fathers -- Thomas Jefferson -- kept in his personal library. (Applause.)

So I have known Islam on three continents before coming to the region where it was first revealed. That experience guides my conviction that partnership between America and Islam must be based on what Islam is, not what it isn't. And I consider it part of my responsibility as President of the United States to fight against negative stereotypes of Islam wherever they appear. (Applause.)

But that same principle must apply to Muslim perceptions of America. (Applause.) Just as Muslims do not fit a crude stereotype, America is not the crude stereotype of a self-interested empire. The United States has been one of the greatest sources of progress that the world has ever known. We were born out of revolution against an empire. We were founded upon the ideal that all are created equal, and we have shed blood and struggled for centuries to give meaning to those words -- within our borders, and around the world. We are shaped by every culture, drawn from every end of the Earth, and dedicated to a simple concept: *E pluribus unum* -- "Out of many, one."

Now, much has been made of the fact that an African American with the name Barack Hussein Obama could be elected President. (Applause.) But my personal story is not so unique. The dream of opportunity for all people has not come true for everyone in America, but its promise exists for all who come to our shores -- and that includes nearly 7 million American Muslims in our country today who, by the way, enjoy incomes and educational levels that are higher than the American average. (Applause.)

Moreover, freedom in America is indivisible from the freedom to practice one's religion. That is why there is a mosque in every state in our union, and over 1,200 mosques within our borders. That's why the United States government has gone to court to protect the right of women and girls to wear the hijab and to punish those who would deny it. (Applause.)

So let there be no doubt: Islam is a part of America. And I believe that America holds within her the truth that regardless of race, religion, or station in life, all of us share common aspirations -- to live in peace and security; to get an education and to work with dignity; to love our families, our communities, and our God. These things we share. This is the hope of all humanity.

Of course, recognizing our common humanity is only the beginning of our task. Words alone cannot meet the needs of our people. These needs will be met only if we act boldly in the years ahead; and if we understand that the challenges we face are shared, and our failure to meet them will hurt us all.

For we have learned from recent experience that when a financial system weakens in one country, prosperity is hurt everywhere. When a new flu infects one human being, all are at risk. When one nation pursues a nuclear weapon, the risk of nuclear attack rises for all nations. When violent extremists operate in one stretch of mountains, people are endangered across an ocean. When innocents in Bosnia and Darfur are slaughtered, that is a stain on our collective conscience. (Applause.) That is what it means to share this world in the 21st century. That is the responsibility we have to one another as human beings.

And this is a difficult responsibility to embrace. For human history has often been a record of nations and tribes -- and, yes, religions -- subjugating one another in pursuit of their own interests. Yet in this new age, such attitudes are self-defeating. Given our interdependence, any world order that elevates one nation or group of people over another will inevitably fail. So whatever we think of the past, we must not be prisoners to it. Our problems must be dealt with through partnership; our progress must be shared. (Applause.)

Now, that does not mean we should ignore sources of tension. Indeed, it suggests the opposite: We must face these tensions squarely. And so in that spirit, let me speak as clearly and as plainly as I can about some specific issues that I believe we must finally confront together.

The first issue that we have to confront is violent extremism in all of its forms.

In Ankara, I made clear that America is not -- and never will be -- at war with Islam. (Applause.) We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security -- because we reject the same thing that people of all faiths reject: the killing of innocent men, women, and children. And it is my first duty as President to protect the American people.

The situation in Afghanistan demonstrates America's goals, and our need to work together. Over seven years ago, the United States pursued al Qaeda and the

Taliban with broad international support. We did not go by choice; we went because of necessity. I'm aware that there's still some who would question or even justify the events of 9/11. But let us be clear: Al Qaeda killed nearly 3,000 people on that day. The victims were innocent men, women and children from America and many other nations who had done nothing to harm anybody. And yet al Qaeda chose to ruthlessly murder these people, claimed credit for the attack, and even now states their determination to kill on a massive scale. They have affiliates in many countries and are trying to expand their reach. These are not opinions to be debated; these are facts to be dealt with.

Now, make no mistake: We do not want to keep our troops in Afghanistan. We see no military -- we seek no military bases there. It is agonizing for America to lose our young men and women. It is costly and politically difficult to continue this conflict. We would gladly bring every single one of our troops home if we could be confident that there were not violent extremists in Afghanistan and now Pakistan determined to kill as many Americans as they possibly can. But that is not yet the case.

And that's why we're partnering with a coalition of 46 countries. And despite the costs involved, America's commitment will not weaken. Indeed, none of us should tolerate these extremists. They have killed in many countries. They have killed people of different faiths -- but more than any other, they have killed Muslims. Their actions are irreconcilable with the rights of human beings, the progress of nations, and with Islam. The Holy Koran teaches that whoever kills an innocent is as -- it is as if he has killed all mankind. (Applause.) And the Holy Koran also says whoever saves a person, it is as if he has saved all mankind. (Applause.) The enduring faith of over a billion people is so much bigger than the narrow hatred of a few. Islam is not part of the problem in combating violent extremism -- it is an important part of promoting peace.

Now, we also know that military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan and Pakistan. That's why we plan to invest \$1.5 billion each year over the next five years to partner with Pakistanis to build schools and hospitals, roads and businesses, and hundreds of millions to help those who've been displaced. That's why we are providing more than \$2.8 billion to help Afghans develop their economy and deliver services that people depend on.

Let me also address the issue of Iraq. Unlike Afghanistan, Iraq was a war of choice that provoked strong differences in my country and around the world. Although I believe that the Iraqi people are ultimately better off without the tyranny of Saddam Hussein, I also believe that events in Iraq have reminded America of the need to use diplomacy and build international consensus to resolve our problems whenever possible. (Applause.) Indeed, we can recall the words of Thomas Jefferson, who said: "I hope that our wisdom will grow with our power, and teach us that the less we use our power the greater it will be."

Today, America has a dual responsibility: to help Iraq forge a better future -- and to leave Iraq to Iraqis. And I have made it clear to the Iraqi people -- (applause) -- I have made it clear to the Iraqi people that we pursue no bases, and no claim on their territory or resources. Iraq's sovereignty is its own. And that's why I ordered the removal of our combat brigades by next August. That is why we will honor our agreement with Iraq's democratically elected government to remove combat troops from Iraqi cities by July, and to remove all of our troops from Iraq by

2012. (Applause.) We will help Iraq train its security forces and develop its economy. But we will support a secure and united Iraq as a partner, and never as a patron.

And finally, just as America can never tolerate violence by extremists, we must never alter or forget our principles. Nine-eleven was an enormous trauma to our country. The fear and anger that it provoked was understandable, but in some cases, it led us to act contrary to our traditions and our ideals. We are taking concrete actions to change course. I have unequivocally prohibited the use of torture by the United States, and I have ordered the prison at Guantanamo Bay closed by early next year. (Applause.)

So America will defend itself, respectful of the sovereignty of nations and the rule of law. And we will do so in partnership with Muslim communities which are also threatened. The sooner the extremists are isolated and unwelcome in Muslim communities, the sooner we will all be safer.

The second major source of tension that we need to discuss is the situation between Israelis, Palestinians and the Arab world.

America's strong bonds with Israel are well known. This bond is unbreakable. It is based upon cultural and historical ties, and the recognition that the aspiration for a Jewish homeland is rooted in a tragic history that cannot be denied.

Around the world, the Jewish people were persecuted for centuries, and anti-Semitism in Europe culminated in an unprecedented Holocaust. Tomorrow, I will visit Buchenwald, which was part of a network of camps where Jews were enslaved, tortured, shot and gassed to death by the Third Reich. Six million Jews were killed -- more than the entire Jewish population of Israel today. Denying that fact is baseless, it is ignorant, and it is hateful. Threatening Israel with destruction -- or repeating vile stereotypes about Jews -- is deeply wrong, and only serves to evoke in the minds of Israelis this most painful of memories while preventing the peace that the people of this region deserve.

On the other hand, it is also undeniable that the Palestinian people -- Muslims and Christians -- have suffered in pursuit of a homeland. For more than 60 years they've endured the pain of dislocation. Many wait in refugee camps in the West Bank, Gaza, and neighboring lands for a life of peace and security that they have never been able to lead. They endure the daily humiliations -- large and small -- that come with occupation. So let there be no doubt: The situation for the Palestinian people is intolerable. And America will not turn our backs on the legitimate Palestinian aspiration for dignity, opportunity, and a state of their own. (Applause.)

For decades then, there has been a stalemate: two peoples with legitimate aspirations, each with a painful history that makes compromise elusive. It's easy to point fingers -- for Palestinians to point to the displacement brought about by Israel's founding, and for Israelis to point to the constant hostility and attacks throughout its history from within its borders as well as beyond. But if we see this conflict only from one side or the other, then we will be blind to the truth: The only resolution is for the aspirations of both sides to be met through two states, where Israelis and Palestinians each live in peace and security. (Applause.)

That is in Israel's interest, Palestine's interest, America's interest, and the world's interest. And that is why I intend to personally pursue this outcome with all the patience and dedication that the task requires. (Applause.) The obligations -- the

obligations that the parties have agreed to under the road map are clear. For peace to come, it is time for them -- and all of us -- to live up to our responsibilities. Palestinians must abandon violence. Resistance through violence and killing is wrong and it does not succeed. For centuries, black people in America suffered the lash of the whip as slaves and the humiliation of segregation. But it was not violence that won full and equal rights. It was a peaceful and determined insistence upon the ideals at the center of America's founding. This same story can be told by people from South Africa to South Asia; from Eastern Europe to Indonesia. It's a story with a simple truth: that violence is a dead end. It is a sign neither of courage nor power to shoot rockets at sleeping children, or to blow up old women on a bus. That's not how moral authority is claimed; that's how it is surrendered.

Now is the time for Palestinians to focus on what they can build. The Palestinian Authority must develop its capacity to govern, with institutions that serve the needs of its people. Hamas does have support among some Palestinians, but they also have to recognize they have responsibilities. To play a role in fulfilling Palestinian aspirations, to unify the Palestinian people, Hamas must put an end to violence, recognize past agreements, recognize Israel's right to exist.

At the same time, Israelis must acknowledge that just as Israel's right to exist cannot be denied, neither can Palestine's. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. (Applause.) This construction violates previous agreements and undermines efforts to achieve peace. It is time for these settlements to stop. (Applause.)

And Israel must also live up to its obligation to ensure that Palestinians can live and work and develop their society. Just as it devastates Palestinian families, the continuing humanitarian crisis in Gaza does not serve Israel's security; neither does the continuing lack of opportunity in the West Bank. Progress in the daily lives of the Palestinian people must be a critical part of a road to peace, and Israel must take concrete steps to enable such progress.

And finally, the Arab states must recognize that the Arab Peace Initiative was an important beginning, but not the end of their responsibilities. The Arab-Israeli conflict should no longer be used to distract the people of Arab nations from other problems. Instead, it must be a cause for action to help the Palestinian people develop the institutions that will sustain their state, to recognize Israel's legitimacy, and to choose progress over a self-defeating focus on the past.

America will align our policies with those who pursue peace, and we will say in public what we say in private to Israelis and Palestinians and Arabs. (Applause.)

We cannot impose peace. But privately, many Muslims recognize that Israel will not go away. Likewise, many Israelis recognize the need for a Palestinian state. It is time for us to act on what everyone knows to be true.

Too many tears have been shed. Too much blood has been shed. All of us have a responsibility to work for the day when the mothers of Israelis and Palestinians can see their children grow up without fear; when the Holy Land of the three great faiths is the place of peace that God intended it to be; when Jerusalem is a secure and lasting home for Jews and Christians and Muslims, and a place for all of the children of Abraham to mingle peacefully together as in the story of Isra -- (applause) -- as in the story of Isra, when Moses, Jesus, and Mohammed, peace be upon them, joined in prayer. (Applause.)

The third source of tension is our shared interest in the rights and responsibilities of nations on nuclear weapons.

This issue has been a source of tension between the United States and the Islamic Republic of Iran. For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country, and there is in fact a tumultuous history between us. In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. Since the Islamic Revolution, Iran has played a role in acts of hostage-taking and violence against U.S. troops and civilians. This history is well known. Rather than remain trapped in the past, I've made it clear to Iran's leaders and people that my country is prepared to move forward. The question now is not what Iran is against, but rather what future it wants to build.

I recognize it will be hard to overcome decades of mistrust, but we will proceed with courage, rectitude, and resolve. There will be many issues to discuss between our two countries, and we are willing to move forward without preconditions on the basis of mutual respect. But it is clear to all concerned that when it comes to nuclear weapons, we have reached a decisive point. This is not simply about America's interests. It's about preventing a nuclear arms race in the Middle East that could lead this region and the world down a hugely dangerous path.

I understand those who protest that some countries have weapons that others do not. No single nation should pick and choose which nation holds nuclear weapons. And that's why I strongly reaffirmed America's commitment to seek a world in which no nations hold nuclear weapons. (Applause.) And any nation -- including Iran -- should have the right to access peaceful nuclear power if it complies with its responsibilities under the nuclear Non-Proliferation Treaty. That commitment is at the core of the treaty, and it must be kept for all who fully abide by it. And I'm hopeful that all countries in the region can share in this goal. The fourth issue that I will address is democracy. (Applause.)

I know -- I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years, and much of this controversy is connected to the war in Iraq. So let me be clear: No system of government can or should be imposed by one nation by any other.

That does not lessen my commitment, however, to governments that reflect the will of the people. Each nation gives life to this principle in its own way, grounded in the traditions of its own people. America does not presume to know what is best for everyone, just as we would not presume to pick the outcome of a peaceful election. But I do have an unyielding belief that all people yearn for certain things: the ability to speak your mind and have a say in how you are governed; confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that is transparent and doesn't steal from the people; the freedom to live as you choose. These are not just American ideas; they are human rights. And that is why we will support them everywhere. (Applause.)

Now, there is no straight line to realize this promise. But this much is clear: Governments that protect these rights are ultimately more stable, successful and secure. Suppressing ideas never succeeds in making them go away. America respects the right of all peaceful and law-abiding voices to be heard around the

world, even if we disagree with them. And we will welcome all elected, peaceful governments -- provided they govern with respect for all their people. This last point is important because there are some who advocate for democracy only when they're out of power; once in power, they are ruthless in suppressing the rights of others. (Applause.) So no matter where it takes hold, government of the people and by the people sets a single standard for all who would hold power: You must maintain your power through consent, not coercion; you must respect the rights of minorities, and participate with a spirit of tolerance and compromise; you must place the interests of your people and the legitimate workings of the political process above your party. Without these ingredients, elections alone do not make true democracy.

AUDIENCE MEMBER: Barack Obama, we love you!

PRESIDENT OBAMA: Thank you. (Applause.) The fifth issue that we must address together is religious freedom.

Islam has a proud tradition of tolerance. We see it in the history of Andalusia and Cordoba during the Inquisition. I saw it firsthand as a child in Indonesia, where devout Christians worshiped freely in an overwhelmingly Muslim country. That is the spirit we need today. People in every country should be free to choose and live their faith based upon the persuasion of the mind and the heart and the soul. This tolerance is essential for religion to thrive, but it's being challenged in many different ways.

Among some Muslims, there's a disturbing tendency to measure one's own faith by the rejection of somebody else's faith. The richness of religious diversity must be upheld -- whether it is for Maronites in Lebanon or the Copts in Egypt. (Applause.) And if we are being honest, fault lines must be closed among Muslims, as well, as the divisions between Sunni and Shia have led to tragic violence, particularly in Iraq.

Freedom of religion is central to the ability of peoples to live together. We must always examine the ways in which we protect it. For instance, in the United States, rules on charitable giving have made it harder for Muslims to fulfill their religious obligation. That's why I'm committed to working with American Muslims to ensure that they can fulfill zakat.

Likewise, it is important for Western countries to avoid impeding Muslim citizens from practicing religion as they see fit -- for instance, by dictating what clothes a Muslim woman should wear. We can't disguise hostility towards any religion behind the pretence of liberalism.

In fact, faith should bring us together. And that's why we're forging service projects in America to bring together Christians, Muslims, and Jews. That's why we welcome efforts like Saudi Arabian King Abdullah's interfaith dialogue and Turkey's leadership in the Alliance of Civilizations. Around the world, we can turn dialogue into interfaith service, so bridges between peoples lead to action -- whether it is combating malaria in Africa, or providing relief after a natural disaster.

The sixth issue -- the sixth issue that I want to address is women's rights. (Applause.) I know -- I know -- and you can tell from this audience, that there is a healthy debate about this issue. I reject the view of some in the West that a woman who chooses to cover her hair is somehow less equal, but I do believe that a woman who is denied an education is denied equality. (Applause.) And it is no

coincidence that countries where women are well educated are far more likely to be prosperous.

Now, let me be clear: Issues of women's equality are by no means simply an issue for Islam. In Turkey, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, we've seen Muslim-majority countries elect a woman to lead. Meanwhile, the struggle for women's equality continues in many aspects of American life, and in countries around the world.

I am convinced that our daughters can contribute just as much to society as our sons. (Applause.) Our common prosperity will be advanced by allowing all humanity -- men and women -- to reach their full potential. I do not believe that women must make the same choices as men in order to be equal, and I respect those women who choose to live their lives in traditional roles. But it should be their choice. And that is why the United States will partner with any Muslim-majority country to support expanded literacy for girls, and to help young women pursue employment through micro-financing that helps people live their dreams. (Applause.)

Finally, I want to discuss economic development and opportunity.

I know that for many, the face of globalization is contradictory. The Internet and television can bring knowledge and information, but also offensive sexuality and mindless violence into the home. Trade can bring new wealth and opportunities, but also huge disruptions and change in communities. In all nations -- including America -- this change can bring fear. Fear that because of modernity we lose control over our economic choices, our politics, and most importantly our identities -- those things we most cherish about our communities, our families, our traditions, and our faith.

But I also know that human progress cannot be denied. There need not be contradictions between development and tradition. Countries like Japan and South Korea grew their economies enormously while maintaining distinct cultures. The same is true for the astonishing progress within Muslim-majority countries from Kuala Lumpur to Dubai. In ancient times and in our times, Muslim communities have been at the forefront of innovation and education.

And this is important because no development strategy can be based only upon what comes out of the ground, nor can it be sustained while young people are out of work. Many Gulf states have enjoyed great wealth as a consequence of oil, and some are beginning to focus it on broader development. But all of us must recognize that education and innovation will be the currency of the 21st century -- (applause) -- and in too many Muslim communities, there remains underinvestment in these areas. I'm emphasizing such investment within my own country. And while America in the past has focused on oil and gas when it comes to this part of the world, we now seek a broader engagement.

On education, we will expand exchange programs, and increase scholarships, like the one that brought my father to America. (Applause.) At the same time, we will encourage more Americans to study in Muslim communities. And we will match promising Muslim students with internships in America; invest in online learning for teachers and children around the world; and create a new online network, so a young person in Kansas can communicate instantly with a young person in Cairo. On economic development, we will create a new corps of business volunteers to partner with counterparts in Muslim-majority countries. And I will host a Summit



on Entrepreneurship this year to identify how we can deepen ties between business leaders, foundations and social entrepreneurs in the United States and Muslim communities around the world.

On science and technology, we will launch a new fund to support technological development in Muslim-majority countries, and to help transfer ideas to the marketplace so they can create more jobs. We'll open centers of scientific excellence in Africa, the Middle East and Southeast Asia, and appoint new science envoys to collaborate on programs that develop new sources of energy, create green jobs, digitize records, clean water, grow new crops. Today I'm announcing a new global effort with the Organization of the Islamic Conference to eradicate polio. And we will also expand partnerships with Muslim communities to promote child and maternal health.

All these things must be done in partnership. Americans are ready to join with citizens and governments; community organizations, religious leaders, and businesses in Muslim communities around the world to help our people pursue a better life.

The issues that I have described will not be easy to address. But we have a responsibility to join together on behalf of the world that we seek -- a world where extremists no longer threaten our people, and American troops have come home; a world where Israelis and Palestinians are each secure in a state of their own, and nuclear energy is used for peaceful purposes; a world where governments serve their citizens, and the rights of all God's children are respected. Those are mutual interests. That is the world we seek. But we can only achieve it together.

I know there are many -- Muslim and non-Muslim -- who question whether we can forge this new beginning. Some are eager to stoke the flames of division, and to stand in the way of progress. Some suggest that it isn't worth the effort -- that we are fated to disagree, and civilizations are doomed to clash. Many more are simply skeptical that real change can occur. There's so much fear, so much mistrust that has built up over the years. But if we choose to be bound by the past, we will never move forward. And I want to particularly say this to young people of every faith, in every country -- you, more than anyone, have the ability to reimagine the world, to remake this world.

All of us share this world for but a brief moment in time. The question is whether we spend that time focused on what pushes us apart, or whether we commit ourselves to an effort -- a sustained effort -- to find common ground, to focus on the future we seek for our children, and to respect the dignity of all human beings. It's easier to start wars than to end them. It's easier to blame others than to look inward. It's easier to see what is different about someone than to find the things we share. But we should choose the right path, not just the easy path. There's one rule that lies at the heart of every religion -- that we do unto others as we would have them do unto us. (Applause.) This truth transcends nations and peoples -- a belief that isn't new; that isn't black or white or brown; that isn't Christian or Muslim or Jew. It's a belief that pulsed in the cradle of civilization, and that still beats in the hearts of billions around the world. It's a faith in other people, and it's what brought me here today.

We have the power to make the world we seek, but only if we have the courage to make a new beginning, keeping in mind what has been written.

The Holy Koran tells us: "O mankind! We have created you male and a female; and we have made you into nations and tribes so that you may know one another."  
The Talmud tells us: "The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace."

The Holy Bible tells us: "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." (Applause.)

The people of the world can live together in peace. We know that is God's vision. Now that must be our work here on Earth.

Thank you. And may God's peace be upon you. Thank you very much. Thank you. (Applause.)

END

2:05 P.M. (Local)

###



**Lampiran 2 Remarks by the President at the University of Indonesia in  
Jakarta, Indonesia**

November 10, 2010

University of Indonesia Jakarta, Indonesia

9:30 A.M. WIB

THE PRESIDENT: *Terima kasih. Terima kasih*, thank you so much, thank you, everybody. *Selamat pagi*. (Applause.) It is wonderful to be here at the University of Indonesia. To the faculty and the staff and the students, and to Dr. Gumilar Rusliwa Somantri, thank you so much for your hospitality. (Applause.)

*Assalamualaikum dan salam sejahtera*. Thank you for this wonderful welcome. Thank you to the people of Jakarta and thank you to the people of Indonesia.

*Pulang kampung nih*. (Applause.) I am so glad that I made it back to Indonesia and that Michelle was able to join me. We had a couple of false starts this year, but I was determined to visit a country that's meant so much to me. And unfortunately, this visit is too short, but I look forward to coming back a year from now when Indonesia hosts the East Asia Summit. (Applause.)

Before I go any further, I want to say that our thoughts and prayers are with all of those Indonesians who are affected by the recent tsunami and the volcanic eruptions -- particularly those who've lost loved ones, and those who've been displaced. And I want you all to know that as always, the United States stands with Indonesia in responding to natural disasters, and we are pleased to be able to help as needed. As neighbors help neighbors and families take in the displaced, I know that the strength and the resilience of the Indonesian people will pull you through once more.

Let me begin with a simple statement: *Indonesia bagian dari didi saya*. (Applause.) I first came to this country when my mother married an Indonesian named Lolo Soetoro. And as a young boy I was -- as a young boy I was coming to a different world. But the people of Indonesia quickly made me feel at home.

Jakarta -- now, Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. This was back in 1967, '68 -- most of you weren't born yet. (Laughter.) The Hotel Indonesia was one of the few high rises, and there was just one big department store called *Sarinah*. That was it. (Applause.) *Betchaks* and *bemos*, that's how you got around. They outnumbered automobiles in those days. And you didn't have all the big highways that you have today. Most of them gave way to unpaved roads and the *kampongs*.

So we moved to *Menteng Dalam*, where -- (applause) -- hey, some folks from *Menteng Dalam* right here. (Applause.) And we lived in a small house. We had a mango tree out front. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies, buying *satay* and *baso* from the street vendors. (Applause.) I still remember the call of the vendors. *Satay!* (Laughter.) I remember that. *Baso!* (Laughter.) But most of all, I remember the people -- the old men and women who welcomed us with smiles; the children who made a foreign child feel like a neighbor and a friend; and the teachers who helped me learn about this country.

Because Indonesia is made up of thousands of islands, and hundreds of languages, and people from scores of regions and ethnic groups, my time here helped me appreciate the common humanity of all people. And while my stepfather, like most Indonesians, was raised a Muslim, he firmly believed that all religions were worthy of respect. And in this way -- (applause) -- in this way he reflected the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia's Constitution, and that remains one of this country's defining and inspiring characteristics. (Applause.)

Now, I stayed here for four years -- a time that helped shape my childhood; a time that saw the birth of my wonderful sister, Maya; a time that made such an impression on my mother that she kept returning to Indonesia over the next 20 years to live and to work and to travel -- and to pursue her passion of promoting opportunity in Indonesia's villages, especially opportunity for women and for girls. And I was so honored -- (applause) -- I was so honored when President Yudhoyono last night at the state dinner presented an award on behalf of my mother, recognizing the work that she did. And she would have been so proud, because my mother held Indonesia and its people very close to her heart for her entire life. (Applause.)

So much has changed in the four decades since I boarded a plane to move back to Hawaii. If you asked me -- or any of my schoolmates who knew me back then -- I don't think any of us could have anticipated that one day I would come back to Jakarta as the President of the United States. (Applause.) And few could have anticipated the remarkable story of Indonesia over these last four decades.

The Jakarta that I once knew has grown into a teeming city of nearly 10 million, with skyscrapers that dwarf the Hotel Indonesia, and thriving centers of culture and of commerce. While my Indonesian friends and I used to run in fields with water buffalo and goats -- (laughter) -- a new generation of Indonesians is among the most wired in the world -- connected through cell phones and social networks. And while Indonesia as a young nation focused inward, a growing Indonesia now plays a key role in the Asia Pacific and in the global economy. (Applause.)

Now, this change also extends to politics. When my stepfather was a boy, he watched his own father and older brother leave home to fight and die in the struggle for Indonesian independence. And I'm happy to be here on Heroes Day to honor the memory of so many Indonesians who have sacrificed on behalf of this great country. (Applause.)

When I moved to Jakarta, it was 1967, and it was a time that had followed great suffering and conflict in parts of this country. And even though my stepfather had served in the Army, the violence and killing during that time of political upheaval was largely unknown to me because it was unspoken by my Indonesian family and friends. In my household, like so many others across Indonesia, the memories of that time were an invisible presence. Indonesians had their independence, but oftentimes they were afraid to speak their minds about issues.

In the years since then, Indonesia has charted its own course through an extraordinary democratic transformation -- from the rule of an iron fist to the rule of the people. In recent years, the world has watched with hope and admiration as Indonesians embraced the peaceful transfer of power and the direct election of leaders. And just as your democracy is symbolized by your elected President and legislature, your democracy is sustained and fortified by its checks and balances: a dynamic civil society; political parties and unions; a vibrant media and engaged citizens who have ensured that -- in Indonesia -- there will be no turning back from democracy.

But even as this land of my youth has changed in so many ways, those things that I learned to love about Indonesia -- that spirit of tolerance that is written into your Constitution; symbolized in mosques and churches and temples standing alongside each other; that spirit that's embodied in your people -- that still lives on. (Applause.) *Bhinneka Tunggal Ika* -- unity in diversity. (Applause.) This is the foundation of Indonesia's example to the world, and this is why Indonesia will play such an important part in the 21st century.

So today, I return to Indonesia as a friend, but also as a President who seeks a deep and enduring partnership between our two countries. (Applause.) Because as vast and diverse countries; as neighbors on either side of the Pacific; and above all as democracies -- the United States and Indonesia are bound together by shared interests and shared values.

Yesterday, President Yudhoyono and I announced a new Comprehensive Partnership between the United States and Indonesia. We are increasing ties between our governments in many different areas, and -- just as importantly -- we are increasing ties among our people. This is a partnership of equals, grounded in mutual interests and mutual respect.

So with the rest of my time today, I'd like to talk about why the story I just told -- the story of Indonesia since the days when I lived here -- is so important to the United States and to the world. I will focus on three areas that are closely related, and fundamental to human progress -- development, democracy and religious faith.

First, the friendship between the United States and Indonesia can advance our mutual interest in development.

When I moved to Indonesia, it would have been hard to imagine a future in which the prosperity of families in Chicago and Jakarta would be connected. But our economies are now global, and Indonesians have experienced both the promise and the perils of globalization: from the shock of the Asian financial crisis in the '90s, to the millions lifted out of poverty because of increased trade and commerce. What that means -- and what we learned in the recent economic crisis -- is that we have a stake in each other's success.

America has a stake in Indonesia growing and developing, with prosperity that is broadly shared among the Indonesian people -- because a rising middle class here in Indonesia means new markets for our goods, just as America is a market for goods coming from Indonesia. So we are investing more in Indonesia, and our exports have grown by nearly 50 percent, and we are opening doors for Americans and Indonesians to do business with one another.

America has a stake in an Indonesia that plays its rightful role in shaping the global economy. Gone are the days when seven or eight countries would come together to determine the direction of global markets. That's why the G20 is now the center of international economic cooperation, so that emerging economies like Indonesia have a greater voice and also bear greater responsibility for guiding the global economy. And through its leadership of the G20's anti-corruption group, Indonesia should lead on the world stage and by example in embracing transparency and accountability. (Applause.)

America has a stake in an Indonesia that pursues sustainable development, because the way we grow will determine the quality of our lives and the health of our planet. And that's why we're developing clean energy technologies that can power industry and preserve Indonesia's precious natural resources -- and America welcomes your country's strong leadership in the global effort to combat climate change.

Above all, America has a stake in the success of the Indonesian people. Underneath the headlines of the day, we must build bridges between our people, because our future security and prosperity is shared. And that is exactly what we're doing -- by increasing collaboration among our scientists and researchers, and by working together to foster entrepreneurship. And I'm especially pleased that we have committed to double the number of American and Indonesian students studying in our respective countries. (Applause.) We want more Indonesian students in American schools, and we want more American students to come study in this country. (Applause.) We want to forge new ties and greater understanding between young people in this young century.

These are the issues that really matter in our daily lives. Development, after all, is not simply about growth rates and numbers on a balance sheet. It's about whether a child can learn the skills they need to make it in a changing world. It's about whether a good idea is allowed to grow into a business, and not suffocated by corruption. It's about whether those forces that have transformed the Jakarta I once knew -- technology and trade and the flow of people and goods -- can

translate into a better life for all Indonesians, for all human beings, a life marked by dignity and opportunity. Now, this kind of development is inseparable from the role of democracy.

Today, we sometimes hear that democracy stands in the way of economic progress. This is not a new argument. Particularly in times of change and economic uncertainty, some will say that it is easier to take a shortcut to development by trading away the right of human beings for the power of the state. But that's not what I saw on my trip to India, and that is not what I see here in Indonesia. Your achievements demonstrate that democracy and development reinforce one another.

Like any democracy, you have known setbacks along the way. America is no different. Our own Constitution spoke of the effort to forge a "more perfect union," and that is a journey that we've traveled ever since. We've endured civil war and we struggled to extend equal rights to all of our citizens. But it is precisely this effort that has allowed us to become stronger and more prosperous, while also becoming a more just and a more free society.

Like other countries that emerged from colonial rule in the last century, Indonesia struggled and sacrificed for the right to determine your destiny. That is what Heroes Day is all about -- an Indonesia that belongs to Indonesians. But you also ultimately decided that freedom cannot mean replacing the strong hand of a colonizer with a strongman of your own.

Of course, democracy is messy. Not everyone likes the results of every election. You go through your ups and downs. But the journey is worthwhile, and it goes beyond casting a ballot. It takes strong institutions to check the power -- the concentration of power. It takes open markets to allow individuals to thrive. It takes a free press and an independent justice system to root out abuses and excess, and to insist on accountability. It takes open society and active citizens to reject inequality and injustice.

These are the forces that will propel Indonesia forward. And it will require a refusal to tolerate the corruption that stands in the way of opportunity; a commitment to transparency that gives every Indonesian a stake in their government; and a belief that the freedom of Indonesians -- that Indonesians have fought for is what holds this great nation together.

That is the message of the Indonesians who have advanced this democratic story - - from those who fought in the Battle of Surabaya 55 years ago today; to the students who marched peacefully for democracy in the 1990s; to leaders who have embraced the peaceful transition of power in this young century. Because ultimately, it will be the rights of citizens that will stitch together this remarkable *Nusantara* that stretches from Sabang to Merauke, an insistence -- (applause) -- an insistence that every child born in this country should be treated equally, whether they come from Java or Aceh; from Bali or Papua. (Applause.) That all Indonesians have equal rights.

That effort extends to the example that Indonesia is now setting abroad. Indonesia took the initiative to establish the Bali Democracy Forum, an open forum for countries to share their experiences and best practices in fostering democracy. Indonesia has also been at the forefront of pushing for more attention to human rights within ASEAN. The nations of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny, and the United States will strongly support that right. But the people of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny as well. And that's why we condemned elections in Burma recently that were neither free nor fair. That is why we are supporting your vibrant civil society in working with counterparts across this region. Because there's no reason why respect for human rights should stop at the border of any country.

Hand in hand, that is what development and democracy are about -- the notion that certain values are universal. Prosperity without freedom is just another form of poverty. Because there are aspirations that human beings share -- the liberty of knowing that your leader is accountable to you, and that you won't be locked up for disagreeing with them; the opportunity to get an education and to be able to work with dignity; the freedom to practice your faith without fear or restriction. Those are universal values that must be observed everywhere.

Now, religion is the final topic that I want to address today, and -- like democracy and development -- it is fundamental to the Indonesian story.

Like the other Asian nations that I'm visiting on this trip, Indonesia is steeped in spirituality -- a place where people worship God in many different ways. Along with this rich diversity, it is also home to the world's largest Muslim population -- a truth I came to know as a boy when I heard the call to prayer across Jakarta.

Just as individuals are not defined solely by their faith, Indonesia is defined by more than its Muslim population. But we also know that relations between the United States and Muslim communities have frayed over many years. As President, I have made it a priority to begin to repair these relations. (Applause.) As part of that effort, I went to Cairo last June, and I called for a new beginning between the United States and Muslims around the world -- one that creates a path for us to move beyond our differences.

I said then, and I will repeat now, that no single speech can eradicate years of mistrust. But I believed then, and I believe today, that we do have a choice. We can choose to be defined by our differences, and give in to a future of suspicion and mistrust. Or we can choose to do the hard work of forging common ground, and commit ourselves to the steady pursuit of progress. And I can promise you -- no matter what setbacks may come, the United States is committed to human progress. That is who we are. That is what we've done. And that is what we will do. (Applause.)

Now, we know well the issues that have caused tensions for many years -- and these are issues that I addressed in Cairo. In the 17 months that have passed since that speech, we have made some progress, but we have much more work to do.



Innocent civilians in America, in Indonesia and across the world are still targeted by violent extremism. I made clear that America is not, and never will be, at war with Islam. Instead, all of us must work together to defeat al Qaeda and its affiliates, who have no claim to be leaders of any religion --- certainly not a great, world religion like Islam. But those who want to build must not cede ground to terrorists who seek to destroy. And this is not a task for America alone. Indeed, here in Indonesia, you've made progress in rooting out extremists and combating such violence.

In Afghanistan, we continue to work with a coalition of nations to build the capacity of the Afghan government to secure its future. Our shared interest is in building peace in a war-torn land -- a peace that provides no safe haven for violent extremists, and that provide hope for the Afghan people.

Meanwhile, we've made progress on one of our core commitments -- our effort to end the war in Iraq. Nearly 100,000 American troops have now left Iraq under my presidency. (Applause.) Iraqis have taken full responsibility for their security. And we will continue to support Iraq as it forms an inclusive government, and we will bring all of our troops home.

In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we've been persistent in our pursuit of peace. Israelis and Palestinians restarted direct talks, but enormous obstacles remain. There should be no illusion that peace and security will come easy. But let there be no doubt: America will spare no effort in working for the outcome that is just, and that is in the interests of all the parties involved -- two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. That is our goal. (Applause.)

The stakes are high in resolving all of these issues. For our world has grown smaller, and while those forces that connect us have unleashed opportunity and great wealth, they also empower those who seek to derail progress. One bomb in a marketplace can obliterate the bustle of daily commerce. One whispered rumor can obscure the truth and set off violence between communities that once lived together in peace. In an age of rapid change and colliding cultures, what we share as human beings can sometimes be lost.

But I believe that the history of both America and Indonesia should give us hope. It is a story written into our national mottos. In the United States, our motto is *E pluribus unum* -- out of many, one. *Bhinneka Tunggal Ika* -- unity in diversity. (Applause.) We are two nations, which have traveled different paths. Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag. And we are now building on that shared humanity -- through young people who will study in each other's schools; through the entrepreneurs forging ties that can lead to greater prosperity; and through our embrace of fundamental democratic values and human aspirations.

Before I came here, I visited *Istiqlal* mosque -- a place of worship that was still under construction when I lived in Jakarta. And I admired its soaring minaret and its imposing dome and welcoming space. But its name and history also speak to what makes Indonesia great. *Istiqlal* means independence, and its construction was in part a testament to the nation's struggle for freedom. Moreover, this house of worship for many thousands of Muslims was designed by a Christian architect. (Applause.)

Such is Indonesia's spirit. Such is the message of Indonesia's inclusive philosophy, *Pancasila*. (Applause.) Across an archipelago that contains some of God's most beautiful creations, islands rising above an ocean named for peace, people choose to worship God as they please. Islam flourishes, but so do other faiths. Development is strengthened by an emerging democracy. Ancient traditions endure, even as a rising power is on the move.

That is not to say that Indonesia is without imperfections. No country is. But here we can find the ability to bridge divides of race and region and religion -- by the ability to see yourself in other people. As a child of a different race who came here from a distant country, I found this spirit in the greeting that I received upon moving here: *Selamat Datang*. As a Christian visiting a mosque on this visit, I found it in the words of a leader who was asked about my visit and said, "Muslims are also allowed in churches. We are all God's followers."

That spark of the divine lives within each of us. We cannot give in to doubt or cynicism or despair. The stories of Indonesia and America should make us optimistic, because it tells us that history is on the side of human progress; that unity is more powerful than division; and that the people of this world can live together in peace. May our two nations, working together, with faith and determination, share these truths with all mankind.

*Sebagai penutup, saya mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia: terima kasih atas. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.*

END

### Lampiran 3 Pidato Hillary Clinton di Hawaii.

28 Oktober 2010

Aloha. Sebenarnya pada awalnya kami ingin melakukan pidato ini di luar. Tapi jika Anda melihat foto halaman depan di koran-koran pagi ini, dimana saya disambut oleh Laksamana Willard dengan rambut saya yang tertiuap keatas oleh angin – (tertawa) – kami merautuskan bahwa kami tidak butuh artikel berita lain tentang rambut saya. (Tertawa.) Jadi kami berterimakasih pada pihak hotel yang mengizinkan kita semua bertemu di ruangan ini, walaupun keindahan alam Hawaii masih menggoda dari balik pintu-pintu itu.

Saya ingin berterimakasih kepada sang senator untuk sambutan perkenalannya, tetapi lebih lagi untuk persahabatannya, kepemimpinannya serta jasa-jasanya untuk negara ini. Tidak ada seseorang pun dari para pelayan masyarakat lainnya yang telah melakukan lebih dalam mewakili mimpi Amerika serta kampung halamannya di Hawaii seperti dia. Dia mewakili tradisi-tradisi terbaik milik Amerika, ia seorang prajurit yang pernah mendapatkan penghargaan tertinggi Medal of Honor dan secara keseluruhan ia memang seorang pria yang mengagumkan.  
(Tepuk tangan.)

Dan merupakan kebahagiaan khusus bagi saya untuk dapat bertemu lagi dengan dia dan istrinya, Irene, dalam kesempatan ini.

Saya juga ingin menyambut Anggota Kongress Mazie Hirono, yang juga hadir disini. Terima kasih banyak Mazie.  
(Tepuk tangan.)

Dan Wali Kota Peter Carlisle – Pak Walikota, terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa Senator Akaka dan Anggota Kongres Djou tidak bisa datang, namun saya ingin berterima kasih pada Senator Colleen Hanabusa atas kedatangannya disini. Terima kasih Coleen.

(Tepuk tangan.)

Jika Anda telah lama bergelut di dunia politik di Amerika seperti saya dan suami saya telah lakukan, Anda pasti akan mendapatkan banyak teman sepanjang perjalanan Anda. Oleh karena itu saya sangat senang bahwa George Ariyoshi, John dan Lynne Waihee, serta Ben Cayetano bisa juga hadir disini. Mereka semua teman-teman yang menakjubkan yang telah bersama-sama mengabdikan untuk negara ini dengan kami dan menjadi dekat dengan kami.

(Tepuk tangan.)

Saya ingin juga menyambut Laksamana Willard, Komandan PACOM (Komando Pasifik AS) dan Duta Besar Australia untuk AS Kim Beazley. Saya juga tahu bahwa ada mahasiswa-mahasiswa dari East-West Center di sini, selain juga murid-murid dari berbagai SMA. Saya ingin berterimakasih pada para pelajar tersebut atas kehadiran mereka dan juga pada semua sponsor dari kegiatan ini.

Saya sangat senang dapat kembali ke Hawaii. Seperti yang dikatakan oleh Charles Morrison sebelumnya, perjalanan saya yang terakhir ke Hawaii terpaksa dipersingkat karena gempa bumi tragis di Haiti. Tetapi disinilah tanah kelahiran dari Presiden kita dan juga jembatan bagi Amerika ke timur, dan disinilah saya akan memulai perjalanan saya ke tujuh negara di kawasan Asia-Pasifik.

Sudah cukup lama saya menanti-nantikan perjalanan ini. Dari Hawaii saya akan melanjutkan perjalanan ke Guam dan lalu Vietnam serta Kamboja, lalu Malaysia dan Papua New Guinea, Selandia Baru, Australia, dan American Samoa. Rencana perjalanan ini menunjukkan betapa beragam dan dinamisnya Asia. Perjalanan ini juga menyokong rute yang akan dilalui oleh Presiden Obama dalam beberapa minggu ke depan, dimana ia akan mengunjungi India, Indonesia, Jepang dan Korea Selatan.

Bersama-sama, Presiden dan saya akan mengarungi sebagian besar dari kawasan yang penting ini, pada saat-saat yang sangat menentukan, yaitu setelah hampir dua tahun kita membuka kembali hubungan intensif dengan kawasan ini. Dan dimanapun kami pergi, kami akan mengangkat seperangkat tujuan utama yaitu: untuk mempertahankan dan memperkuat kepemimpinan Amerika di kawasan Asia-Pasifik, meningkatkan keamanan, memajukan kemakmuran, serta mempromosikan nilai-nilai yang kita miliki.

Lewat perjalanan-perjalanan ini, dan berbagai langkah lainnya, kami mempraktikkan apa yang sering disebut sebagai forward deployed diplomacy (diplomasi garis depan). Artinya, kami mengadopsikan pondasi kebijakan yang proaktif; kami telah mengirimkan seluruh aset-aset diplomatik yang kami miliki – termasuk pejabat-pejabat tertinggi, ahli-ahli pembangunan, dan tim-tim untuk menangani beragam permasalahan penting – ke seluruh penjuru dan ibukota-ibukota di kawasan Asia-Pasifik. Kami telah mempercepat langkah kita dan memperluas ruang lingkup hubungan kita dengan lembaga-lembaga regional, dengan para mitra dan sekutu kita, dan dengan para rakyat di kawasan tersebut dalam usaha-usaha aktif demi mencapai objektif-objektif yang sama-sama kita miliki.

Ini telah menjadi prioritas kami sejak Hari Pertama pemerinthan Presiden Obama, karena kami sadar bahwa sejarah abad ke-21 akan banyak ditulis di Asia. Kawasan ini akan menyaksikan tranformasi pertumbuhan ekonomi yang terbesar di planet ini. Sebagian dari kota-kotanya akan menjadi pusat-pusat perdagangan dan kebudayaan global. Dan dengan makin banyaknya rakyat di seluruh kawasan tersebut yang mendapatkan akses ke pendidikan dan kesempatan untuk maju, kita semua akan menyaksikan bangkitnya generasi berikutnya dari para pemimpin

regional dan global di bidang bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, politik dan seni.

Namun dibalik semua itu, masih ada banyak tantangan-tantangan besar yang bersemayam di Asia. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di Burma mengingatkan kita bahwa masih ada tempat-tempat dimana kemajuan tidak bisa dirasakan. Aksi-aksi provokatif dan perjalanan sejarah pengembangan senjata nuklir di Korea Utara membutuhkan pengawasan yang ketat. Dan perlombaan senjata yang dibarengi dengan sengketa-sengketa teritorial menimbulkan kondisi yang mengkhawatirkan. Berbagai solusi untuk masalah-masalah global yang mendesak, seperti perubahan iklim, akan sukses atau gagal tergantung pada apa yang terjadi di Asia. Inilah masa depan yang sudah mulai terbentuk hari ini – penuh dengan perubahan-perubahan pesat, dan ditandai oleh berbagai tantangan. Dan inilah masa depan yang harus dipimpin oleh Amerika Serikat.

Karena perkembangan yang kita lihat saat ini tidak saja muncul berkat hasil dari kerja keras dari para pemimpin dan rakyat di seluruh kawasan ini, tetapi juga berkat para prajurit, pelaut dan marinir Amerika yang menjaga perbatasan dan berpatroli perairan kawasan ini; para diplomat Amerika yang telah menyelesaikan berbagai konflik dan menyatukan berbagai negara untuk mencapai tujuan-tujuan bersama; para pemimpin bisnis dan wirausahawan Amerika yang berinvestasi di pasar-pasar baru serta membentuk berbagai kemitraan Trans-Pasifik; para pekerja kemanusiaan Amerika yang membantu rekonstruksi di berbagai negara setelah dilanda bencana; dan para pengajar dan pelajar Amerika yang membagi berbagai pengalaman dan pemikiran mereka dengan para sejawat mereka di seberang lautan.

Saat ini banyak yang mengatakan bahwa sejarah panjang dari kepemimpinan Amerika di Asia-Pasifik hampir selesai. Bahwa kita tidak akan disini untuk lebih lama lagi. Namun saya ingin menjawabnya dengan, lihatlah pada apa yang telah kami lakukan karena catatan sejarah menunjukkan kesimpulan yang sangat berbeda.

Selama 21 bulan terakhir, Pemerintahan Obama bersungguh-sungguh dalam memperkuat kepemimpinan kami, meningkatkan peran serta kami, serta menerapkan cara-cara baru dalam memproyeksikan gagasan dan pengaruh kami keseluruh kawasan yang terus berubah ini. Kami melakukan semua ini dengan dukungan besar dari para pemimpin dari kedua belah pihak dari jalur politik yang memiliki visi yang sama dengan kami mengenai peran Amerika di Asia.

Bersama, kami fokus pada lingkup waktu, yang akan terentang selama bertahun-tahun kedepan. Saya juga tahu betapa beratnya dalam iklim politik dewasa ini untuk berpikir jauh kedepan. Tetapi satu dari harapan saya adalah bahwa di Asia dan di tempat manapun, kita dapat mulai melakukannya lagi. Karena kita butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur kepemimpinan di dunia, dan perlu waktu bertahun-tahun untuk melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk terus maju.

Maka sekarang ini, pada awal dari lawatan saya yang keenam ke Asia sebagai Menteri Luar Negeri, saya optimis dan percaya mengenai masa depan Asia. Saya juga optimis dan percaya dengan masa depan Amerika. Saya juga optimis dan percaya mengenai semua yang bisa dilakukan oleh negara-negara ini bersama dengan pemimpin Amerika di masa yang akan datang.

Maka pada hari ini, saya ingin mendiskusikan secara ringkas langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintahan Obama untuk memperkuat perkakas utama dari peran serta Amerika di Asia: sekutu kami, kemitraan kami yang terus berkembang, serta kerja kami dengan institusi regional. Saya juga akan menggambarkan bagaimana kami menggunakan perkakas ini untuk mengejar diplomasi garis depan melalui tiga jalur utama: pertama, membentuk masa depan ekonomi Asia-Pasifik; kedua, menjamin keamanan regional; dan ketiga, mendukung lembaga demokrasi yang lebih kuat dan penyebaran nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Saya akan mengawali dari mana pendekatan kami ke Asia dimulai – bersama dengan para sekutu kami. Di kawasan yang luas dan beragam, ikatan kami dengan sekutu kami – Jepang, Korea, Australia, Thailand, dan Filipina – terus menjadi dasar bagi peran serta strategis kami. Aliansi ini telah menjaga perdamaian dan keamanan regional selama setengah abad terakhir dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan yang luar biasa. Hari ini kita bekerja bukan hanya untuk mempertahankan mereka tetapi juga memperbaiki mereka sehingga mereka tetap efektif di dunia yang terus berubah.

Hal itu dimulai dengan aliansi kami dengan Jepang, tonggak dari peran serta kami di Asia-Pasifik. Pada tahun ini, kami merayakan ulang tahun ke 50 Pakta Kerjasama dan Keamanan Bersama. Tetapi kemitraan kami berkembang jauh melampaui bidang keamanan. Kami adalah dua dari tiga ekonomi terbesar di dunia, kontributor kedua utama dalam rekonstruksi di Afghanistan, dan kami berkomitmen untuk memimpin pada isu-isu penting global mulai dari non-proliferasi hingga perubahan iklim. Untuk memastikan bahwa pada lima puluh tahun kedepan aliansi kami masih tetap efektif seperti sedia kala, kami memperluas kerjasama kami untuk mencerminkan isu strategis yang terus berubah. Dalam diskusi saya selama dua jam dan pidato saya bersama dengan menteri luar negeri Jepang kemarin, saya mencakup berbagai macam isu yang kami hadapi bersama.

Tahun ini juga menandai sebuah tonggak dengan sekutu kami lainnya: ulang tahun ke 60 Perang Korea, dimana saya dan Menteri Pertahanan Gates merayakannya pada musim Panas lalu. Dan dalam dua minggu, presiden kedua negara akan bertemu di Seoul saat Presiden Obama melawat kesana untuk acara KTT G-20.

Kedua negara saling bahu membahu dalam menghadapi ancaman dan tindakan-tindakan provokatif Korea Utara, termasuk tenggelamnya kapal Cheonan yang tragis oleh torpedo Korea Utara. Kami akan terus berkoordinasi dengan Seoul dan Tokyo dalam upaya kami untuk menjelaskan pada Korea Utara bahwa hanya ada satu jalan yang menjanjikan hubungan yang benar-benar menguntungkan dengan

dunia luar – yaitu denuklirisasi sepenuhnya, yang dapat dibuktikan, dan permanen.

Aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan tumpuan stabilitas dan keamanan di kawasan dan sekarang bahkan jauh melampaui itu. Kami bekerja sama di Afghanistan, dimana tim rekonstruksi dari Korea Selatan berkarya di Propinsi Parwan; Di Teluk Aden, Pasukan Korea dan AS berkoordinasi dalam misi memberantas perompak. Dan tentu saja, selain kerjasama militer, kedua negara menikmati hubungan ekonomi yang dinamis, dan oleh karenanya kedua Presiden kita menyerukan diselesaikannya isu-sisu yang masih belum terselesaikan berkaitan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Korea menjelang pertemuan G-20 di Seoul.

Tahun depan menandai perayaan lain – yaitu perayaan ke 60 tahun aliansi antara Australia dan Amerika Serikat. Dalam waktu dua bulan, saya akan merampungkan kunjungan saya ke kawasan ini dengan kunjungan ke Australia untuk merayakan 25 tahun hubungan tingkat menteri Australia-AS.; yang dinamai AUSMIN. Saya dan Menteri Pertahanan Gates akan bertemu dengan sejawat kami, Menteri Luar Negeri Rudd dan Menteri Pertahanan. Kami juga akan bertemu dengan Julia Gillard, Perdana Menteri wanita pertama Australia, dan berkesempatan untuk berbincang dengan para pemimpin, serta memberikan sikap kebijakan tentang masa depan aliansi antara Australia dan AS.

Dengan sekutu kami di Asia Tenggara, Thailand dan Filipina, Amerika Serikat bekerja sama dengan erat dalam mengembangkan beragam isu mulai dari politik, ekonomi, lingkungan hidup, dan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan. Pada musim panas ini, kamu meuncurkan Perjanjian Kemitraan Kreatif (Creative Partnership Agreement) dengan Thailand, yang menggabungkan berbagai universitas dan bisnis Thailand dan Amerika untuk membantu mengembangkan sektor inovatif dari perekonomian Thailand.

Dengan Filipina, untuk pertama kalinya kami akan mengadakan Dialog Strategis 2+2 pada Januari mendatang. Dan pada bulan lalu, saya sangat gembira bersama dengan Presiden Aquino menandatangani Millennium Challenge Compact untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di Filipina.

Dengan setiap negara dari lima sekutu kami di kawasan, apa yang dimulai sebagai aliansi keamanan telah berkembang seiring dengan waktu dan sekarang telah menjangkau banyak tindakan di berbagai bidang. Dan kami akan terus bertanya ke diri sendiri pertanyaan yang sulit mengenai bagaimana memperkuat aliansi tersebut lebih jauh, menyesuaikan mereka dengan setiap hubungan guna memberi lebih banyak manfaat kepada lebih banyak rakyat kita.

Diluar aliansi kami, Amerika Serikat memperkuat hubungannya dengan mitra baru. Indonesia memainkan peran yang penting di kawasan dan terutama di institusi regional. Sebagai ketua ASEAN tahun depan, Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT Asia Timur 2011. Dan sebagai pendiri Bali Democracy Forum, Indonesia merupakan pendukung utama reformasi demokrasi di seluruh Asia.

Kedua Presiden kami akan secara resmi meluncurkan Perjanjian Kemitraan Komprehensif (Comprehensive Partnership Agreement) yang baru pada kunjungan Presiden Obama ke Indonesia bulan depan.

Di Vietnam, kami mempererat kerjasama yang tidak pernah terbayangkan 10 tahun yang lalu. Hubungan diplomatik dan ekonomi kami lebih produktif dari sebelumnya, dan belum lama ini kami memperluas diskusi kami mengenai keamanan laut dan isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan. Vietnam juga mengundang kami untuk turut serta sebagai tamu pada KTT Asia Timur untuk pertama kalinya tahun ini. Hal itu membuka jalan baru yang sangat penting bagi kerjasama. Meskipun kami masih memiliki beberapa perbedaan, kami berkomitmen untuk terus bergerak maju meninggalkan masa lalu yang menyakitkan menuju hubungan yang lebih bermanfaat dan menghasilkan.

Sejumlah kecil negara saja yang bisa melebihi Singapura, dan kami berkejasama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan terintegrasi, mengangkat kepemimpinan Singapura di ASEAN dan mendorong peran negara tersebut dalam negosiasi kemitraan Trans-Pasifik. Di Malaysia serta Selandia Baru, diplomat dan para ahli pembangunan kami membawa keahliannya untuk membangun hubungan yang lebih kuat di semua lini, termasuk meningkatkan perdagangan, pertukaran SDM, dan usaha untuk memperkuat pemerintahan yang anti senjata nuklir.

Dalam sebuah perkembangan yang dinamis, terlihat meningkatnya pengaruh dua negara, yaitu India dan Cina. Terus berkembangnya kedua negara ini membuat dunia berubah dan kemampuan kami untuk menjalin kerjasama yang efektif dengan kedua negara tersebut merupakan sebuah ujian bagi kepemimpinan kami. Dengan semakin berkembangnya hubungan antara pemerintah AS dan India, serta hubungan ekonomi dan rakyat kedua negara, Amerika Serikat dan India tidak pernah saling merugikan. Sebagai dua negara demokrasi terbesar, kami dipersatukan dengan kesamaan kepentingan dan nilai.

Di awal tahun ini, kami meresmikan U.S.-India Strategic Dialogue. Salah satu isu utama yang dikemukakan adalah pertumbuhan kerjasama dan integrasi di Asia Timur, karena kami percaya bahwa India adalah pemain kunci di panggung regional maupun global. Inilah alasan mengapa Presiden Obama memulai lawatan pentingnya di Asia minggu depan, yang salah satunya adalah mengunjungi India. Dalam lawatannya tersebut, beliau membawa dua prioritas yaitu memperbaharui kepemimpinan AS di Asia dan kemitraan antara AS dan India yang akan memasuki babak baru.

Sekarang ini, hubungan antara AS dan China semakin kompleks dan mempunyai konsekuensi yang besar, dan kami tetap berkomitmen untuk membuat hubungan tersebut tatap baik. Ada beberapa pihak di kedua negara tersebut yang memandang kepentingan Cina maupun kami terasa sangat janggal. Mereka menerapkan kalkulasi no untuk hubungan kami. Jadi kalau salah satu sukses maka yang lainnya akan gagal. Di Abad ke-21 ini, tidak ada kepentingan yang bisa melihat AS dan Cina sebagai lawan satu sama lain. Jadi kita bekerjasama



untuk menciptakan hubungan yang positif, kooperatif, dan komprehensif di abad baru ini.

Ada beberapa pihak di Negara China, yang percaya bahwa AS cenderung untuk mengontrol China, dan saya katakan bahwa sejak kedua negara memulai hubungan diplomatiknya, China telah mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang pesat. Di lain pihak, kebijakan AS, baik dibawah pemerintahan partai Republik atau Demokrat dan juga kongres, secara konsisten mendukung tujuan ini sejak tahun 70-an. Kami selalu melihat kedepan dalam menjalin kerjasama yang erat dengan China, baik melalui jalur bilateral maupun institusi yang mempunyai peran yang lebih besar, namun disaat yang sama mengambil tanggungjawab yang lebih besar di percaturan regional maupun global. Kedepan nanti, kita perlu bekerja sama untuk mencari pendekatan yang lebih efektif untuk kasus-kasus provokasi Korea Utara, dan menekan nagara ini untuk membangun kembali hubungannya dengan Korea Selatan dan kembali ke meja perundingan enam negara atau Six-Party Talks.

Untuk masalah Iran, kita meminta bantuan China untuk memastikan penerapan sanksi global yang efektif yang bertujuan untuk mencegah Iran dalam memenuhi ambisi nuklirnya. Dalam bidang militer, kami mencari sebuah dialog untuk membangun kepercayaan dan menciptakan peraturan sehingga operasi militer kedua negara dapat segera terlaksanakan. Dalam hal perubahan iklim, sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca, kami berbagi tanggung jawab untuk membuat strategi yang tepat dalam hal efisiensi energi dan dipomasi iklim global yang lebih maju.

Untuk masalah mata uang dan perdagangan, AS mencari kebijakan penyalarsan, seperti yang sudah diuraikan oleh Menteri Geithner, dan kebijakan iklim investasi lebih baik bagi pebisnis AS, produk dari AS, dan hak cipta di China. Melihat lebih jauh, kedua negara harus bekerjasama untuk meningkatkan jumlah siswa yang belajar di masing-masing negara. Kami mempunyai sebuah inisiatif yang diberi nama 100000 Strong untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk masalah hak asasi manusia, kami mencoba mencari sebuah dialog untuk meningkatkan perlindungan hak-hak universal bagi semua rakyat. Kami menyambut baik kunjungan kenegeraan Presiden Hu Jintao ke Washington awal tahun depan. Amerika Serikat bertekad untuk membuat kunjungan tersebut mempunyai nilai sejarah. Saya menunggu untuk dapat bertemu dengan mitra saya, Menlu Dai Bingguo minggu ini untuk membuat persiapan kunjungan tersebut.

Sekarang ini, hubungan kita dengan sekutu dan mitra merupakan dua dari tiga elemen kunci komitmen kita di Asia Pasifik. Yang ketiga adalah partisipasi kita dalam institusi multilateral di kawasan ini. Ketika saya disini, di Hawaii, sepuluh bulan yang lalu, saya berbicara tentang pentingnya institusi multilateral di kawasan ini. Saya katakan secara sederhana prinsip tentang institusi yang kuat bagi masa depan Asia. Jika ada diskusi tentang konsekuensi keamanan, politik dan ekonomi, sepanjang itu menyangkut kepentingan kita, kita akan mencari kursi di meja diskusi tersebut. Itulah alasannya mengapa kita melihat ASEAN sebagai

sebuah titik penunjang bagi kemunculan arsitektur regional. Dan kita melihatnya sangat penting sebagai sebuah keumpulan besar untuk politik, ekonomi dan masalah strategis lainnya.

Amerika Serikat telah melakukan langkah-langkah untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan ASEAN, termasuk kesepakatan hubungan baik dan kerjasama serta pembukaan perwakilan AS untuk ASEAN. Menhan Gates baru-baru ini kembali dari pertemuan Menhan ASEAN di Hanoi. Presiden Obama secara personal telah bertemu dengan para pemimpin negara ASEAN dua kali, dan ini merupakan sebuah tanda keseriusan AS untuk bekerjasama sama dengan negara-negara anggota ASEAN. Dan kita telah mengambil peran penting dalam Forum Regional ASEAN, dimana kita membahas persoalan keamanan seperti Korea Utara dan Laut Cina Selatan.

Untuk masalah APEC, kami melihatnya sebagai momen yang sangat penting dimana APEC dapat merevitalisasi misinya dan mewujudkan agenda ekonomi abad ke-21. Kami mengagumi kepemimpinan Jepang dalam APEC tahun ini. Mereka menetapkan langkah baru bagi APEC dalam liberalisasi perdagangan dan mempromosikan usaha-usaha untuk meningkatkan bisnis dan investasi di sektor UKM.

Kita telah bekerjasama dengan Jepang untuk mempersiapkan kepemimpinan kita di APEC tahun depan, dan kita akan menyelenggarakan pertemuan para pemimpinnya di Honolulu. Dan saya memberikan penghargaan bagi anggota penyelenggara yang berada disini untuk mendukung cara penting ini. Tujuan kita adalah mendorong APEC untuk berkembang menjadi sebuah forum yang penting dan berorientasi pada hasil untuk berbagi secara terbuka perkembangan ekonomi.

Amerika Serikat juga berperan melalui apa yang kiat sebut sebagai "minilateral" kebalikan dari multilateral, seperti Lower Mekong Initiative yang diluncurkan tahun lalu untuk mendukung pendidikan, kesehatan, program lingkungan hidup di Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Melalui Forum Kepulauan Pasifik untuk mendukung negara-negara pasifik menghadapi tantangan yang mereka hadapi, seperti perubahan iklim dan kebebasan navigasi. Untuk itu, dengan besar hati saya mengumumkan bahwa USAID akan kembali ke kawasan Pasifik tahun depan, membuka kantor perwakilan di Fiji, dengan sejumlah dana sebesar \$21 juta untuk mendukung perubahan iklim mitigasi.

Setelah memberikan pidato ini, saya akan bertolak ke Hanoi di mana saya akan mewakili negara kita di KTT Asia Timur (EAS). Ini adalah kali pertama Amerika Serikat turut serta dan kita sangat beruntung mendapatkan kesempatan ini. Saya akan memperkenalkan dua prinsip inti yang akan diusung oleh Pemerintahan Obama dalam pendekatannya terhadap EAS. Pertama adalah peran inti ASEAN, dan kedua adalah harapan kita terhadap EAS untuk tampil sebagai sebuah wadah untuk kerjasama yang substantif untuk menekankan isu-isu strategis dan politis, termasuk masalah nonproliferasi nuklir, keamanan maritim, dan perubahan iklim.

Maka ini adalah perangkat utama kita dalam kerjasama – persekutuan, kemitraan, dan lembaga-lembaga multilateral kita.

Dan saat hubungan ini sedang berlangsung, kita juga melakukannya dengan mengakui bahwa Amerika Serikat memposisikan diri sedemikian rupa untuk memainkan peran penting di Asia Pasifik karena sejarah, kemampuan, dan kredibilitas kita. Masyarakat membutuhkan kita seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade. Hal yang paling sering diutarakan oleh para pemimpin Asia kepada saya dalam kunjungan saya selama 20 bulan terakhir adalah terima kasih, kami sangat senang Anda memainkan kembali peran aktif di Asia. Karena mereka membutuhkan kita untuk membantu menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang luas dan berkesinambungan dan memastikan keamanan dengan cara mengerahkan secara efektif kekuatan militer kita dan membela hak asasi manusia dan harga diri dengan cara mendukung lembaga-lembaga demokrasi yang kokoh.

Jadi kita ingin memproyeksikan kepemimpinan Amerika di ketiga bidang berikut ini: pertumbuhan ekonomi, keamanan regional, dan nilai-nilai yang bertahan lama. Ketiga hal ini membentuk dasar kepemimpinan Amerika pada abad ke-20 dan ketiganya masih tetap relevan di abad ke-21. Namun kita harus mengubah cara kita menjalankannya karena dunia telah berubah dan akan terus berubah.

Pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Satu hal yang masih terus mengemuka: Asia tetap menginginkan Amerika menjadi mitra yang optimis, partisipatif, terbuka, dan kreatif dalam hubungan perdagangan dan finansial yang terus tumbuh di kawasan ini. Dan ketika saya berbincang dengan para pemimpin bisnis di dalam negeri, saya mendengar betapa penting bagi Amerika Serikat untuk memperluas peluang ekspor dan investasi kita ke pasar Asia yang dinamis. Ini lah yang menjadi hal penting dalam menyeimbangkan kembali pemerintahan kita.

Untuk kita, kita sedang membenahi masalah dalam negeri kita – meningkatkan tabungan kita, memperbarui sistem keuangan kita, dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman. Dan Presiden Obama telah menetapkan tujuan untuk melipatgandakan ekspor kita sehingga dapat tercipta lapangan kerja dan memberikan keseimbangan yang diperlukan dalam hubungan perdagangan kita.

Namun dalam upaya mencapai keseimbangan tersebut, dibutuhkan komitmen dua arah. Itulah sifat sebuah keseimbangan karena tidak bisa dilakukan oleh sebelah pihak saja. Kita bekerja melalui APEC, G-20, dan hubungan bilateral kita untuk mendukung pasar yang lebih terbuka, pengurangan pembatasan ekspor, transparansi yang lebih baik, dan komitmen yang menyeluruh terhadap keadilan. Para pelaku bisnis dan pekerja Amerika perlu memiliki keyakinan bahwa mereka bertindak di tingkat lapangan dengan aturan-aturan yang jelas mulai dari masalah Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan inovasi yang asli.

Jika perdagangan bebas dilakukan dengan benar, maka akan tercipta lapangan kerja, harga-harga yang lebih murah, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seperti yang saya utarakan di awal harapan kita untuk

menuntaskan pembahasan Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Korea sehingga dapat diserahkan ke Kongres. Kita juga mempercepat penyelesaian perundingan untuk mewujudkan Kemitraan Transpasifik; sebuah kesepakatan perdagangan bebas multilateral yang ambisius dan inovatif yang akan mempertemukan sembilan negara di lingkaran Pasifik termasuk empat mitra perdagangan bebas yang baru dengan AS, dan beberapa negara potensial lainnya di masa mendatang.

Tahun 2011 akan menjadi tahun yang penting untuk agenda ini. Dimulai dengan Kesepakatan Perdagangan Bebas Korea, dilanjutkan dengan perundingan Kemitraan Transpasifik, kerjasama untuk menyeimbangkan kembali peran di G-20, dan puncaknya adalah KTT Pemimpin APEC di Hawaii. Dengan ini semua, kita memiliki peluang bersejarah untuk menciptakan pertumbuhan yang luas, berkesinambungan, dan berimbang, dan kita bertekad untuk meraih hal itu.

Kemajuan ekonomi yang berkesinambungan bergantung pada investasi jangka panjang yang stabil dan aman; dan Amerika Serikat akan terus melakukan investasi ini. Keberadaan militer kita di Asia telah mencegah terjadinya konflik dan menciptakan keamanan selama 60 tahun, dan akan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi politik.

Namun militer kita harus berkembang seiring berkembangnya dunia. Pentagon kini terlibat dalam Global Posture Review secara komprehensif yang akan menjadi garis besar rencana keberadaan pasukan AS di wilayah ini. Rencana ini akan mencerminkan tiga prinsip: sikap pertahanan kita akan menjadi lebih berkesinambungan secara politis, lebih bertahan secara operasional, dan lebih tersebar secara geografis.

Dengan memegang ketiga prinsip ini, kita akan memperkuat keberadaan kita di Asia Timur Laut. Penambahan pasukan di Guam mencerminkan gagasan ini dan begitu pula kesepakatan yang mendasari apa yang telah kita raih bersama dengan Jepang – sebuah kesepakatan yang dicapai saat peringatan 50 tahun hubungan persekutuan keamanan kita bersama. Kita juga menerapkan garis-garis besar pertahanan yang baru dengan Korea Selatan.

Di Asia Tenggara dan Pasifik, kita akan mengubah keberadaan kita guna mencerminkan prinsip-prinsip tadi. Sebagai contoh, kita telah meningkatkan keberadaan angkatan laut kita di Singapura. Kita akan lebih banyak bekerja sama dengan Filipina dan Thailand untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi teroris dan mengatasi bencana alam. Kita juga telah menciptakan parameter baru untuk menjalin kerjasama militer dengan Selandia Baru dan kita terus memodernisasi hubungan pertahanan kita dengan Australia untuk mengatasi masalah maritim yang semakin kompleks. Dan kita juga memperluas kerjasama dengan pihak angkatan laut India di wilayah Pasifik, karena kita memahami betapa pentingnya wilayah laut Indo-Pasifik bagi perdagangan dan niaga global.

Kini, mungkin ada yang bertanya: Mengapa seorang Menlu AS berbicara tentang sikap pertahanan? Di sini lah tiga “D” berpadu dalam kebijakan luar negeri kita: defense (pertahanan), diplomacy (diplomasi), dan development (pembangunan).

Kegiatan militer kita di Asia menjadi bagian penting dalam perjanjian komprehensif kita. Dengan mengimbangi dan mengintegrasikan ketiganya dengan pendekatan garis depan terhadap diplomasi dan pembangunan, kita menempatkan diri kita dalam posisi yang terbaik guna mengamankan kepentingan kita dan meningkatkan kepentingan bersama.

Inilah kenyataan yang sesungguhnya bagi pasukan kita di Semenanjung Korea dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan; angkatan laut kita dalam menghadapi perompakan; menggalakkan pelayaran bebas dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi jutaan masyarakat; dan tentara dan masyarakat sipil dalam bekerjasama secara erat dengan sahabat dan mitra di Asia Tenggara untuk melatih, melengkapi, dan mengembangkan kapasitas negara-negara ini dalam menghadapi ancaman teroris.

Lebih dari semua kekuatan militer dan ukuran kekuatan ekonomi kita, aset paling berharga yang kita miliki sebagai sebuah bangsa adalah kekuatan persuasif yang dimiliki nilai-nilai kita, terutama sekali keyakinan kita yang teguh pada demokrasi dan hak asasi manusia.

Komitmen kami untuk mendukung dan memproyeksikan nilai-nilai ini adalah sebuah aspek tak terpisahkan dari karakter nasional kami. Dan itu adalah salah satu kontribusi terbaik dan terpenting yang dapat kami tawarkan pada dunia. Jadi tentu saja, itu merupakan elemen penting dari semua hal yang kami lakukan dalam kebijakan luar negeri AS.

Seperti bangsa-bangsa lainnya, kami juga tergerak akan penganiayaan yang terjadi di beberapa tempat di wilayah ini. Bersama jutaan orang di seluruh dunia kami bergabung menghimbau pembebasan Aung San Suu Kyi; penahanannya harus diakhiri. Dan kami bersedih karena Asia menjadi satu-satunya tempat di dunia dimana tiga orang terkemuka penerima penghargaan Nobel: Aung San Suu Kyi, Dalai Lama dan Liu Xiaobo – menjadi tahanan rumah, berada di penjara atau di pembuangan.

Pada saat kami memperdalam hubungan dengan rekan-rekan yang tidak sependapat dengan kami dalam isu-isu ini, kami akan terus mendorong mereka untuk melakukan reformasi yang untuk memperbaiki pemerintahan, melindungi hak asasi manusia dan memajukan kebebasan politik.

Dan saya ingin menggarisbawahi komitmen Amerika untuk mencari pertanggungjawaban bagi para pelanggar HAM yang telah terjadi di Burma lewat pendirian sebuah Komisi Investigasi Internasional melalui konsultasi mendalam dengan para teman, sekutu dan rekan kami lainnya di PBB. Burma dalam waktu dekat akan mengadakan pemilu yang tidak bebas, dan dalam beberapa tahun belakangan ini kami telah sadari bahwa demokrasi itu lebih dari sekedar diadakannya pemilu. Dan kami akan berbicara dengan tegas kepada pemimpin-pemimpin baru Burma, baik yang lama maupun baru, bahwa mereka harus melepaskan kebijakan-kebijakan masa lalu mereka.

Kami tahu kami tak dapat memaksakan nilai-nilai kami pada negara-negara lain, tapi kami percaya bahwa beberapa nilai bersifat universal – artinya- mereka dijunjung oleh semua manusia di seluruh negara di dunia, termasuk di Asia. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah negara yang stabil, damai dan sejahtera. Singkatnya, HAM menjadi perhatian semua orang. Inilah pesan yang ingin disampaikan AS, setiap saat dan dimana pun.

Saat ini, kami sadar bahwa kami harus bekerja sama dalam berbagai isu dengan negara-negara ini, itu sebabnya kami tidak pernah berhenti menyuarakan keprihatinan kami. Kita tidak bisa hanya membuat kemajuan dalam bidang ekonomi atau keamanan atau HAM saja, pendekatan kebijakan kita harus mencakup semuanya. Dan apa yang telah saya jelaskan hari ini merupakan gabungan dari komitmen-komitmen lama dan langkah-langkah baru yang kami ambil. Dan melalui langkah-langkah ini, kita akan mendengar, kita akan bekerjasama dan kita akan memimpin.

Tentu saja, warga Asialah yang harus mengambil keputusan-keputusan sulit. Para pemimpinnya yang harus mengambil pilihan-pilihan fundamental untuk meningkatkan tidak hanya standar kehidupan rakyatnya namun juga kebebasan politik dan HAM mereka. Asia dapat mengandalkan kami untuk mendukung para pemimpin dan orang-orang yang mengambil langkah untuk masa depan yang lebih baik itu, yang dapat meningkatkan taraf hidup seluruh warganya dan dengan demikian tidak hanya memajukan perekonomian tapi juga mentransformasi sebuah negara.

Kami mengambil komitmen ini bukan saja karena apa yang menjadi taruhan di Asia, kami mengambil komitmen ini karena hal ini juga mempertaruhkan masa depan AS. Ini tentang masa depan kita bersama. Ini tentang kesempatan-kesempatan yang akan dimiliki anak-anak dan cucu-cucu kita. Dan kami melihat ke wilayah Asia Pasifik seperti telah kami lakukan selama berpuluh-puluh tahun sebagai sebuah wilayah dimana AS diposisikan secara unik untuk memainkan sebuah peranan penting untuk membantu membentuk masa depan tersebut.

Saya tahu betapa Hawaii menjadi jembatan ke wilayah Asia Pasifik dan betapa keberagaman dan dinamisme Hawaii menunjukkan apa yang mungkin terjadi, tidak hanya di negara kita, namun juga di negara-negara di seluruh kawasan Pasifik. Kami akan terus mendukung apa yang kami percayai merupakan kepentingan Amerika dan yang kami betul-betul yakini merupakan kepentingan dari penduduk Asia pula. Saya menantikan kunjungan berikutnya ke Hawaii pada acara KTT APEC berikutnya dimana kita akan mengevaluasi apa yang telah kita capai dan sejauh mana kita telah melangkah. Kami juga nantikan para pemimpin dunia - dan rakyat Hawaii untuk terus menunjukkan arah ke depan bagi kita semua. Terima kasih banyak. (Tepuk tangan.)

## Lampiran 4 Fact Sheets: The United States and Indonesia - Building a 21st Century Partnership

The White House

Office of the Press Secretary

For Immediate Release  
November 09, 2010

Today, President Obama and President Yudhoyono reviewed the broad range of cooperation between our two governments and formally launched the U.S. - Indonesia Comprehensive Partnership. As two of the world's major democracies, bound together by a web of historical, cultural, and economic ties that span the Pacific and by our shared values and aspirations, we continue to strengthen our relationship through a variety of initiatives, summarized below and described in greater detail in the fact sheets attached.

### Partnership

- **Comprehensive Partnership:** In June 2010, President Obama and President Yudhoyono announced that the two countries would enter a Comprehensive Partnership to elevate bilateral relations by intensifying consultations and cooperation on key bilateral, regional, and global issues. The two leaders have formally launched the Comprehensive Partnership today.
- **Joint Commission:** To support the Comprehensive Partnership, the U.S. Secretary of State and the Indonesian Foreign Minister co-chaired the inaugural Joint Commission session on September 17 in Washington, D.C.
- **Plan of Action:** Launched publicly at the Joint Commission meeting, the Plan of Action outlines our commitment to cooperate in three key areas: political and security, economic and development (including climate change), and socio-cultural cooperation (including education, science, and technology). Six working groups meet under the Joint Commission to help implement the Plan of Action.

### Socio-Cultural

- **Interfaith Cooperation:** Indonesia hosted a successful interfaith event and is developing a plan to engage U.S. religious groups in interfaith service projects.
- **Peace Corps:** The Memorandum of Understanding to re-establish the Peace Corps program in Indonesia was signed in 2009. In March, the first group of 20 volunteers arrived to teach English.

#### Security and Regional Cooperation

- **East Asian Summit (EAS):** With strong Indonesian and ASEAN support, the United States joined the EAS. President Obama expects to attend the 2011 EAS hosted by Indonesia.
- **Defense Framework Arrangement:** Signed on June 10 to boost military-to-military cooperation.
- **Security Cooperation:** New and expanded projects focusing on counterterrorism, maritime security, peacekeeping, natural disaster response, and humanitarian assistance.

#### Science and Technology

- **Science and Technology Cooperation Agreement:** Signed on March 29 and awaiting entry into force.
- **Science Envoy:** Following President Obama's announcement in Cairo last year of the global Science Envoy program, former president of the U.S. National Academies of Science Dr. Bruce Alberts visited Indonesia and launched the Frontiers of Science program.
- **Frontiers of Science:** This scientist exchange program brings together scientists from the United States and Indonesia to share experiences and information with the hope that those linkages will lead to joint research and information-sharing.
- **NOAA Okeanos Explorer:** The joint research voyage of NOAA's Okeanos Explorer and Indonesia's Baruna Jaya yielded the discovery of unseen formations on the ocean floor, new species of coral and ocean fauna. This joint voyage marked the beginning of our ocean science partnership. Plans are underway for a second expedition.

#### Education

- **Funding:** President Obama highlighted the U.S. government's commitment to invest \$165 million in higher education collaboration over five years.
- **Exchange Initiatives:** Expanded educational exchanges, including the new Fulbright Indonesia Research, Science, and Technology (FIRST) Program, the Community College Initiative, English language teaching, and student advising. Commerce will lead the largest U.S. government-led education trade mission ever to Indonesia in 2011.
- **University Partnerships:** Improve the quality of higher education in Indonesia by supporting collaboration between the United States and Indonesian higher education institutions.



## Environment and Climate Change

- SOLUSI (Science, Oceans, Land Use, Society and Innovation -“solution” in Indonesian): A multi-agency suite of environment and climate activities, with significant USAID funding, that will work with Indonesian government counterparts and civil society to facilitate and accelerate Indonesia’s sustainable development through a balanced approach to environmental protection and socio-economic improvement. U.S. commitment of \$136 million over three years.
- Technical Assistance: New focus on forests and peat lands, related measurement and reporting of GHG emissions from all sources, as well as monitoring of the impacts of climate change.
- Climate Change Center: This past June, President Obama announced that the United States, alongside Norway, will support the establishment of an Indonesia Climate Change Center. Planning discussions between the U.S. climate agencies and Indonesian counterparts began in July and are ongoing

## Health

- Financial and Technical Assistance: USAID FY10 health programs will total \$52 million. The United States is the largest single contributor to the Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria, and Indonesia is the third largest recipient of grants. The National Institute of Allergy and Infectious Diseases is working with a network of Indonesian partners on a long-term collaboration on infectious disease clinical research and training.

## Trade and Investment

- Overseas Private Investment Corporation (OPIC): An updated Overseas Private Investment Corporation agreement was signed on April 13. OPIC will hold its 2011 Global Investment Conference in Indonesia.
- TIFA: Under the framework of the Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), both countries have worked to reduce or eliminate trade barriers. The last TIFA meeting convened in late September in Indonesia
- Entrepreneurship: Indonesia, recently designated as one of two pilot countries for the Global Entrepreneurship Program, will host a regional entrepreneurship summit in 2011. The State Department will lead an entrepreneurship trade mission coinciding with this summit.
- Geothermal Development: U.S. Trade and Development Agency launched a Geothermal Development Initiative working with Indonesian government and private sector partners.
- Department of Commerce Trade Missions: Secretary of Commerce Gary Locke led the first cabinet-level trade mission to Jakarta in May 2010. Trade missions on education, infrastructure, and the creative industries are planned for 2011.

### Millennium Challenge Corporation (MCC)

- **Threshold Program:** Since 2006, the MCC and the Indonesian government have partnered on a \$55 million threshold program to promote good governance and improve the delivery of public health services.
- **Compact:** In December 2008, the MCC Board selected Indonesia for a much larger Compact program. The MCC and the Indonesian government are developing projects in green prosperity, access to economic opportunities, and governance. Both sides are hopeful that a Compact agreement will be signed in 2011.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Armitage, Richard L & Joseph. S. Nye, Jr., *Commision on Smart Power: A Smarter, More Secure America*. CSIS: Washington. 2007
- Avery, Goldstein, *Rising to The Challenge: China's Grand Strategy and International Security*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2005)
- Brown, Michael E., et.al., *The Rise of China*, London: The MIT Press, 2000.
- Buzan, Barry & Eric Herring, *The Arms Dynamic in World Politic*, London: Lynne Rienner Pub. 1998.
- Buzan, Barry, *People, State & Fear 2<sup>nd</sup> Ed: an Agenda for International Security Studies In The Post Cold War Era*, New York: harvester Wheatsheaf, 1991.
- Calder, Kent, *Asia's Deadly Triangle: How Arms, Energy and Growth Threaten to Destabilize Asia Pacific*. 1998.
- Cato Handbook for Congress, *East Asian Defense Commitments*, 2002.
- Cliff, Roger & Keith Crane, *A New Direction for China's Defence Industry*, RAND Project Air Force, 2005.
- Colombus, Theodore, A., *Pengantar Hubungan Internasional Keadialan dan Power*, Bandung: Abardin, 1990.
- Davis, Lynn E., & Jeremy, Shapiro, (ed) *The US Army and The New National Security Strategy*, RAND Aroyo Center, 2003.
- Goldstein, Joshua S., *Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age*. (New Haven: Yale University Press 1988.
- Gregor, A. Jemas, *The China Connection, US Policy and The People's Republic of China*, California Standard University, 1986.
- Herman, Michael. *Intelligence Power in Peace and War*. 2003

Holsti, KJ., *Hubungan Internasional Suatu Kerangka Analisis*, terjemahan Wawan Juanda, Bandung: Binacipta. 1994.

Ikenberry, G. John (ed), *American Foreign Policy. Theoretical Essays*, Third Edition. New York: Longman, 1999.

Johnson, Loch K. & James J. Wirtz (eds.), *Strategic Intelligence: Windows into Secret World*. Los Angeles, CA: Roxbury, 2004.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa ini*. 1983.

Kusumohamidjojo, Budiono., *Hubungan Internasional Kerangka Studi Analitis*, Bandung: Bina Cipta, 1987.

Little, Richard & Michael Smith. *Perspective on World Politics*. New York: Routledge, 1991

Lukes, Steven. *Power and the Battle for Hearts and Mind: on the Bluntness of Soft Power*. Power in World Politics, Routledge. 2007

Morgenthau, Hans, J., *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990.

Morrison, Charles E. , *Asia Pacific Security Outlook*, AN APAP Project 2003.

Myers, David J., *Regional Hegemons, Threat Perception and Strategic Response*. West View Press, 1991.

Nye, Jr., Joseph S., *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. Public Affairs, New York. 2004

Remy, Richard C., Lary Elowitz & William Berlin, *Government in The United States*. New York: MacMillan Publishing Company, 1984.

Robert, S. Ross, "Bipolarity and Balancing in East Asia," in *Balance of Power: Theory and Practice in The 21<sup>st</sup> Century*, ed. T.V. Paul, James J. Wirtz, and Michael Fortmann, Stanford: Stanford University Press, 2004.

Russel, Richard L., *Sharpening Strategic Intelligence*, New York: Cambridge University Press, 2007.

Simon, Roger. *Gramsci's Political Thought: An introduction*, London: 1991.

Saragih, Simon. *Jika Mau, Indonesia Lebih Mudah Berbalik Arah di dalam Cermin dari China*. Editor: Bagus Dharmawan. Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2006.

Stokes, Mark A., *China's Strategic Modernization: Implication for The United States*, US Army War College, September 1999.

The Military Balance 2006, Routledge IISS 2006.

Twight, Mark, *Relations between the Chinese Mainland and Taiwan : PRC White Paper*, 2000

Tyler, Patrick, *A Great Wall, Six President and China, an Investigative History* (New York: Century Foundation Book, Public Affairs: 1999.

United States Departement of State, *Bureau of Public Affairs, Realism, Strength, Negotiation: Key Foreign Policy Statement of the Reagan Administration*, Washington DC, May 1994.

Wibowo, Ignatius, *Belajar dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang dalam Era Globalisasi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2005

#### **B. JURNAL**

Betts, Richard K., "Should Strategic Studies Survive?," *World Politics*, no. 1 October 1997.

Bregsten, C. Fred, A Partnership of Equals: How Washington Should Respond to China's Economic Challenge, *Foreign Affairs* 88, May/June 2009.

Bush, George W., "The National Security Strategy of The United States of America" (Washington, DC: The white House, September 2002). *National Security Strategy*, March 2006.

Cliff, Roger and Shapiro, Jeremy, "The Shift to Asia: Implications for U.S. Land Power" dalam Lynn E. Dans and Jeremy Shapiro (ed) *The U.S. Army and The New National Security Strategy*, RAND Aroyyo Center, 2003.

Gitlin, Todd, 'Prime time ideology: the hegemonic process in television entertainment', in Newcomb, Horace, ed. (1994), *Television: the critical view -- Fifth Edition*, Oxford University Press, New York, 1994.

Heidenrich, John G., "The State of Strategic Intelligence. The Intelligence Community's Neglect of Strategic Intelligence", *Central Intelligence Agency's Center for the Study of Intelligence*, 2007.

Jervis, R., Understanding the Bush Doctrine, *Political Science Quarterl Volume 118 Nomor 3*, 2003.

Kent, Sherman. *Strategic Intelligence for American World Policy*. Princeton, NJ: *Princeton University Press*, 3, (Princeton 1949) hal 7.

Maurice R. Greenberg and Richard N. Haas, editor, *Making Intelligence Smarter: The Future of U.S. Intelligence, Report of an Independent Task Force*, New York: Council on Foreign Relations, 1996.

Melissen, Jan. *Wielding Soft Power. Clingendael Diplomacy Papers, no.2.* Clingendael, Netherlands. 2005.

Prybyla, Jan S., Notes on The Methodology of China Economic Reforms, *Issues and Studies 35 No.4.* Juli/Agustus 1999.

Relations between the Chinese mainland and Taiwan : PRC White paper, *Asian Affairs 27*, Februari 2000.

Zhimin, Chen, Nationalism, internationalism and Chinese Foreign Policy, *Journal of Contemporary China, Carfax.* Publishing 2005.

#### **C. TESIS**

Akbar, Feri., *Revisi Aliansi Pertahanan Amerika-Jepang: Suatu Respon Terhadap Kebangkitan Republik Rakyat China periode 1997-2000.* Tesis Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. 2001.

#### **D. MEDIA CETAK DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK**

*A Special Report on China and America: A Message from Confucius*, diakses dari [http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story\\_id-14678507](http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id-14678507) pada 25 November 2010

*Anggaran Belanja Militer China*, diakses dari <http://beritahankam.blogspot.com/2010/03/anggaran-belanja-militer-china-rp-722.html>, pada 17 November 2010

Antara 29 Oktober 2010, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/1288354865/asean-china-targetkan-nilai-perdagangan-500-miliar-dolar> pada 26 November 2010

Antasari 28 April 2010, diakses dari <http://antasari.net/obama-puji-entrepreneur-ri/>, pada 10 Juni 2010

ASEAN. *Joint Declaration of The Heads of State/Government of The Association of Southeast Asian Nation and The People's Republic of China on Strategic Partnership for Peace and Prosperity*, diakses dari <http://www.aseansec.org/15265.htm>, pada 18 November 2010

ASEAN. *ASEAN-China Dialogue Relation* diakses dari <http://www.aseansec.org/4979.htm>, pada 18 November 2010

Bataviase, 9 Juni 2010, diakses dari <http://bataviase.co.id/node/244568>, pada 7 November 2010

BBC, 20 mei 2010 diakses dari [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/05/100520\\_obamairan.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/05/100520_obamairan.shtml), pada 7 November 2010

BBC, 26 September 2010, diakses dari, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/09/100926\\_jewishsettlement.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/09/100926_jewishsettlement.shtml), pada 27 September 2010.

Bombey, Daniel & Lemer, Jeremy, *Spirelling defense Budget: US Military Responsibilities to Expand* diakses dari <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17325>, pada 7 November 2010

CIA, National Intelligence Council, *Mapping the Global Future*, Desember 2004, diakses dari [www.cia.gov](http://www.cia.gov), pada 17 November 2010

*China Foreign Direct Investment* diakses dari <http://www.chinability.com/FDI.htm> pada 12 November 2010.

*China joins Treaty of Amity, Cooperation in Southeast Asia* diakses dari <http://id.china-embassy.org/eng/xwdt/t87231.htm>, pada 17 November 2010

Cordenillo, Raul L., *The Economic Benefits to ASEAN of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* diakses dari <http://www.aseansec.org/17310.htm>, pada 17 November 2010

Detik 15 Februari 2010, diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2010/02/15/083007/1299458/4/pdb-jepang-masih-kalahkan-china> pada 17 November 2010

Detik 5 April 2009, diakses dari <http://www.detikfinance.com/read/2009/05/04/062251/1125623/5/asean-3-kini-punya-lembaga-penjamin-kredit-bersama> pada 17 November 2010.

Deplu RI, *Konsultasi Bilateral mengenai masalah keamanan antara RI dan RRC*, (Jakarta, Juli 1999), hlm 63.

*Dibalik Kebijakan Obama di Asia Timur*, diakses dari [http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&view=article&id=16765:di-balik-kebijakan-obama-di-asia-timur&catid=15:lintas-warta&Itemid=58](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=16765:di-balik-kebijakan-obama-di-asia-timur&catid=15:lintas-warta&Itemid=58), pada 10 November 2010.

*Dictionary of Military and Associated Terms*. US Department of Defence. 2005.

Department of Defense. *Joint Publication* diakses dari [http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new\\_pubs/jp1\\_02.pdf](http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf). pada 30 November 2008

*EAS report* ke 4 tahun 1998

Financial Timer, dikutip oleh Changers Johnson. *No Longer the "Lone" Superpower: Coming to Terms with China*. (Japan Policy Research Institute Working Paper no.105. maret 2005).

*Free Trade Agreement ASEAN: Konsesi Obama kepada Cina* diakses dari [http://theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=882&type=3](http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=882&type=3), pada 18 November 2010.

*Hubungan Indonesia Cina*, diakses dari <http://oseafas.wordpress.com/2010/02/09/hubungan-asean-%E2%80%93-cina/>, pada 18 November 2010.

*Hubungan ASEAN-China*, diakses dari <http://oseafas.wordpress.com/2010/02/09/hubungan-asean-%E2%80%93-cina/>, pada 17 November 2010

*Kenaikan Impor Minyak Cina*. Diakses dari <http://www.pacific2000.co.id/research/berita-hong-kong/impor-minyak-cina-diperkirakan-naik-5-persen-ditahun-2010.php> pada 20 November 2010

Kompas 15 November 2009, diakses dari <http://lipsus.kompas.com/read/2009/11/15/05572285/Pemimpin.Asia.Pasifik.Berte.mu.Obama>, pada 17 November 2010.

Lieberman, Dan. *"The Pre-emptive Strike Strategy : How to Lose Friend, then lose all"*. Diakses dari [http://www.alternativeinsight.com/Pre-emptive\\_strike.html](http://www.alternativeinsight.com/Pre-emptive_strike.html). pada 11 Desember 2009.

Kompas 12 Oktober 2010, diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/10/12/15320345/Cadangan.Devisa.China.Terbesar.Dunia>, pada 17 November 2010

Kwan, Chi Hung., *The Effects of SARS on Asian Economies*. China in Transition, April 30, 2003. <http://www.rieti.gc.jp/en/china/03050701.html> diakses pada 7 Februari 2010.

Liputan 6, 1 Juni 2010, diakses dari <http://berita.liputan6.com/luarnegeri/201006/279686/Hasil.Pemilu.Irak.Disahkan>, pada 7 November 2010.

Mahmud, Abdul Rahman, *Kesadaran Krisis Global*, diakses dari [http://www.ipislam.edu.my/index.php/artikel/archive/December\\_2008](http://www.ipislam.edu.my/index.php/artikel/archive/December_2008), pada 17 November 2010.



*MDGS, The Efforts to Achieve the MDGs in Indonesia* diakses dari [http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=25&Itemid=12](http://www.targetmdgs.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=12), pada 20 Oktober 2010

Morrisson, WM., *China's Economic Outlook*. diakses dari <http://www.fas.org/sgp/crs/row/IB98014.pdf> pada 17 November 2010

Nye, Jr., Joseph S., *The Decline of America Soft Power* diakses dari <http://www.foreignaffairs.com/articles/59888/joseph-s-nye-jr/the-decline-of-americas-soft-power> pada 20 November 2010

Nye, Jr., Joseph: 'Smart Power Under Obama-What Can We Expect?', briefing 17 Maret 2009.

Pernyataan Dick Cheney dalam New York Times, 8 Maret 1992

Pidato Presiden AS, Barack Obama, dalam kunjungannya ke Mesir di Universitas Kairo 4 Juni 2009

Pidato Hillary Clinton di Hawaii, 3 November 2010, dalam rangkaian kunjungan ke negara-negara di Asia Pasifik.

Porter, Keith, *Developing an Integrated Foreign Policy. What is Smart Power*. Diakses dari <http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/a/smartpower.htm>. pada 20 November 2010.

*Penduduk Cina 139 Milyar*, diakses dari <http://www3.rnw.nl/bahasa-indonesia/bulletin/penduduk-cina-139-milyar> pada 17 November 2010

*Republika* (Jakarta), 12 April 2009, diakses dari [http://rol.republika.co.id/berita/43433/ASEAN\\_Gantikan\\_Jepang\\_Sebagai\\_Mitra\\_Utama\\_China](http://rol.republika.co.id/berita/43433/ASEAN_Gantikan_Jepang_Sebagai_Mitra_Utama_China), pada 17 November 2010.

Review of East Asia Strategic 1998 -1999.

Sudarman, Suzie. *Ekspektasi Peningkatan Hubungan RI-AS Pasca Kunjungan Obama*. Media Indonesia: November 2010. diakses dari [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) pada 20 November 2010

Tempo, 2 Maret 2010, diakses dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/timteng/2010/03/02/brk.20100302-229267.id.html>, pada 7 November 2010

Treverton, Gregory F., dan Jones, Seth G., *Measuring National Power*, [www.rand.org](http://www.rand.org)

The Guidelines for Japan-US Defense Cooperation. Diakses dari <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/guideline2.html> pada 27 November 2010.

*The 6<sup>th</sup> Five Year Plan (1981-1985)*. Diakses dari <http://china.org/en/english/MATERIAL/157619.htm> pada 18 November 2010

*US Bombing of Chinese Embassy: Implausible Blunder?*  
[www.globalpolicy.org/component/content/article/.../38827.html](http://www.globalpolicy.org/component/content/article/.../38827.html). diakses pada 18 November 2010.

*US-Japan Joint Declaration on Security 1996* diakses melalui <http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.htm> pada 27 November 2010.

Wikipedia, diakses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Hegemony> pada 15 November 2010

WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2008 Princeton University, Farlex Inc.

*What Obama and China Disagree On*. Diakses dari <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1939568,00.html?iid=sphere-inline-bottom> . pada 17 November 2010.

Yani, Drs., M.A., Dr. Yanyan Mochamand, *Makna Strategis Pembangunan Militer China* diakses dari [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna\\_strategis\\_pembangunan\\_militer\\_cina.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/makna_strategis_pembangunan_militer_cina.pdf), pada 21 November 2010.

Yan, Chengzong, *FDI from China-Situation, Obstacles and Expectations*. (UNITAR (United Nations Institute for Training and Research)/SHU Series on International Economics and Finance: 2006) diakses dari <http://www.unitar.org> pada 12 November 2010.

[www.globalsecurity.org](http://www.globalsecurity.org) diakses pada 17 November 2010

<http://news.okezone.com/read/2010/06/28/373/347404/as-dukung-pendidikan-tinggi-ri-usd165-jt>

<http://politik.kompasiana.com/2010/11/11/manfaat-mudiknya-bang-obama-ke-jakarta-bagi-indonesia/>